

SITI LAILATUL LATIPAH_5553200029_CP

by Turnitin

Submission date: 23-Aug-2024 03:42AM (UTC+0100)

Submission ID: 238867910

File name: iiIhUVfsU3CXXKkuDVGD.docx (1.71M)

Word count: 28999

Character count: 195567

3
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN SEKTOR
UNGGULAN PRIMER**

40
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Oleh:
7
SITI LAILATUL LATIPAH
5553200029

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

3
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN SEKTOR
UNGGULAN PRIMER**

40
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Oleh:
7
SITI LAILATUL LATIPAH
5553200029

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Siti Lailatul Latipah dengan NIM 5553200029, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul:

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sektor Unggulan Primer”.

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan saksi-saksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, Juni 2024



Siti Lailatul Latipah
5553200029

**PERSETUJUAN PENGESAHAN
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI**

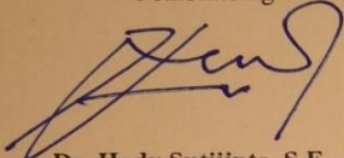
Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SEKTOR UNGGULAN PRIMER**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan **LULUS**
Pada hari Rabu, 26 Juni 2024 oleh Dewan Penguji.

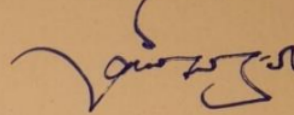
Serang, 26 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si
NIP. 197011052008121002

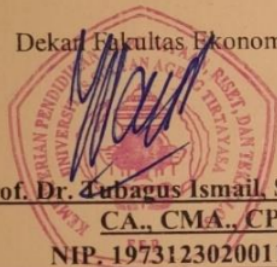
Pembimbing II



Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T
NIP. 198801052024211019

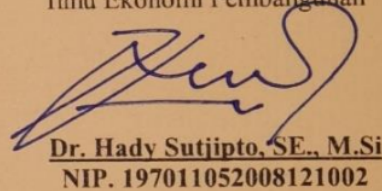
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., Ak., M.M.,
CA., CMA., CPA
NIP. 197312302001121001

Ketua Jurusan
Ilmu Ekonomi Pembangunan

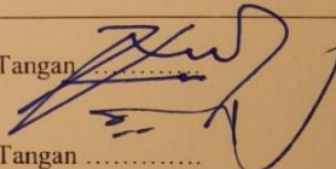


Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si
NIP. 197011052008121002

Dewan Penguji

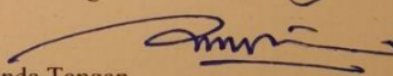
Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si
NIP. 197011052008121002

Tanggal 1/8-24

Tanda Tangan 

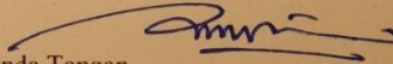
Dr. Sugeng Setyadi, S.E., M.Si
NIP. 198205302008121003

Tanggal 01/6-24

Tanda Tangan 

Saharuddin Didu, S.TP., M.E
NIP. 197807042010121001

Tanggal 01/08-24

Tanda Tangan 

Nama : Siti Lailatul Latipah
NIM : 5553200029
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : Strata-I (S1)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." – Q.S Yusuf ayat 87

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." – Q.S Al-Baqarah ayat 286

"Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad." – Imam Al Ghazali

"Sebaik-baiknya kamu merencanakan sesuatu, tetapkan rencana Allah yang terbaik." – Lail

21

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini

Untuk kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendo'akan serta mendukungku

Terima kasih banyak atas segala yang diberikan, baik do'a, kasih sayang, serta

dukungan moral dan materi yang tiada henti

Semoga Ayah dan Mamah selalu dalam lindungan-Nya dan diberikan kesehatan serta panjang umur

ABSTRACT

Regional autonomy has been implemented for more than two decades. However, local governments still struggle to manage their finances independently. Issues with the implementation of regional autonomy can arise both domestically and internationally. Domestically, conditions indicate that citizens desire transparency and autonomy (decentralization). Meanwhile, internationally, increasing globalization hinders competitiveness from each country, including local governments. This research aims to identify factors influencing regional financial independence, specifically primary output factors, natural resources revenue sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and tax ratio. The study employs panel data consisting of time series data from 2018 to 2022 and cross-sectional data from 140 districts in Indonesia with primary economic sectors. The analytical method used in this study is the Generalized Method of Moments (GMM) with the System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) approach. The results of this study indicate that the primary output variable and tax ratio have a positive and significant influence on regional financial independence. Additionally, natural resource revenue sharing funds and general allocation funds have a negative and significant influence on regional financial independence. However, the special allocation funds variable does not affect regional financial independence.

Keyword: Regional Autonomy, Regional Financial Independence, Primary Output, GMM

ABSTRAK

Otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari dua dekade, akan tetapi pemerintah daerah masih belum mampu untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi otonomi daerah dapat terjadi dari dalam maupun luar negeri. Kondisi dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Sementara kondisi luar negeri menunjukkan bahwa semakin maraknya kemajuan globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, meliputi daya saing pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, khususnya faktor output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta *tax ratio*. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *time series* pada tahun 2018 – 2022 serta data *cross-section* pada 140 Kabupaten di Indonesia yang memiliki faktor unggulan primer. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dengan pendekatan *System Generalized Method of Moments* (SYS-GMM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel output primer dan *tax ratio* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara, variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Output Primer, GMM

50 KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sektor Unggulan Primer”** dan penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada masyarakat dan juga peneliti sendiri.

159 Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun yang lainnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, doa, usaha, bimbingan, serta dukungan baik materi maupun moral yang diberikan dari berbagai pihak sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bapak Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dukungan, serta nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Saharuddin Didu, S.TP., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, atas bantuannya dalam mempersiapkan kegiatan sidang dengan baik.
5. Bapak Tony S. Chendrawan, S.T., S.E., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Bapak Rah Adi F. Ginanjar, S.E., M.T., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, motivasi, arahan, dukungan, serta nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Stannia Cahaya Suci, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing penulis sejak awal perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, atas pengetahuan, bimbingan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Surnadi dan Ibu Nurhayati, serta partner saya Ainul Yaqin yang telah menjadi penyemangat dan motivator terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas dukungan dan motivasi merekalah penulis dapat selalu semangat

dan berusaha semaksimal mungkin sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Sahabat saya, Salsabilla Adinda Rizky, Sylvia Nursarila dan Fatimah Azzahro.
Terima kasih banyak sudah selalu mendukung dan menjadi tempat berkeluh kesah. Atas dukungan dan motivasinya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan seperjuanganku selama perkuliahan Octa Widya Pratiwi, Suci Eka Pertiwi, Putri Mega Wardini, Siti Ahyuni, Dilya Alvyanti dan Eva Latifah.
Terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dan perkuliahan.
12. Teman-teman Asisten Laboratorium Ilmu Ekonomi Pembangunan 9G dan 10G.
Khususnya Aslab 9G Syafira Febriyanti, Farah Naili Zulfa, Loanna Zahra Mahintan, Nasarudin, Ridwan Maulana, Yeremia Sahat Kirana yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya untuk kegiatan praktikum dan perkuliahan.
13. Teman-teman KKM Kelompok 46, terima kasih atas semua pengalaman menyenangkan selama pengabdian 1 bulan di Desa Cikeusik, yang tentunya menjadi salah satu memori berharga bagi penulis.
14. Teman-teman seperjuangan di Asrama, khususnya Teh Siti Umyati, Alfiah, Teh Lela Saro, dan Eem Hulaemah, terima kasih telah mewarnai lembaran kisah penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
15. Bapak dan Ibu Karyawan PT Belitang Panen Raya – Cakung, ¹²terima kasih atas semua pengalaman dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

16. Teruntuk Dmitriev Abraham Hariyanto, terima kasih telah menghibur dan menemani penulis selama semester akhir dengan wajah serta tingkahnya yang lucu dan menggemaskan.

Selain itu, kepada seluruh pihak yang terlibat selama masa perkuliahan maupun penyusunan skripsi yang tidak dapat dituliskan ⁵⁸ satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun bagi penulis.

Serang, Juni 2024
Penulis,

Siti Lailatul Latipah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kajian Teoritis	16
2.2 Kajian Empiris	33
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.4 Hubungan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat	40
2.5 Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	46
3.2 Jenis dan Sumber Data	46

3.3	Operasionalisasi Variabel	46
3.4	Model Penelitian dan Teknik Analisis Data	48
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
4.2	Analisis Deskriptif.....	58
4.3	Hasil Uji Hipotesis	67
4.4	Pembahasan	79
6	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1	Kesimpulan.....	106
5.2	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....		110
LAMPIRAN.....		113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketentuan Kemandirian Keuangan Daerah	25
Tabel 2.2	Kajian Empiris	33
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	47
Tabel 4.1	Hasil Estimasi Pendekatan FD-GMM	68
Tabel 4.2	Hasil Estimasi Pendekatan SYS-GMM	69
Tabel 4.3	Hasil Uji Sargan Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM	70
Tabel 4.4	Hasil Uji Arellano-Bond Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM	71
Tabel 4.5	Hasil Uji Ketidakhiasan Model Fixed Effect Model, FD-GMM, SYS-GMM, dan Pooled Least Square	74
Tabel 4.6	Hasil Estimasi Model SYS-GMM	74
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik Parsial	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia (Persen).....	6
Gambar 1.2	Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Pada 10 Kabupaten Tertinggi di 140 Kabupaten Indonesia (Persen).....	7
Gambar 1.3	Rata-rata Output Primer dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Miliar Rupiah).....	10
Gambar 1.4	Rata-rata DBH SDA dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Juta Rupiah).....	12
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1	Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia (Persen).....	59
Gambar 4.2	Perkembangan Output Primer di 140 Kabupaten di Indonesia (Miliar Rupiah).....	61
Gambar 4.3	Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	62
Gambar 4.4	Perkembangan Dana Alokasi Umum di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	64
Gambar 4.5	Perkembangan Dana Alokasi Khusus di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah).....	65
Gambar 4.6	Perkembangan Tax Ratio di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen).....	67

17
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian	113
Lampiran 2. Hasil Uji Pemilihan Model FD-GMM	135
Lampiran 3. Hasil Uji Pemilihan Model SYS-GMM	136
Lampiran 4. Hasil Ketidakbiasan Model	137

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah telah hadir di Indonesia selama lebih dari 2 (dua) dasawarsa, sejak terjadinya gerakan reformasi tahun 1998. Akan tetapi, otonomi daerah secara legal diterapkan di Indonesia sejak UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah mulai diberlakukan dan peraturan tentang otonomi daerah yang masih aktif hingga kini yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya diterapkan di level Kabupaten/Kota. Akan tetapi, pemerintah menggunakan masa transisi peralihan kewenangan secara tidak langsung sehingga nantinya asas desentralisasi dan dekonsentrasi dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota dinilai lebih penting karena menitikberatkan otonomi daerah mungkin dalam jangka panjang lebih penting daripada pelaksanaannya di level Provinsi (Kaloh, 2007:52).

Sejauh ini, banyak sekali hambatan yang dilalui Indonesia selama otonomi daerah diterapkan. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh wilayah di Indonesia yaitu keragaman dalam banyak hal, seperti potensi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya insani, infrastruktur, budaya, dan lain-lain, sehingga implementasi otonomi daerah menjadi masalah seragam yang cukup serius. Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemda bertujuan untuk mengembangkan mekanisme demokrasi pada level daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah lokal maupun kepentingan kebijaksanaan politik

nasional dalam era reformasi (Kaloh, 2007:53). Kondisi dalam negeri menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan transparansi dan kemandirian melalui desentralisasi. Di sisi lain, perkembangan luar negeri semakin memperlihatkan pesatnya globalisasi yang menuntut setiap negara, termasuk pemda dalam meningkatkan daya saing (Halim, 2008: 1).

¹⁸⁰ Sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda, pemerintah di daerah tingkat kabupaten diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengimplementasikan seluruh kegiatan pemerintahan yang diawali dengan perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian, hingga evaluasi, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan bidang politik luar negeri yang telah ¹⁰⁴ ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Akibat dari adanya kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan di daerahnya. Kewajiban tersebut dapat tercapai apabila pemda ⁷⁹ mampu mengelola segala potensi daerahnya (sumber daya alam, sumber daya insani, sumber daya keuangan) secara optimal (Halim, 2008:229).

²⁰² Kebijakan otonomi daerah mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada saat ini sehingga ²¹⁸ UU No. 22 Tahun 1999 tidak lagi diberlakukan karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan implementasi otonomi daerah. Kemudian peraturan tersebut digantikan dengan ¹³⁷ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang pada akhirnya kembali diganti dengan ²⁴ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda karena dirasa perlu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini. UU ini memandang otonomi daerah sebagai hak, wewenang, serta kewajiban suatu daerah yang otonomi untuk

mengatur dan mengelola sendiri segala aktivitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Melalui implementasi otonomi daerah, dapat dilihat bagaimana kemandirian keuangan di suatu daerah. Dalam publikasi Deskripsi dan Analisis APBD dalam DJPK Kemenkeu pada tahun 2011, rasio kemandirian keuangan disajikan dalam perbandingan PAD dengan total pendapatan daerahnya. Jika nilai rasio kemandirian tinggi mencerminkan bahwa PAD suatu daerah tersebut besar sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut telah mandiri secara keuangan. Agar tujuan otonomi daerah semakin optimal dan kemandirian keuangan daerah terus meningkat, maka pemerintah¹⁰⁵ mengeluarkan UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini diharapkan dapat memberikan efek positif dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan menjadi kunci pokok agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan potensi daerah.

³⁴ Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengimplikasikan kemampuan pemda dalam mendanai sendiri segala kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Tingkat kemandirian yang semakin tinggi mengandung arti bahwa ketergantungan daerah terhadap dana bantuan eksternal³¹ semakin rendah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Jika nilai rasio kemandirian semakin tinggi, maka partisipasi masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah juga semakin tinggi yang mana hal tersebut merupakan komponen utama dari PAD, sehingga akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat (Halim, 2008: 232-233).

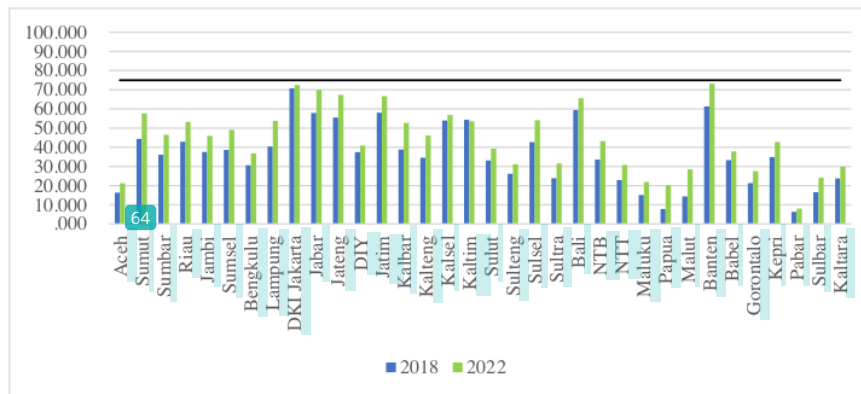
Dalam hal otonomi daerah, yang menjadi permasalahan bukanlah tentang pelimpahan kewenangan dan pembiayaan ke daerah, akan tetapi keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat (Yani, 2004: 229-230). Dalam prinsipnya, suatu daerah harus melaksanakan otonomi dengan bertanggung jawab guna mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu memperkuat kemampuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan terus mementingkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya agar tidak terjadi ketimpangan, serta mampu menjamin keserasian hubungan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, memberikan fasilitas berupa kemudahan, bantuan, serta dorongan agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai perundang-undangan (Djaenuri, 2012: 9-12).

Untuk meminimalisir sikap pemerintah daerah dari dependensi pemerintah pusat, maka bisa dilakukan pengukuran pada tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Indikator tersebut merupakan sebuah pengukuran guna mengetahui seberapa mandiri suatu daerah dalam menyelenggarakan pendanaan untuk semua aktivitas pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat menggunakan pendapatan yang diperolehnya. Dengan mengetahui besaran kemandirian keuangan

daerah, dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah sudah optimal dalam menentukan aturannya sendiri dan apakah pemerintah daerah telah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dengan memperhitungkan jumlah realisasi PAD itu sendiri, kemudian dibandingkan dengan pendapatan eksternal seperti bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman. Indikator tersebut dapat menentukan kesiapan pemerintah daerah untuk secara mandiri mendanai semua aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (Halim, 2007). Semakin besar kemandirian keuangan suatu daerah, berarti bahwa pemerintah daerah semakin independen dalam mengatur urusan keuangan daerah yang mana akuntabilitas pemerintah daerah di mata masyarakat dapat dioptimalkan.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil revidi atas kemandirian Fiskal Pemda tahun 2020, menyebutkan bahwa ada sebanyak 443 dari 503 pemda atau 88,07% yang masih berada dalam kategori “Belum Mandiri”. Hal tersebut berarti hampir seluruh pemda masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja masing-masing pemda. Bahkan, BPK juga menyebutkan bahwa ada sebanyak 468 pemda berada dalam kondisi stagnan pada kategori belum mandiri selama 11 tahun ke belakang hingga tahun 2020. Adapun perkembangan kemandirian keuangan pada tingkat Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



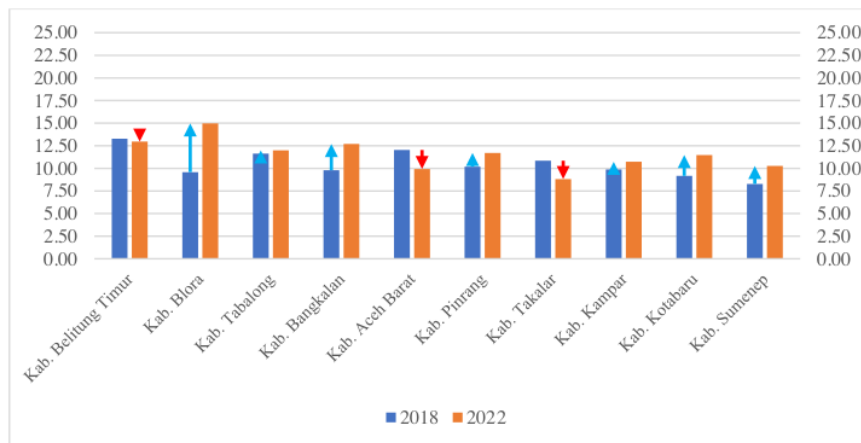
Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024

Gambar 1.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia (Persen)

Dapat dilihat Gambar 1.1 mengenai perkembangan tingkat kemandirian di 34 Provinsi Indonesia pada tahun 2018 dan 2022, menunjukkan bahwa seluruh Provinsi masih di bawah kategori kemandirian “tinggi” yang berada pada rentang 75 hingga 100 persen. Jika dilihat, sudah banyak daerah yang semakin mandiri dalam mengurus segala kegiatan pemerintahannya yang mana ditandai dengan peningkatan yang terjadi di tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa pemda telah memaksimalkan pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi segala kepentingan masyarakat lokal.

Secara umum, dipercayai bahwa penerapan sistem kemandirian fiskal ini mampu meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pengukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemudahan dalam mengakses seluruh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik yang harus terpenuhi dengan baik dan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Agar menjadi daerah yang otonom dari segi keuangan, maka pemda perlu berperan aktif dalam

mengelola potensi di daerahnya guna menaikkan pendapatan daerahnya sendiri. Namun apabila pendapatan daerah tidak dapat mencukupi kegiatan pemerintahan, maka biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah juga akan sulit. Jika potensi pendapatan daerah tersebut besar, sementara potensinya belum bisa dikelola dengan baik maka nantinya tidak dapat mempengaruhi besaran pendapatan daerah. Secara teori, apabila daerah memiliki potensi pendapatan yang sangat besar maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan semakin besar. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya tidaklah begitu.



Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024

14 **Gambar 1.2 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Pada 10 Kabupaten Tertinggi di 140 Kabupaten Indonesia (Persen)**

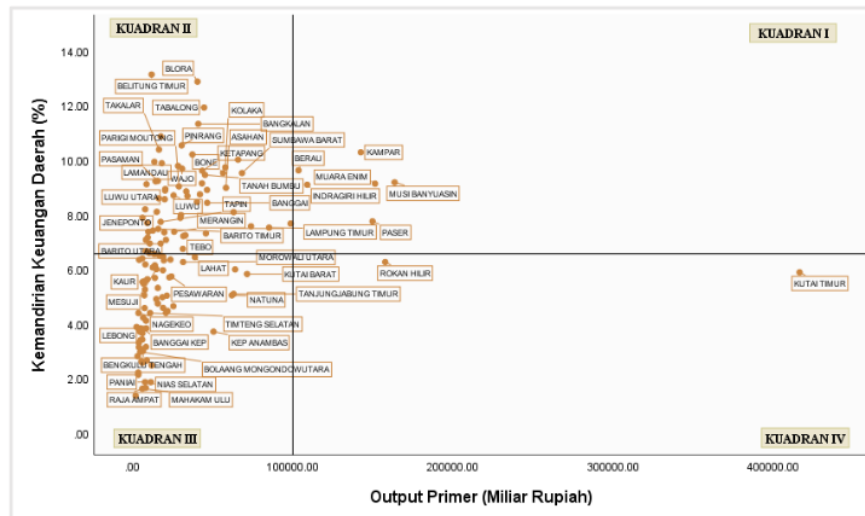
Gambar 1.2 menyajikan perkembangan 10 Kabupaten dengan tingkat kemandirian keuangan tertinggi dibandingkan 140 Kabupaten lainnya yang ada di Indonesia pada tahun 2018 dan 2022. Dapat disimpulkan bahwa tiap wilayah memiliki tingkat kemandirian yang beragam. **5** Pada Kab. Bolora, Kab. Tabalong, Kab. Bangkalan, Kab. Pinrang, Kab. Kampar, Kab. Kotabaru, serta Kab. Sumenep mendapati hasil bahwa kemandirian keuangan mengalami peningkatan dari tahun

2018 ke tahun 2022. Sementara Kab. Belitung Timur, Kab. Aceh Barat dan Kab. Takalar justru mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Meski lebih banyak yang mengalami peningkatan di tahun 2022, akan tetapi tingkat kemandirian masing-masing wilayah masih sangat rendah yang mana ditunjukkan pada gambar yang hanya berada di antara rentang 0,00 – 25,00% saja. Dimana hal ini menandakan bahwa pemda masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan belum mampu mengelola pendapatan daerahnya dengan optimal. Padahal, paradigma pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai acuan dalam pengimplementasian otonomi daerah. Secara hakikat, kekayaan daerah didapatkan dari pemberian kesempatan luas kepada pemda untuk mengelola dan memaksimalkan potensi masing-masing wilayah, termasuk sumber daya alam, anggaran, sumber daya insani, hingga sumber daya lainnya (Rochmah, 2015).

Tujuan penerapan otonomi daerah pada masing-masing pemda yaitu agar pemda mampu meningkatkan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, demokratis, dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemda harus mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya insani dan sumber daya keuangan secara efektif. Keberhasilan pemda dalam mengatur dan mengelola keuangan dapat dilihat dari realisasi APBD tahun berjalan (Periansya, 2019). Untuk melihat pendapatan pemda melalui kekayaan alam yang ada, maka kita perlu melihat basis sektor ekonomi dari masing-masing daerah tersebut. Struktur ekonomi dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu: a) Sektor primer, dengan kategori pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian;

b) Sektor sekunder, dengan kategori industri pengolahan, listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang, dan konstruksi; serta c) Sektor tersier, dengan kategori ⁶⁸ penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kegiatan dan jasa lainnya.

Sektor pertanian ⁶² memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara, serta fakta bahwa ⁶¹ sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor ini. Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan distribusi pendapatan daerah merata, serta dapat menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Julia, et al., 2015). Berikut adalah keterkaitan antara pertumbuhan sektor primer terhadap kemandirian keuangan di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer:



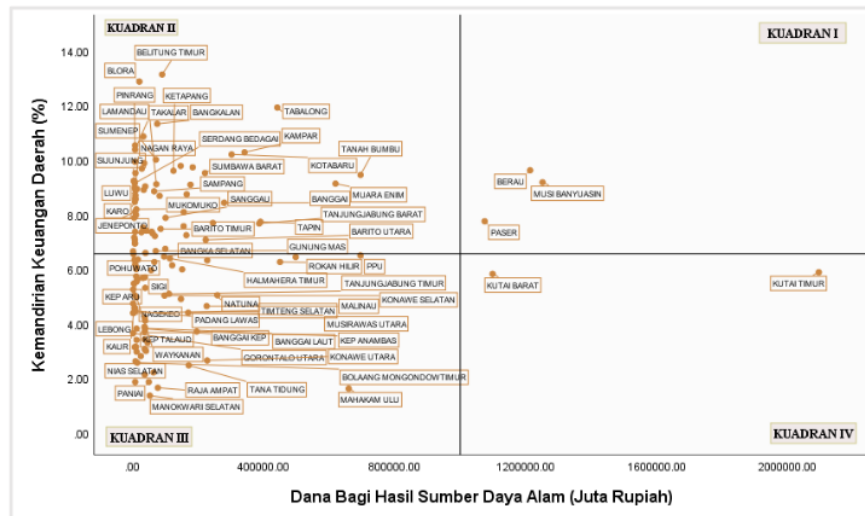
Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Indonesia, (diolah) 2024

Gambar 1.3 Rata-rata Output Primer dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Miliar Rupiah)

Gambar 1.3 menggambarkan rata-rata output primer dan kemandirian keuangan pada 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018-2022. Mayoritas Kabupaten berada pada Kuadran II dan III. Pada Kuadran II, menandakan bahwa Kabupaten yang memiliki pendapatan sektor primer kurang dari Rp100.000 miliar akan tetapi tingkat kemandirian keuangannya cukup tinggi. Sebaliknya, Kuadran III mencerminkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan nilai yang rendah daripada Kabupaten lain. Daerah yang berada di Kuadran I yaitu Kampar, Berau, Muara Enim, Indragiri Hilir, Musi Banyuasin, dan Paser memiliki output primer lebih dari Rp100.000 miliar serta tingkat kemandirian keuangan daerah di atas rata-rata 6,56%. Akan tetapi, Kabupaten Kutai Timur dan Rokan Hilir membuktikan bahwasanya daerah dengan basis sektor unggulan primer justru tidak berarti bahwa daerah tersebut sudah mandiri dalam mengatur keuangannya. Artinya, pengelolaan

potensi sumber dayanya belum optimal sehingga nilai sektor primer tidak dapat menyumbangkan kepada pendapatan asli daerahnya.

Menurut penelitian (Umam, 2017; Oki, 2019; Adha, 2022) mengungkapkan bahwa output primer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hal ini berarti peningkatan yang terjadi pada output primer dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sektor pertanian menjadi sektor terpenting dalam suatu perekonomian Indonesia karena jika dilihat dari peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penting di Indonesia. Sementara (Fatmala, 2020) dalam temuannya mengungkapkan bahwa sektor pertanian memberikan pengaruh yang positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal.



Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024

5

Gambar 1.4 Rata-rata DBH SDA dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Juta Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, menyajikan rata-rata DBH SDA terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dari tahun 2018 – 2022. Dapat diketahui bahwa Kuadran II didominasi oleh Kabupaten dengan rasio kemandirian keuangan melebihi rata-rata 6,56% dengan nilai DBH SDA yang rendah. Begitu pula dengan Kuadran III yang menunjukkan bahwa cukup banyak Kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian rendah serta pengalokasian DBH SDA yang cukup rendah. Dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur yang berada di Kuadran IV dengan alokasi DBH SDA yang tinggi tetapi tingkat kemandiriannya justru berada di bawah rata-rata 6,56%. Sementara Kabupaten Berau, Paser dan Musi Banyuasin memiliki alokasi Dana Bagi Hasil SDA yang besar dan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, akan tetapi belum mencapai 25%.

127

Penerapan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan pelayanan

publik, memanfaatkan peran aktif masyarakat setempat, dan mendorong peningkatan daya saing antarwilayah. Ide dari penerapan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun penyelenggaraan dana perimbangan merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah (Olivia, 2020). Pemberian dana transfer dari pusat bertujuan agar pemda dapat mengembangkan potensi daerahnya secara mandiri. Dana Bagi Hasil SDA adalah salah satu bentuk dana perimbangan yang berasal dari beberapa sektor seperti sektor kehutanan, perikanan, pertambangan panas bumi, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sanga, et al., 2018; Marzuki, et al., 2022; Natasya, et al., 2024) mengungkapkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut berarti semakin besar penyaluran dana bagi hasil SDA kepada daerah maka dapat membuat daerah tersebut mandiri. Sementara, (Verawaty, et al., 2017; Martini, et al., 2019; Indrianingrum & Priyono; 2023; Rahayu, et al., 2024) justru berpendapat bahwa dana bagi hasil memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah pada 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer, khususnya mengenai pengaruh variabel output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta *tax ratio* dari tahun 2018 – 2022 dengan menggunakan analisis regresi data panel dinamis melalui pendekatan *first-*

difference GMM dan *System* GMM untuk pemodelan tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

20

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian yang ada sebelumnya, maka dapat diangkat rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
2. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
5. Bagaimana pengaruh *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?

46

1.3 Tujuan Penelitian

Jika melihat beberapa masalah yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dinyatakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
2. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.

63

- 63
3. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
 4. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
 5. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.

145

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hadirnya penelitian ini dapat membantu memberikan kontribusi ilmiah tentang perkembangan fiskal daerah, terutama terhadap kemandirian keuangan di daerah dengan beberapa faktor desentralisasi fiskal sehingga hasil penelitian mampu dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan hadirnya penelitian ini, penulis mengharapkan jika hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan sebagai langkah peningkatan kemandirian keuangan di daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis**2.1.1 *Grand Theory*****2.1.1.1 Teori Keagenan**

Teori ini membahas mengenai korelasi antara agen (entitas yang mengelola perusahaan) dan prinsipal (pemilik) yang telah memiliki suatu perjanjian. Pandangan dalam teori ini mengatakan bahwa terdapat interdependensi kerja antara prinsipal dengan agen dalam bentuk kerja sama. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki keinginan dan motivasi karena kepentingan pribadinya sehingga antara prinsipal dan agen cenderung menimbulkan konflik yang biasanya terjadi oleh sebab terdapat pemisahan antara kepemilikan dengan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Ketika terjadi penguakan laporan antara agen (pihak pengelola perusahaan) dan prinsipal (pemilik), seringkali terjadi perbedaan persepsi antara pihak pengelola dan pihak pemilik. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa informasi asimetris dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pilihan yang merugikan dan bahaya moral. Pilihan yang merugikan merupakan suatu kondisi ketika pemilik perusahaan tidak memahami tentang sebuah tindakan yang dipilih oleh manajer (kelalaian dalam tugas). Sementara bahaya moral merupakan suatu kondisi dimana manajer (agen) melanggar kewajiban yang telah disetujui bersama dalam suatu kontrak kerja.

Implikasi teori keagenan dengan studi kasus yang diteliti yaitu hubungan antara prinsipal dan agen dalam kegiatan keuangan daerah dapat dikatakan sebagai pemindahan tanggung jawab dari prinsipal (pemerintah pusat) kepada agen (pemda) dengan tujuan melaksanakan otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemda memiliki hak untuk menerima relokasi dana oleh pemerintah pusat sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan otonomi daerahnya.

¹¹⁷ 2.1.1.2 Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah salah satu cabang dari teori agensi. Teori ini berakar pada ¹⁴³ psikologi dan sosiologi, serta dirancang untuk menjelaskan situasi di mana manajer bertindak sebagai pengelola yang memprioritaskan kepentingan pemilik (Donalson, 1997). Dalam teori ini, manajer akan berperilaku berdasarkan kepentingan bersama. Apabila terjadi ketidakselarasan antara *steward* (pengelola) dan pemilik, maka *steward* (pengelola) akan cenderung berusaha untuk bekerja sama daripada menentang, karena mereka menganggap bahwa kepentingan bersama dan tindakan mereka harus selaras dengan kepentingan pemilik. *Steward* lebih berfokus pada upaya mencapai tujuan organisasi sebagai pertimbangan rasional (Wahyuni & Ardini, 2018).

Teori *Stewardship* beranggapan bahwa terdapat hubungan erat ¹¹⁹ antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi serta mengoptimalkan aset organisasi melalui kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas dapat berjalan secara optimal. Asumsi utama dari teori ini adalah bahwa manajer akan menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan yang diinginkan oleh pemilik. Akan tetapi, *steward* tetap memiliki kebutuhan hidup (Wahyuni & Ardini,

2018). Keterkaitan teori ini dengan kemandirian keuangan daerah yaitu bahwasanya pemerintah daerah berfungsi sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan segala tugas dan fungsinya secara efektif. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat, pmda berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang baik, pelayanan publik yang memadai, dan kesejahteraan masyarakat yang optimal.

2.1.1.3 Teori *Fiscal Federalism*

Teori ini dikenalkan oleh Friedrich August Hayek pada tahun 1945, Oates pada tahun 1972 dan Musgrave pada tahun 1959. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi menjadi lebih memungkinkan karena pemerintah daerah memiliki keterhubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga menggunakan informasi dengan lebih efisien. Teori federalisme fiskal menekankan pentingnya Desentralisasi Fiskal dalam pembangunan. Hal ini menggambarkan bahwa desentralisasi di tingkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan dan biaya antara pemerintah.

Menurut N & Haryanto (2019), teori federalisme fiskal menjelaskan hubungan antara desentralisasi dengan aspek perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam studi mengenai federalisme fiskal, terdapat dua perspektif teori yang membahas dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu teori tradisional (generasi pertama) dan teori perspektif baru (generasi kedua). Federalisme fiskal mengilustrasikan model normatif di mana pemerintah pusat berfungsi sebagai penafsir bijaksana dari aspirasi masyarakat, memberikan

pedoman dalam peraturan kelembagaan antar pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan arahan pusat, dengan asumsi bahwa arahan tersebut mencerminkan keinginan seluruh rakyat.

Teori *Fiscal Federalism* oleh Musgrave (1959) menggambarkan bahwa pertumbuhan di suatu daerah dapat diraih dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, menimalisir disparitas antara daerah di Indonesia, serta menjamin terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara merata di setiap daerah. Sehingga diharapkan terjadinya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hastuti, 2018). Sama dengan otonomi daerah, desentralisasi fiskal mempunyai tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal.

5 2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Ekonomi klasik mengacu pada teori ekonomi yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19, terutama di Inggris, yang menekankan pentingnya kebebasan pasar dan peran individu dalam menentukan harga serta alokasi sumber daya. Konsep-konsep klasik ini membentuk landasan pemikiran ekonomi modern dan tetap memiliki pengaruh terhadap kebijakan ekonomi saat ini. Menurut Adam Smith dan David Ricardo, ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu kekayaan alam, jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah, serta teknologi. Dalam teori ini, luas tanah dan kekayaan dianggap konstan dan teknologi dianggap tidak berubah. Namun, para ekonomi klasik umumnya lebih

fokus pada pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi (Martadinata, 2022).

³⁸ 2.1.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini telah dikembangkan sejak tahun 1950-an oleh Robert Solow dan Trevor Swan berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik (Arsyad, 2010). Solow dan Swan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung didominasi oleh penawaran faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Pemikiran teori ini merujuk pada teori ekonomi klasik, yang mengemukakan bahwa perekonomian beroperasi pada tingkat kesempatan kerja maksimum dan penggunaan optimal dari faktor-faktor produksi. Seiring pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hal ini bergantung pada perkembangan populasi, modal investasi, dan kemajuan teknologi. Fleksibilitas dalam sistem ekonomi memungkinkan kebebasan modal dan tenaga kerja yang digunakan.

Teori ini menjelaskan bahwa rasio output terhadap kapital, atau rasio modal produksi memiliki pengaruh yang tinggi. Dengan kata lain, untuk mencapai output tertentu, berbagai kombinasi antara penggunaan modal dan tenaga kerja dapat digunakan. Jika jumlah modal yang digunakan meningkat, jumlah tenaga kerja yang diperlukan bisa berkurang. Sebaliknya, jika jumlah modal yang tersedia terbatas, maka penggunaan tenaga kerja akan meningkat (Anisa, 2023).

2.1.1.6 Teori Stiglitz

Stiglitz dalam Martha (2012) mengatakan bahwa *tax ratio* dapat digunakan dalam mengukur besarnya sektor publik. Meningkatnya skala publik awalnya dapat memberi efek positif kepada pertumbuhan ekonomi dan kemudian dapat

berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pada sektor publik yang mana hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave. Namun, jika nilai rasio pajak terlalu tinggi akan menambah beban masyarakat yang mana hal ini tidak selaras dengan tujuan akhir otonomi dan desentralisasi yaitu kesejahteraan masyarakat (Anisa, 2023). Stiglitz juga mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa aspek:

- 1) Efisiensi ekonomi, artinya pemungutan pajak tidak boleh mengganggu struktur perekonomian;
- 2) Kesederhanaan administrasi, berarti proses pemungutan pajak harus mudah diadministrasikan;
- 3) Fleksibilitas, artinya kebijakan pajak dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi;
- 4) Tanggung jawab politik, berarti bahwa pemungutan pajak dan hasilnya mampu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat;
- 5) Keadilan, yaitu pengenaan pajak harus dilakukan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat secara vertikal dan horizontal.

2.1.2 Otonomi Daerah

¹³⁸ Otonomi daerah merupakan wewenang yang diperoleh daerah otonom dalam mengelola, mengurus pemerintahan, serta mengurus kebutuhan masyarakat lokal secara mandiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Halim, 2008: 1). Landasan yuridis yang diterapkan di Indonesia telah diatur ⁹³ dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang sudah disebutkan dalam teks bahwa pengembangan otonomi di provinsi dan kota dilakukan dengan menjunjung tinggi

segala prinsip demokrasi seperti keterlibatan masyarakat, pemerataan, keadilan, serta penghargaan terhadap potensi masing-masing daerah dalam sistem NKRI.

Upaya pemerintah pusat masih menghadapi banyak kendala, sehingga pemerintah pusat terus menyediakan dukungan kepada pemda melalui alokasi dana yang nantinya berguna untuk proses pembangunan dan menjadi bagian dari pendapatan daerah. Implementasi otonomi daerah menjadi penting karena terdapat dinamika dari dalam maupun luar negeri. Kondisi dalam negeri menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan transparansi dan kemandirian melalui desentralisasi. Di sisi lain, kondisi luar negeri menunjukkan peningkatan yang pesat dalam globalisasi, yang menuntut setiap negara untuk meningkatkan daya saingnya (Halim, 2008: 1).

Dalam prinsipnya, suatu daerah harus melaksanakan otonomi dengan bertanggung jawab guna mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu memberdayakan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus mengutamakan aspirasi dan kepentingan ⁶² rakyat. Selain itu, penyelenggaran otonomi daerah harus memastikan adanya keselarasan hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya agar tidak terjadi ketimpangan, serta mampu menjamin keserasian hubungan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, ⁶² memberikan fasilitas berupa kemudahan, bantuan, serta dorongan agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai perundang-undangan (Djaenuri, 2012: 9-12).

2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Menurut Koesoemahatmadja (1978) dalam buku Djaenuri (2012), desentralisasi dalam ketatanegaraan dapat diartikan sebuah ⁷⁷ pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertugas untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (daerah otonom) dan desentralisasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara (Djaenuri, 2012: 3-4). Desentralisasi telah hadir di Indonesia sejak tahun 2001 pasca reformasi tahun 1998. Semula Indonesia menganut pemerintah yang sentralistik, kemudian beralih ke sistem otonomi daerah. Agar tercapai tujuan dari otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan tanggung jawab terkait kekuasaan politik serta manajemen keuangan kepada pemda sesuai kewenangan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal sebenarnya telah dilakukan selama lebih dari dua dasawarsa di Indonesia. Akan tetapi, dalam kenyataannya belum mampu mencapai tingkat optimal sesuai tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena ⁶⁰ sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan pelaksanaan APBD belum tercipta oleh pemda setempat. Untuk mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal demi pemerataan pembangunan, maka perlu terus dilakukannya kebijakan dan formulasi yang sama. Oleh sebab itu, lahirlah landasan yuridis berupa UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Tujuan terciptanya undang-undang tersebut adalah guna menguatkan desentralisasi fiskal yang terbebas dari ketidaksetaraan dalam layanan dan peningkatan kesejahteraan. Undang-undang ini di-desain dengan harapan kapasitas fiskal daerah dapat meningkat, belanja daerah yang berkualitas dapat tercipta, serta terjalinnya koordinasi kebijakan fiskal antara

pempus dan pemda guna meningkatkan kualitas hasil, terbebas dari ketidaksetaraan dalam layanan dan kesejahteraan.

UU HKPD memiliki empat pilar penting, di antaranya adalah: 1) Meminimalisir terjadinya kesenjangan secara horizontal maupun vertikal dengan tujuan mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan; 2) Meningkatkan kekuatan pajak daerah dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi; 3) Meningkatkan belanja daerah yang berkualitas guna lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan; serta 4) Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional. Keempat pilat tersebut diharapkan dapat mempererat desentralisasi fiskal demi kesejahteraan masyarakat tercapai.

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan daerah meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemda yang dapat diukur dengan uang, termasuk berbagai bentuk kekayaan terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Yani, 2004: 229). Kemandirian keuangan daerah mengimplikasikan kemampuan pemda untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dengan memanfaatkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Kemandirian ini dapat dinilai melalui rasio kemandirian yang membandingkan realisasi PAD dengan total pendapatan daerah, termasuk bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman.

Rasio kemandirian mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian, maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal. Rasio kemandirian juga

menggambarkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Nilai rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin besar, yang merupakan komponen utama dari PAD, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2008: 232-233). Adapun perhitungan rasio kemandirian daerah menurut DJPK Kemenkeu yaitu:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio tersebut memperlihatkan sejauh mana pendapatan asli daerah dapat berkontribusi terhadap keseluruhan pendapatan daerahnya. Semakin tingginya rasio kemandirian akan mencerminkan tingginya kontribusi masyarakat dalam menyumbang penerimaan daerahnya yang mana dapat dilihat dari kepatuhannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebab termasuk ke dalam komponen pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian yang tinggi berarti menandakan rendahnya ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Hal tersebut menyatakan bahwa pemda sudah sanggup untuk mengelola sumber pendanaan dari dalam daerahnya dibandingkan dengan pendapatan dari luar daerah.

⁹¹ **Tabel 2.1** Ketentuan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan	Kriteria
0% – 25%	Rendah Sekali
>25% – 50%	Rendah
>50% – 75%	Sedang
>75% – 100%	Tinggi

Sumber: Halim (2007)

¹⁰⁰ Berdasarkan tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan rendah sekali apabila berada di angka 0-25%. Hal tersebut berarti

kontribusi pemerintah daerah terhadap daerahnya lebih sedikit dibanding pemerintah pusat. Jika angka kemandirian berada di rentang >25-50%, maka tingkat kemandiriannya dikatakan rendah. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah pusat mulai meminimalisir intervensinya karena pemda dianggap sudah mulai sanggup dalam melakukan otonomi daerah. Kemudian jika nilai kemandirian berada di antara >50-75% berarti dikatakan sedang. Artinya pemerintah sudah lebih sanggup untuk melakukan otonomi daerah. Sementara nilai >75-100% menandakan bahwa pemda telah sepenuhnya sanggup dan independen ketika menjalankan otonomi daerah serta tidak membutuhkan intervensi pemerintah pusat lagi.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard menyampaikan pandangannya mengenai 4 (empat) pola hubungan dalam menyimpulkan tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- a. Pola instruktif. Ini merupakan pola yang terjadi ketika pemerintah pusat lebih besar partisipasinya dibandingkan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam artian bahwasanya pemerintah daerah tidak sanggup untuk melakukan otonomi daerah secara finansial.
- b. Pola konsultatif. Pola ini terjadi saat intervensi pemerintah pusat mulai berkurang dikarenakan pemerintah daerah sudah mulai sanggup untuk melakukan otonomi daerahnya sendiri. Jika suatu daerah berada di pola ini, maka pemerintah pusat hanya berkontribusi terhadap pemberian konsultasi kepada pemerintah daerah.
- c. Pola partisipatif. Ini bermakna bahwa kewajiban pemerintah pusat dalam pemberian bantuan kepada pemda semakin berkurang dengan anggapan bahwa

pemda tersebut telah otonom dalam mengurus daerahnya sendiri yang ditunjukkan dengan adanya peralihan dari yang sebelumnya pemerintah pusat berkontribusi dalam pemberian konsultasi, sehingga pada pola ini hanya memberikan partisipasi saja.

- d. Pola delegatif. Pola ini muncul ketika benar-benar tidak terkait intervensi dari pemerintah pusat dikarenakan daerah tersebut sepenuhnya telah sanggup melaksanakan otonomi daerahnya.

2.1.5 Output Primer

Sektor primer merupakan bagian dari ekonomi yang murni bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan BPS tahun dasar 2000, sektor primer meliputi perkembangan sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sementara menurut BPS tahun dasar 2010 meliputi perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor primer menjadi sangat penting di negara yang sedang berkembang, tetapi relevansinya cenderung menurun seiring dengan kemajuan menuju ke arah yang lebih baik agar menjadi negara maju.

Sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara, serta fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meratakan distribusi pendapatan daerah, serta dapat menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Julia, et al., 2015).

2.1.6 ¹⁴⁹ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dan ⁴⁶ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian dari dana perimbangan yang alokasinya didasarkan pada realisasi ⁵ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kemudian dibagikan dengan persentase tertentu kepada daerah penghasil, provinsi, serta kabupaten/kota sekitarnya yang mungkin terdampak oleh eksternalitas dari kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, kehutanan dan perikanan. DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu (1) *prinsip by origin*, di mana daerah penghasil penerimaan negara memperoleh bagian yang lebih besar, sementara daerah lain dalam provinsi yang sama mendapatkan bagian berdasarkan prinsip pemerataan, (2) *prinsip by actual*, di mana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan, didasarkan pada realisasi penyetoran ¹⁰ Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah terdiri dari lima jenis, yaitu: 1) DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, 2) DBH Pertambangan ¹⁰ Umum/Mineral dan Batu Bara, 3) DBH Pengusahaan Panas Bumi, 4) DBH Kehutanan dan 5) DBH Perikanan (Pasal 1 angka 15 PP 55 ¹⁰⁰ Tahun 2005). Setiap jenis DBH ini didistribusikan berdasarkan jenis-jenis PNBP dengan persentase pembagian yang bervariasi antara pemerintah pusat dan daerah.

⁴ 2.1.7 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada penda untuk kebutuhan pelaksanaan implementasi dan menciptakan pemerataan kemampuan daerah secara horizontal. Pembagian dana bagi daerah berdasarkan hasil produksi cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan besar kebilnya celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah tersebut yang kemudian dialokasikan dalam bentuk *block grant*.

⁸ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menegaskan formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Daerah dengan potensi fiskal besar namun kebutuhan fiskal kecil akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil, sementara daerah dengan potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskal besar akan menerima alokasi DAU yang lebih besar. Daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi akan mendapatkan DAU lebih besar dibandingkan daerah yang lebih makmur, dan begitu juga sebaliknya. DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggabungkan besaran Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, dengan pembagian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% dan 90% dari total DAU nasional. Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)$$

³³ Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Di samping itu, Celah Fiskal adalah selisih antara

Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal mencakup kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang diukur melalui variabel-variabel seperti: a) Jumlah Penduduk; b) Luas Wilayah, termasuk luas darat dan wilayah perairan; c) Indeks Kemahalan Konstruksi; d) Indeks Pembangunan Manusia; serta e) Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

³⁶ Penghitungan alokasi DAU didasarkan pada data yang sesuai dengan Pasal 41 PP Nomor 55 Tahun 2005, yang mengharuskan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang instansi lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data. Jika data terbatu tidak tersedia, data dasar dari perhitungan DAU tahun sebelumnya akan digunakan.

²⁰ 2.1.8 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada pemda tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Program prioritas ini tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah pada tahun anggaran tersebut. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK dan menetapkannya setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis kemudian mengirimkan ketetapan kegiatan khusus ini kepada Menteri Keuangan. DAK nasional ditetapkan dalam APBN berdasarkan kemampuan APBN, dan proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu: a) Penentuan daerah penerima DAK; dan b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan menghitung alokasi DAK. Daerah penerima DAK harus

memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Besaran alokasi DAK tiap daerah dihitung berdasarkan indeks yang menggunakan kriteria tersebut. ⁴² Kriteria umum dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang diukur dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto dan daerah yang memenuhi kriteria umum memiliki indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Penggunaan DAK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. ¹ DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dan urusan daerah. Jumlah dana DAK yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal, jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit, jumlah pinjaman pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah, ¹ dan jumlah subsidi, seperti persentase pinjaman yang ditanggung pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik melalui utang pemerintah daerah. ¹ Dalam pelaksanaan DAK, jika pelayanan publik dasar dan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas nasional tetapi bukan prioritas daerah, maka mekanisme transfer DAK tanpa dana pendamping (*conditional non-matching grant*) adalah yang terbaik (Shah, 1994). Namun, karena DAK umumnya bertujuan sebagai stimulus, biasanya dibutuhkan dana pendamping meskipun dalam jumlah kecil. DAK dengan dana pendamping dan jumlah yang tidak terbatas (*open-ended matching grant*) cocok untuk mengatasi

ketidakefisienan dalam pembiayaan fasilitas publik yang menimbulkan eksternalitas kepada masyarakat di luar daerah alokasi (Shah, 1994).

2.1.9 *Tax Ratio*

Tax Ratio adalah sebuah ukuran kinerja pendapatan pajak pada suatu negara. Akan tetapi selama ini *tax ratio* dapat berfungsi sebagai indikator yang diasumsikan sebagai penjelasan umum situasi perpajakan suatu negara. Definisi mengenai *tax ratio* di berbagai negara mungkin saja dapat berbeda. Akan tetapi, secara umumnya definisi *tax ratio* merujuk pada IMF (*International Monetary Fund*) atau OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Perbedaannya terletak pada unsur yang dimasukkan sebagai pendapatan pajak (Anisa, 2023).

Berikut formula dalam mengukur *tax ratio* yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Tax Ratio = \frac{Pajak daerah}{PDRB ADHB}$$

Tax ratio merupakan sejumlah nilai pajak daerah yang kemudian dibandingkan dengan ⁸⁰ Produk Domestik Regional Bruto selama periode tertentu. Umumnya, ⁸⁰ data yang digunakan merujuk pada data PDRB atas harga berlaku. Nilai dari *tax ratio* merupakan angka yang menggambarkan persentase yang ditarik sebagai pajak. Tingginya *tax ratio* menunjukkan seberapa besar pajak yang dapat ditarik dari output agregat. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya dalam realisasi pembangunan daerah karena pajak adalah sumber penerimaan dari negara untuk mendanai seluruh biaya, termasuk belanja pengembangan. Pajak juga diperlukan guna membiayai pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas

umum, penyediaan kemanaan, pembiayaan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan pemerintah pusat dan daerah lainnya (Anisa, 2023).

81 2.2 Kajian Empiris

Kajian empiris merupakan kajian yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya sesuai dengan fokus penelitian yang akan diambil. Adapun beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan fokus penelitian ² kemandirian keuangan daerah yaitu:

Tabel 2.2 Kajian Empiris

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Umam, 2017)	¹¹² Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Y : Derajat Kemandirian Fiskal X ₁ : Sektor Primer X ₂ : Sektor Sekunder X ₃ : Sekunder Tersier	Regresi Berganda	X ₁ : + / sig X ₂ : - / ⁴⁸ X ₃ : + / sig
2.	(Verawaty, et al., 2017)	⁶ Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Y : TKKD ⁵ X ₁ : PAD X ₂ : DAU X ₃ : DAK X ₄ : DBH X ₅ : Pendapatan lain-lain yang sah	Regresi Berganda	X ₁ : + / sig X ₂ : - / sig X ₃ : + / tidak sig X ₄ : - / sig X ₅ : - / sig
3.	(Nindita & Rahayu, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Y : TKKD ⁹⁵ X ₁ : PAD X ₂ : DAU X ₃ : Belanja Modal	Panel Data	X ₁ : + / sig X ₂ : - / tidak sig X ₃ : - / sig

		Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa			
4.	(Martini, et al., 2019)	197 ^t <i>Financial Independence of The South Sumatra Regional Government</i>	Y : <i>Regional Financial Independence</i> X ₁ : <i>Regional Wealth</i> X ₂ : <i>Profit Sharing Funds of Natural Resources</i> X ₃ : <i>General Allocation Fund</i>	Panel Data	X ₁ : + / sig X ₂ : - / sig X ₃ : + / sig
5.	14 (Periansya, 2019)	Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Y : KKD X ₁ : Kekayaan Daerah X ₂ : DBH X ₃ : DAU	Regresi Berganda	X ₁ : + / sig X ₂ : - / tidak sig X ₃ : + / sig
6.	(Wirasuyana, 2019)	32 <i>Analysis of Factors that Influence the Independence of Regional Finance in West Nusa Tenggara Province</i>	Y : <i>Regional Financial Independence</i> X ₁ : <i>Per-Capita Regional Revenue</i> X ₂ : <i>Fiscal Balance Funds</i> X ₃ : <i>GRDP</i> X ₄ : <i>Number of Population</i>	Panel Data	48 X ₁ : + / sig X ₂ : - / sig X ₃ : + / tidak sig X ₄ : + / tidak sig
7.	(Oki, 2019)	132 Dampak Otonomi Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT	175 Y : Kapasitas Fiskal X ₁ : PDRB X ₂ : Jumlah Penduduk X ₃ : DAU	Panel Data	X ₁ : + / sig X ₂ : + / tidak sig X ₃ : + / sig
8.	124 (Fatmala, 2020)	Pengaruh Sektor Ekonomi Dominan terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	119 Y : Derajat Kemandirian Fiskal X ₁ : Sektor Pertanian X ₂ : Sektor Konstruksi/Bangunan X ₃ : Sektor Perdagangan,	Panel Data	X ₁ : + / tidak sig X ₂ : + / sig X ₃ : - / sig X ₄ : + / tidak sig

		Hotel dan Restoran			
		X ₄ : Sektor Jasa-Jasa			
9.	(Musfirati & Suryanto, 2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Y : Kemandirian Keuangan X ₁ : DAU X ₂ : DAK X ₃ : DBH X ₄ : Dana Keistimewaan	Panel Data	48 X ₁ : - / sig X ₂ : + / sig X ₃ : - / tidak sig X ₄ : + / sig
10.	(Parapat, et al., 2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Pematangsiantar	Y : TKKD X ₁ : DAU X ₂ : DAK	Regresi Berganda	X ₁ : - / tidak sig X ₂ : - / tidak sig
11.	(Safarina, 2021)	11 faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara	Y : KKD X ₁ : Local Tax Ratio X ₂ : Pendapatan Perkapita X ₃ : Belanja Modal	Panel Data	X ₁ : + / sig X ₂ : + / sig X ₃ : - / tidak sig
12.	(Setiawan, et al., 2021)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016	Y : KKD X ₁ : PAD X ₂ : DAU X ₃ : DAK	Panel Data	X ₁ : + / sig X ₂ : - / tidak sig X ₃ : - / tidak sig
13.	(Adha, 2022)	Model Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi di Indonesia	Y : Kemandirian Fiskal X ₁ : PDRB X ₂ : Investasi X ₃ : Output Primer X ₄ : Output Sekunder X ₅ : Output Tersier	Panel Data	48 X ₁ : + / sig X ₂ : - / tidak sig X ₃ : - / sig X ₄ : - / sig X ₅ : - / sig

14.	(Marselina & Herianti, 2022)	3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah	Y : KKD X ₁ : Belanja Modal X ₂ : Pajak Daerah X ₃ : Dana Alokasi Umum	Panel Data	X ₁ : - / sig X ₂ : + / sig X ₃ : tidak sig
15.	(Marzuki, et al., 2022)	74 Pengaruh Penerapan APBD terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Y : KKD X ₁ : Pajak Daerah X ₂ : Retribusi Daerah X ₃ : DBH X ₄ : DAU X ₅ : DAK	Panel Data	72 X ₁ : + / sig X ₂ : + / tidak sig X ₃ : + / sig X ₄ : - / tidak sig X ₅ : - / sig
16.	(Rahmadani, 2022)	142 <i>Factors Affecting Regional Financial Independence in the Special Region of Yogyakarta</i>	Y : <i>Regional Financial Independence</i> X ₁ : <i>GRDP</i> X ₂ : <i>Capital Expenditure</i> X ₃ : <i>Population</i> X ₄ : <i>Taxes</i>	Panel Data	X ₁ : - / tidak sig X ₂ : + / sig X ₃ : + / sig X ₄ : + / sig
17.	(Siringo, 2022)	55 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Y : TKKD X ₁ : PE X ₂ : PAD X ₃ : DAU X ₄ : DBH	Panel Data	X ₁ : - / sig X ₂ : + / sig X ₃ : - / sig X ₄ : + / tidak sig
18.	(Anisa, 2023)	7 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan Gorontalo)	Y : KKD X ₁ : Belanja Modal X ₂ : <i>Tax Ratio</i> X ₃ : Pertumbuhan Ekonomi X ₄ : IPM	Panel Data	48 X ₁ : + / sig X ₂ : + / sig X ₃ : - / tidak sig X ₄ : + / sig

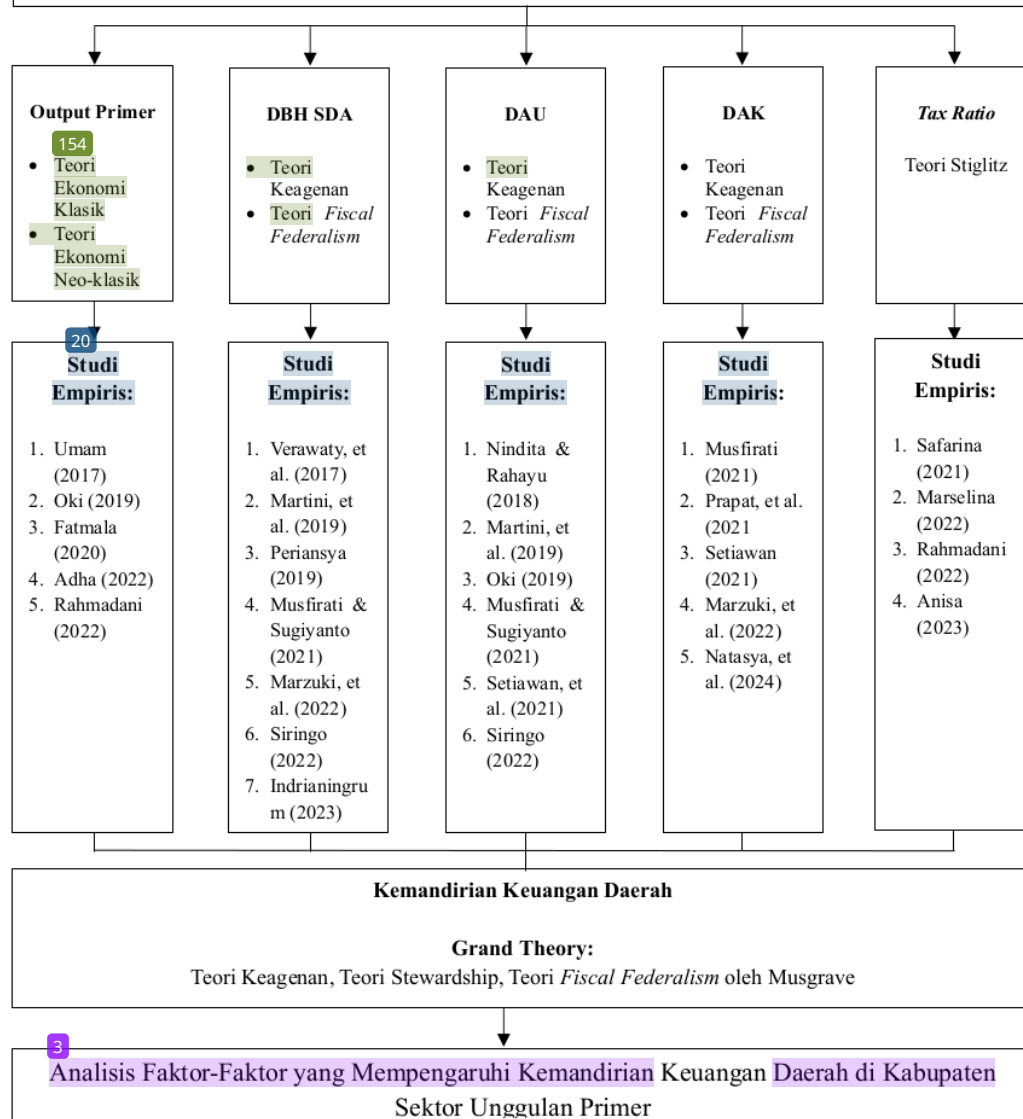
19.	(Indrianingrum, 2023)	65 Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2006-2021	Y : Kemandirian Daerah 95 X ₁ : PAD X ₂ : DAU X ₃ : DAK X ₄ : DBH	Regresi Berganda	X ₁ : + / tidak sig X ₂ : - / sig X ₃ : - / sig X ₄ : - / sig
-----	-----------------------	---	--	------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Reformasi pada tahun 1998 di Rebuplik Indonesia telah berdampak ke semua aspek, tidak terkecuali kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum reformasi, Indonesia mengadopsi sistem pemerintah sentralistik. Setelah reformasi, sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik telah tumbang dan digantikan oleh sistem desentralisasi, yang lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Hal yang menjadi salah satu wujud implementasi otonomi daerah adalah melalui desentralisasi fiskal, yang merupakan unsur penting dari konsep otonomi.

¹⁶ Menurut Halim (2011:253), unsur utama dari suatu daerah yang dapat berhasil mewujudkan otonomi ialah suatu daerah yang memiliki kemampuan dalam menangani dan mengelola keuangan daerahnya serta ketergantungan suatu daerah kepada bantuan pusat yang seminimal mungkin. Hal ini dapat dikatakan bahwa indikator kunci yang menandakan suatu daerah tersebut independen ialah kemandiriannya dalam mengatur keuangan daerah.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman alam yang berlimpah dan sebagai negara yang menerapkan otonomi daerah, diyakini potensi alamnya dapat dijadikan sumber pendapatan bagi daerahnya. Ketergantungan sumber dana eksternal akan membuat tiap-tiap pemerintah daerah menjadi kurang mandiri secara keuangan. Untuk melihat kemampuan pemda dalam mengatur pemerintahannya, dapat dilihat dari saran kemandirian keuangan tiap pemda. Semakin tinggi kemandirian keuangan di suatu daerah, berarti pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan potensi daerahnya menjadi sumber pendapatan serta menjadikan dana bantuan eksternal sebagai alat mencapai kesejahteraan masyarakat.



120
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hubungan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat

2.4.1 Hubungan Output Primer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Output primer merupakan sejumlah hasil yang diperoleh dari suatu proses produksi ekonomi. Output ini disebut juga dengan sektor primer yang mana hasilnya didapatkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor primer hanya bergantung dari kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Sektor ini menjadi bagian terpenting di negara berkembang, akan tetapi tingkat kepentingannya kian menurun yang disebabkan oleh perkembangan menuju negara maju (Adha, 2022). Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh ketersediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi.

Penawaran faktor produksi tersebut merujuk kepada kemampuan serta ketersediaan faktor produksi yang digunakan, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Hal tersebut melibatkan jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Jika penawaran faktor-faktor produksi meningkat, biasanya akan ada lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam produksi, yang dapat mengakibatkan peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika penawaran faktor-faktor produksi menurun, dapat terjadi tekanan pada produksi dan pertumbuhan.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat menjadi pengaruh positif bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat lewat pendapatan yang didapatkan oleh pajak dan penerimaan asli daerah. Hal ini konsisten dengan studi yang pernah

dilakukan oleh (Umam, 2017; Oki, 2019; Adha, 2022) bahwasanya nilai tambah bruto pada sektor perekonomian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan kesejahteraan yang mana hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan otonomi daerah yang dicerminkan dari ⁷² kemandirian keuangan daerahnya.

2.4.2 Hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Bagi Hasil SDA termasuk ke dalam dana perimbangan yang mana tujuannya untuk mendanai segala kegiatan pemda agar tercapai suatu tujuan kesejahteraan masyarakat. Persentase dana bagi hasil SDA disalurkan kepada daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan daerah terkait pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut diharapkan dapat ⁶⁵ memperbaiki keseimbangan vertikal pada pusat bersama dengan mencermati kemandirian keuangan daerah tersebut (Indrianingrum & Priyono, 2023).

DBH SDA sebagai pendapatan yang diperoleh pemda dari pemanfaatan SDA di wilayahnya, seperti hasil pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perikanan, memberikan peran penting terhadap kemandirian suatu daerah. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, pengalokasian dana bagi hasil SDA tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena DBH SDA tersebut jika digunakan dengan bijak dan strategis akan meningkatkan kemandirian daerah oleh sebab pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Menurut Boex (2002:1) menyatakan bahwa pemerintah pusat berfokus pada distribusi dan stabilisasi keuangan, sementara pemda bertugas untuk mengalokasikan sumber keuangan yang didapatkan (Suyanto, 2010). Penelitian yang telah dikaji oleh beberapa

peneliti, seperti (Sanga, ²⁰⁷ et al., 2018; Marzuki et al., 2022; Natasya et al., 2024) ¹¹⁵ mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah.

² 2.4.3 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Adanya desentralisasi fiskal dapat menjadikan suatu daerah semakin mandiri karena kewenangan pada tingkat pusat telah dialihkan kepada pemda sehingga daerah perlu mengalokasikan dana bantuan dari pusat untuk kepentingan masyarakat lokal dan pembangunan infrastruktur publik. Tujuan dari DAU ⁵ adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, serta kesenjangan antara berbagai daerah yang disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya (Kiak & Nuro, 2018). ³⁰ Daerah dengan potensi fiskal tinggi tetapi kebutuhan fiskalnya rendah akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil dari pemerintah pusat, sementara ¹²⁶ daerah dengan potensi fiskal rendah tetapi kebutuhan fiskalnya tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar. Selain itu, daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan menerima DAU yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih makmur (Setiawan, et al., 2021).

Menurut teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), konsep tersebut berfokus pada alokasi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sebuah negara. DAU berperan penting dalam otonomi daerah dan pengelolaan keuangan, karena besaran DAU dan pendistribusiannya dapat berpengaruh pada kemandirian daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pengelolaan potensi daerah masing-masing. ¹¹⁵ Konsep ini

konsisten dengan penelitian yang pernah dikaji oleh (Oki, 2019; Martini, et al., 2019; Periansya, 2019) dimana dana alokasi umum dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara positif.

2.4.4 Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana alokasi khusus merupakan anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai aktivitas khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Program-program yang menjadi prioritas nasional akan tercantum dalam RKP untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Besaran dana ini dihitung berdasarkan indeks yang mempertimbangkan kriteria umum, khusus dan teknis. Penentuan DAK dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang meliputi kesenjangan fiskal, alokasi berdasarkan biaya per unit, pinjaman pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur publik daerah dalam jangka menengah atau jangka panjang, serta subsidi.

Dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda dapat menjadi dana tambahan dalam membiayai segala kegiatan pemerintah dan pembangunan infrastruktur serta layanan publik dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Agar DAK menjadi peningkatan untuk kemandirian daerah, maka perlu dikelola dengan efisien dan digunakan untuk tujuan yang penting dan tepat. Hal ini agar pemda tidak ketergantungan pada bantuan eksternal dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Andriana, 2020; Musfirati & Sugiyanto, 2021; Natasya, et al., 2024)

mengungkapkan ³⁵ bahwa dana alokasi khusus yang disalurkan oleh pemerintah pusat dapat berdampak ⁶³ positif terhadap kenaikan kemandirian keuangan daerah.

2.4.5 Hubungan *Tax Ratio* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam praktik daerah yang otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur segala kegiatan pemerintahannya termasuk membiayai segala kegiatan pemerintahan. Selanjutnya bagaimana pemda dapat mendanai belanja yang semakin membesar. Apakah pemerintah daerah akan terus bergantung pada transfer pusat atau bergantung pada kemampuan daerah itu sendiri (Anisa, 2023). Berkaitan dengan hal tersebut, demi terlaksananya otonomi daerah yang baik ⁹⁷ pemerintah daerah harus dapat meminimalisir ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dengan mengupayakan kemandirian daerahnya.

Pajak merupakan sumber utama dari dalam penerimaan daerah. Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak sangat berarti dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak mempunyai peran yang vital, terutama dalam implementasi pembangunan daerah dikarenakan pajak menjadi ¹⁸⁵ sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk belanja pengembangan. *Tax ratio* merupakan perbandingan realisasi pajak ²⁴ daerah yang diterima dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama. *Tax ratio* menjelaskan kinerja sektor perpajakan dari PDRB yang dapat diterima pemerintah. Tingginya rasio pajak suatu daerah mencerminkan besarnya pendapatan yang diterima oleh daerah dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Huatahean, 2017; Affifah & Rahayu, 2021; Parapat,

¹⁷² et al., 2021; Setiawan, et al., 2021) yang menyatakan bahwa kenaikan *tax ratio* di suatu daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut pula.

⁷ 2.5 Hipotesis Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat beberapa hipotesis sementara yang dapat diuraikan seperti di bawah ini:

- ³ 1. Output primer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
- ⁴⁴ 2. Dana bagi hasil SDA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
- ⁴⁷ 3. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
- ²⁸ 4. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
- ³ 5. *Tax Ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer pada tahun 2018-2022. Kemandirian Keuangan Daerah disini berfungsi sebagai variabel terikat. Sementara itu, variabel bebas yang digunakan yaitu Output Primer, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta *Tax Ratio*. Sampel yang diteliti yaitu sebanyak 700.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Kajian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dan dianalisis dengan metode panel dinamis (GMM). Data penelitian menggunakan data sekunder tahunan dari tahun 2018-2022. Sumber data didapatkan dari situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>).

3.3 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, digunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang diteliti adalah Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan variabel independen meliputi Output Primer, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta *Tax Ratio*.

7
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Simbol	Satuan	Sumber
³⁴ Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian keuangan daerah merupakan kesanggupan pemda dalam mendanai sendiri semua aktivitas pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat menggunakan pendapatan daerah yang dimiliki.	Rasio kemandirian keuangan daerah dengan melihat perbandingan PAD dan total pendapatan daerah di Kabupaten tahun 2018 – 2022.	KKD	Persen	DJPK
Output Primer (X ₁)	Sektor ekonomi yang hanya berpangku pada kekayaan sumber daya alam secara alami. Sektor primer meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian.	Laju Output ¹³ mer sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian di Kabupaten tahun 2018 – 2022.	OP	Miliar Rupiah	BPS
DBH SDA (X ₂)	Anggaran yang didapat dari PNPB dan diberikan kepada masing-masing daerah menurut angka tertentu guna membiayai segala keperluan daerah.	Nilai DBH Sumber Daya Alam di Kabupaten tahun 2018 – 2022.	DBHSDA	Juta Rupiah	DJPK
² Dana Alokasi Umum (X ₃)	Anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada pemda untuk kebutuhan pelaksanaan implementasi dan menciptakan pemerataan kemampuan daerah secara horizontal.	Nilai DAU di Kabupaten tahun 2018 – 2022.	DAU	Juta Rupiah	DJPK
¹⁹⁴ Dana Alokasi Khusus (X ₄)	Anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada	Nilai DAK di Kabupaten	DAK	Juta Rupiah	DJPK

	pemda tertentu guna membantu pendanaan kegiatan khusus berdasarkan prioritas nasional.		tahun 2018 – 2022.			
<i>Tax Ratio</i> (X_5)	<i>Tax ratio</i>	Perbandingan pajak daerah dengan PDRB ADHB selama periode tertentu.	TR	Persen	DJPK dan BPS	

11 3.4 Model Penelitian dan Teknik Analisis Data

3.4.1 Model Penelitian

101 Penelitian ini menerapkan model analisis data panel dinamis, di mana data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan unit observasi (*cross-section*) sehingga data panel mengintegrasikan dimensi ruang dan waktu (Gujarati & Porter, 2015). 19 Dalam penelitian ini, metode analisis data panel menerapkan analisis regresi data panel dinamis yang mana penggunaan panel dinamis ini disebabkan oleh banyaknya korelasi ekonomi yang dinamis. 21 Hubungan dinamis ini ditandai dengan keberadaan variabel *lag* dari variabel dependen yang berfungsi sebagai variabel independen sehingga menyebabkan munculnya masalah endogenitas. Penggunaan data panel statis kurang cocok untuk penelitian ini karena hasil prediksi cenderung bias dan tidak konsisten. Akan tetapi, masalah ini dapat diatasi melalui penggunaan model GMM (Ginanjar, et al., 2020).

9 Peneliti menggunakan metode *Generalized Method of Moment* (GMM), dimana metode tersebut merupakan metode yang paling lazim digunakan untuk mengukur parameter dalam model statistik yang dilakukan dalam kondisi yang

bergantung pada parameter model dan data yang digunakan. Estimasi GMM memungkinkan terjadinya hubungan teoritis yang harus dipenuhi oleh parameter dan hubungan teoritis, sementara estimasi sampel yang dipilih untuk meminimalkan jarak antara nilai teoritis dan nilai aktual (Arellano & Bond, 1991).

Persamaan ²³ model data panel dinamis dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta Y_{i,t-1} + \gamma X_{i,t-1} + \eta_i + \varepsilon_{i,t} \quad (3.1)$$

Sumber: (Guru & Yadav, 2019)

Keterangan:

- Y : Variabel terikat
- X : Singkatan dari vector variabel eksplanatori
- α : Intersep
- β, γ : Vektor koefisien variabel prediksi
- η : Waktu efek tetap
- ε : *Error term*
- i : Banyaknya individu
- t : Banyaknya waktu

Berdasarkan model persamaan (3.1), variabel $Y_{i,t-1}$ merupakan fungsi dari $\varepsilon_{i,t}$, sehingga terjadilah hubungan antara variabel regressor $Y_{i,t-1}$ dengan kesalahan $\varepsilon_{i,t}$ yang menyebabkan perkiraan ¹⁶⁴ *Pooled Least Square (PLS)* akan menjadi bias dan tidak konsisten. Kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah endogenitas yang menyebabkan estimasi yang diperoleh melalui metode *fixed effect* atau *random effect* menjadi bias dan tidak konsisten (Baltagi, 2005). Oleh sebab itu, Arellano &

Bond (1991) menyarankan metode data panel GMM. Berdasarkan metode yang diusulkan oleh Arellano & Bond, model yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{i,t} - Y_{i,t-1} = \beta(Y_{i,t-1} - Y_{i,t-2}) + \gamma(X_{i,t} - X_{i,t-1}) + (\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1}) \quad (3.2)$$

Sumber: (Guru & Yadav, 2019)

Pada persamaan 3.2 di atas, *first-differencing* dapat membantu menghilangkan intersep dan individu efek tetap (η_i). Akan tetapi, estimasi persamaan dapat menimbulkan bias dan tidak konsisten, sebagai *lag* variabel terikat ($Y_{i,t-1} - Y_{i,t-2}$) dan kesalahan ($\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1}$) akan dihubungkan. Kemudian, variabel penjelas yang dipilih dapat bersifat endogen seperti yang telah dijelaskan di atas. Maka dari itu, akan terdapat pemberlakuan pembatasan momen yang bisa mengesampingkan kemungkinan endogenitas pada model (Arellano & Bond, 1991). Model persamaan regresi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} KKD_{i,t} - KKD_{i,t-1} = & \beta(KKD_{i,t-1} - KKD_{i,t-2}) + \gamma(\ln OP_{i,t} - \ln OP_{i,t-1}) + \\ & \gamma(\ln DBHSDA_{i,t} - \ln DBHSDA_{i,t-1}) + \gamma(\ln DAU_{i,t} - \\ & \ln DAU_{i,t-1}) + \gamma(\ln DAK_{i,t} - \ln DAK_{i,t-1}) + \gamma(TR_{i,t} - \\ & TR_{i,t-1}) + (\varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1}) \end{aligned} \quad (3.3)$$

Keterangan:

$KKD_{i,t}$: Kemandirian Keuangan Daerah (Persen)

$KKD_{i,t-1}$: Kemandirian Keuangan Daerah tahun sebelumnya (Persen)

$\ln OP_{i,t}$: Logaritma natural dari Output Primer (Persen)

$\ln DBHSDA_{i,t}$: Logaritma natural dari DBH SDA (Persen)

$\ln DAU_{i,t}$: Logaritma natural dari DAU (Persen)
$\ln DAK_{i,t}$: Logaritma natural dari DAK (Persen)
$TR_{i,t}$: <i>Tax Ratio</i> (Persen)
β, γ	: Vektor koefisien dari variabel prediksi
ε	: <i>error term</i>
i	: 140 Kabupaten di Indonesia (wilayah)
t	: 2018-2022 (waktu)

Pendekatan ³⁷ *Generalized Method of Moment* (GMM) sendiri mencakup dua metode yang lazim digunakan, yaitu ⁹ *First-difference* GMM (FD-GMM) dan *System* GMM (SYS-GMM). Penelitian ini menggunakan metode statistika GMM dikarenakan model ini memiliki keunggulan seperti dapat mengatasi permasalahan dinamika kemandirian keuangan daerah serta dapat memecahkan permasalahan endogenitas yang ada. Peneliti menggunakan prosedur dua langkah (*two-step*) dari teknik GMM dengan standar error yang erat guna memastikan masalah heteroskedastisitas (Arellano & Bond, 1991).

3.4.2 Pendekatan Model

Arellano & Bond (1991) berpendapat bahwa terdapat dua pendekatan model yang dapat diterapkan untuk mengestimasi data panel dinamis, yaitu pendekatan ⁹ *First-differences* GMM (FD-GMM) dan *System* GMM (SYS-GMM).

3.4.2.1 *First-differences* *Generalized Method of Moment* (FD-GMM)

Model ²²⁶ *First-differences* GMM (FD-GMM) bertujuan agar model estimasi konsisten, valid, serta terbebas dari adanya bias sehingga tidak terjadi hubungan

antara variabel bebas dan kesalahan (*error term*). Tujuan model ini agar efek individu u_i dapat dihilangkan yang disebabkan adanya hubungan antara *lag* variabel endogen penjelas dengan kesalahan (Arellano & Bond, 1991).

14 3.4.2.2 System Generalized Method of Moment (SYS-GMM)

Blundell & Bond (1998) berpendapat bahwa model ini adalah model yang dapat mengatasi permasalahan *weak instrument* yang terjadi pada estimasi FD-GMM. Ia juga mengkorelasikan antara bias dan ketepatan estimator FD-GMM yang kurang baik dengan adanya instrumen yang lemah, yang dapat terlihat dari konsentrasi parameternya. Selain itu, pengaturan stasioneritas yang lebih ringan pada tahap awal proses memungkinkan perluasan 25 penggunaan estimator SYS-GMM dengan memanfaatkan variasi *lag* dari y_{it} sebagai instrumen untuk persamaan dalam FD-GMM. Menurut (Baltagi, 2005) SYS-GMM estimator dapat membuktikan adanya peningkatan efisiensi dibandingkan dengan FD-GMM dikarenakan adanya peningkatan $\delta \rightarrow 1$ dan $(\sigma_{\mu}^2 / \sigma_{\epsilon}^2)$.

3.4.3 Uji Spesifikasi Model

Setelah mengetahui jenis-jenis model data panel dinamis, maka langkah selanjutnya yaitu menguji masing-masing model tersebut agar didapatkan kesimpulan apakah model terbaik adalah FD-GMM atau SYS-GMM. Teknik estimasi regresi ini terdiri dari *one-step* dan *two-step*. Penelitian ini mendapatkan teknik *two-step* sebagai teknik terbaik karena lebih efisien serta memiliki kesalahan standar yang *robust* terhadap heteroskedastisitas dan autokorelasi (Roodman, 2009). Hal pertama yang dilakukan saat ingin mengestimasi adalah menentukan

metode terbaik dari FD-GMM dan SYS-GMM yang kemudian akan dilakukan uji validitas instrumen, uji konsistensi dan uji ketidakhiasan agar model yang valid, konsisten, serta tidak bias dapat ditentukan.

3.4.3.1 Uji Validitas Instrumen (Sargan)

Uji Sargan ini digunakan untuk memeriksa validitas seluruh variabel instrumen, dengan syarat bahwa jumlah instrumen harus lebih banyak daripada parameter yang diestimasi dengan asumsi bahwa instrumen valid (tidak ada korelasi antara variabel instrumen dengan kesalahan). Uji Sargan juga berguna untuk memeriksa homoskedastisitas dari residu estimasi GMM (Arellano & Bond, 1991).

Hipotesis statistik dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_0 : Estimasi model valid

H_1 : Estimasi model tidak valid

Kriteria pengujian:

- a. Ketika nilai Prob Chi2 pada tabel *sargan test of overidentifying restrictions* > α (0,05) maka tidak tolak H_0 yang berarti estimasi pada model valid atau tidak ada korelasi antara variabel instrumen dengan kesalahan.
- b. Ketika nilai Prob Chi2 pada tabel *sargan test of overidentifying restrictions* < α (0,05) maka tidak tolak H_1 yang berarti estimasi pada model tidak valid atau terdapat korelasi antara variabel instrumen dengan kesalahan.

3.4.3.2 Uji Konsistensi (Arellano Bond)

Menurut (Arellano & Bond, 1991) uji ini berfungsi untuk memastikan bahwa error term tidak menunjukkan hubungan serial pada AR(2) sehingga estimasi dapat dianggap konsisten dengan dugaan tidak adanya autokorelasi. Uji Arellano ini

sendiri digunakan untuk hubungan serial komponen order ke-1 dan ke-2 pada tingkat *first-difference*. Hipotesis statistik dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi

H_1 : Terdapat autokorelasi

Kriteria pengujian:

- Ketika nilai Prob pada Order ke-1 $< \alpha$ (0,05) serta nilai Prob pada Order ke-2 $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- Ketika nilai Prob pada Order ke-1 $> \alpha$ (0,05) serta nilai Prob pada Order ke-2 $< \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_1 yang berarti terdapat autokorelasi.

3.4.3.3 Uji Ketidakbiasan

Uji ketidakbiasan digunakan untuk menilai apakah estimasi yang dihasilkan bersifat bias atau tidak. Penggunaan metode *Ordinary Least Square* (OLS) secara tunggal dalam regresi panel dinamis dapat menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten oleh karena adanya korelasi antara lag dependen dan kesalahan. Kriteria untuk menilai ketidakbiasan didasarkan pada perbandingan antara estimator lag dependen GMM dengan FEM yang cenderung *biased downward* serta PLS (*Pooled Least Square*) yang cenderung *biased upwards*. Estimasi yang tidak bias dapat dilihat dengan nilai koefisien FD-GMM atau SYS-GMM yang berada di antara FEM dan PLS.

3.4.4 Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik adalah sebuah dugaan awal tentang karakteristik suatu populasi yang belum memiliki bukti kuat untuk mendukung kebenarannya. Ada dua

jenis hipotesis, yaitu hipotesis statistik nol (H_0) dan hipotesis statistik alternatif (H_1). Dalam membuat keputusan yang akan diambil, peneliti perlu menguji hipotesis dengan mempertimbangkan nilai probabilitasnya (Gujarati & Porter, 2015).

a. Pengaruh ²³ *lag* Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

$H_0 : \beta_1 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

b. Pengaruh Output Primer ³⁴ (X_2) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

$H_0 : \beta_2 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan output primer terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_2 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan output primer terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

c. Pengaruh ⁶ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (X_3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

$H_0 : \beta_3 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_3 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

- 2
d. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_4) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

$H_0 : \beta_4 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_4 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

- e. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_5) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

$H_0 : \beta_5 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_5 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

- f. Pengaruh *Tax Ratio* (X_6) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

$H_0 : \beta_6 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_6 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis statistik yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika nilai probabilitas $< \alpha (0,05)$ maka tidak tolak H_1 , berarti variabel output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan *tax ratio* berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.
- b. Ketika nilai probabilitas $> \alpha (0,05)$ maka tidak tolak H_0 , berarti variabel output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan *tax ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Tujuan dari gambaran umum ini adalah untuk memahami penggunaan variabel instrumen dalam penelitian. Variabel yang digunakan mencakup variabel dependen dan independen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah kemandirian keuangan daerah. Sementara variabel independennya yaitu output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta *tax ratio*. Data ini berupa berfokus pada 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer.

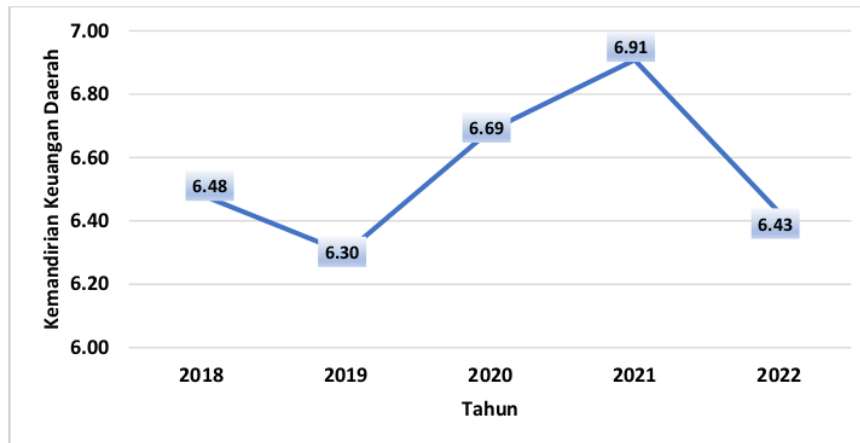
4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pemda mampu mengelola dan mengatur kegiatan pemerintahannya secara mandiri. Tingkat kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ketergantungan pemda terhadap dana bantuan eksternal dari pemerintah pusat semakin menurun.

Meskipun telah lebih dari dua dekade otonomi daerah diterapkan, tetapi penerapannya masih belum optimal dalam tingkat Kabupaten/Kota. Sehingga pemerintah pusat terus mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab daerahnya masing-masing dengan melihat

pergerakan indikator kemandirian daerah. Berikut adalah perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah dari tahun 2018 hingga 2022:



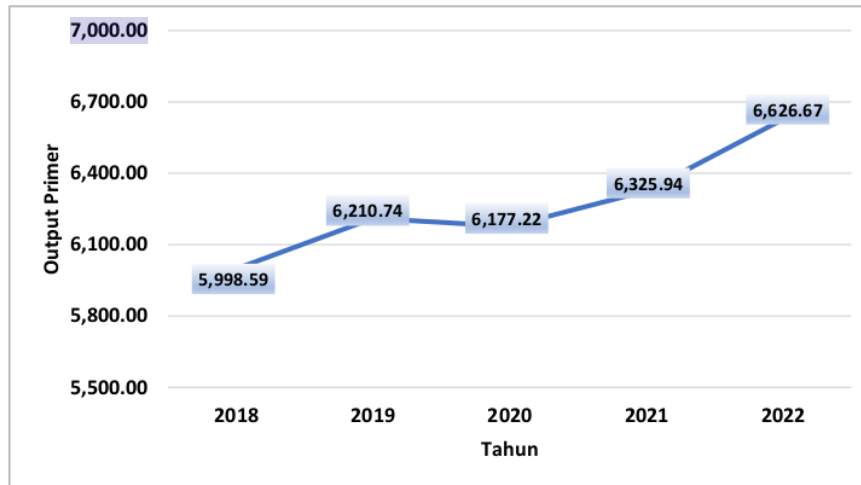
Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia (Persen)

Pada Gambar 4.1 menggambarkan perkembangan rata-rata kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018-2022. Kabupaten terpilih adalah Kabupaten yang memiliki kategori sektor unggulan primer yang mana basis perekonomiannya pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian. Jika dilihat melalui rata-rata 140 Kabupaten dapat disimpulkan bahwa tren tingkat kemandirian daerah bersifat fluktuatif, namun tidak begitu signifikan karena selama 5 tahun terakhir masih berada di angka 6 persen. Terdapat penurunan dari tahun 2018 ke 2019 yang semula 6,48 persen menjadi 6,30 persen. Akan tetapi mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut sehingga pada tahun 2020 berada di angka 6,69 persen dan 6,91 persen pada tahun 2021. Namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 6,43 persen.

4.2.2 Perkembangan Output Primer

Output primer merupakan sejumlah hasil yang diperoleh dari suatu proses produksi ekonomi. Output ini disebut juga dengan sektor primer yang mana hasilnya didapatkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor primer hanya bergantung dari kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Sektor ini menjadi bagian terpenting di negara berkembang, akan tetapi tingkat kepentingannya kian menurun yang disebabkan oleh perkembangan menuju negara maju (Adha, 2022). Daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah cenderung memiliki nilai output primer yang tinggi. Jika pemerintah daerah mampu menggali potensi kekayaan daerahnya, maka pemda pun akan mandiri secara keuangan karena potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerahnya. Adapun perkembangan rata-rata output primer pada Kabupaten dengan sektor unggulan primer selama 5 tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten, Indonesia (diolah) 2024

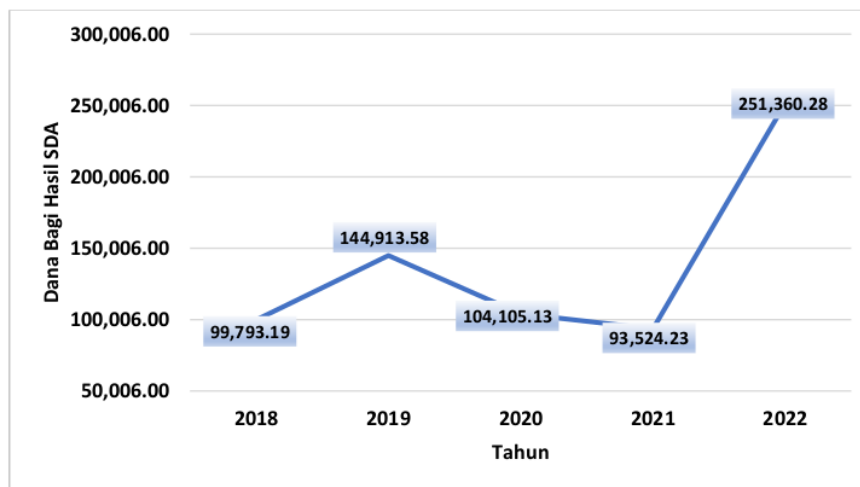
Gambar 4.2 Perkembangan Output Primer di 140 Kabupaten di Indonesia (Miliar Rupiah)

Gambar 4.2 di atas menunjukkan perkembangan rata-rata output primer pada 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018 – 2022. Tren output primer menunjukkan hasil yang cenderung naik setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 justru mengalami penurunan. Nilai output primer pada tahun 2018 sebesar Rp5.998,59 miliar mengalami kenaikan hingga tahun 2019 sebesar Rp6.210,74 miliar dan mengalami penurunan sebesar Rp6.177,22 miliar pada tahun 2020. Kemudian output primer kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.325,94 miliar dan Rp6.626,67 miliar.

4.2.3 Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil SDA termasuk ke dalam dana perimbangan yang mana tujuannya untuk mendanai segala kegiatan pemda agar tercapai suatu tujuan kesejahteraan masyarakat. Persentase dana bagi hasil SDA disalurkan kepada daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan daerah terkait pelaksanaan

desentralisasi. Dana tersebut diharapkan dapat ⁶⁵ memperbaiki keseimbangan vertikal pada pusat bersama dengan mencermati kemandirian keuangan daerah tersebut (Indrianingrum & Priyono, 2023). DBH SDA sebagai pendapatan yang diperoleh pemda dari pemanfaatan SDA di wilayahnya, seperti hasil pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perikanan, memberikan peran penting terhadap kemandirian suatu daerah. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, pengalokasian dana bagi hasil SDA tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena DBH SDA tersebut jika digunakan dengan bijak dan strategis akan meningkatkan kemandirian daerah oleh sebab pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

¹¹⁶ **Gambar 4.3** Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

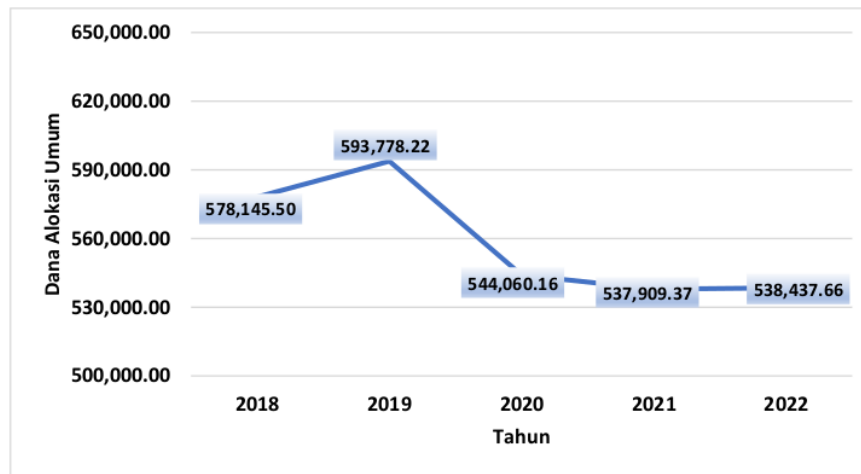
Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, ditunjukkan hasil perkembangan rata-rata DBH SDA pada 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018-2022. ⁴² Dana bagi hasil SDA yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemda pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp99.793,19 juta dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi ²⁰⁴

Rp144.913,58 juta. Namun, pada tahun 2020 pemerintah mengurangi dana bagi hasil SDA menjadi Rp104.105,13 juta. Akan tetapi terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 sampai tahun 2022 yaitu sebesar Rp93.524,23 juta dan Rp251.360,28 juta.

4.2.4 ⁴ Perkembangan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada pemda untuk kebutuhan pelaksanaan implementasi dan menciptakan pemerataan kemampuan daerah secara horizontal. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan ¹⁰² besar kecilnya celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan dan potensi daerah yang kemudian dialokasikan dalam bentuk *block grant*. ⁶⁶ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah mengatur kembali formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU.

⁸ Alokasi DAU untuk daerah dengan potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah dengan potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan menerima alokasi DAU yang lebih besar. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan memperoleh DAU yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih kaya, dan sebaliknya. DAU dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula yang mencakup Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, dengan pembagian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% dan 90% dari total DAU nasional. Adapun perkembangan dana alokasi umum pada 140 Kabupaten di Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.4 Perkembangan Dana Alokasi Umum di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

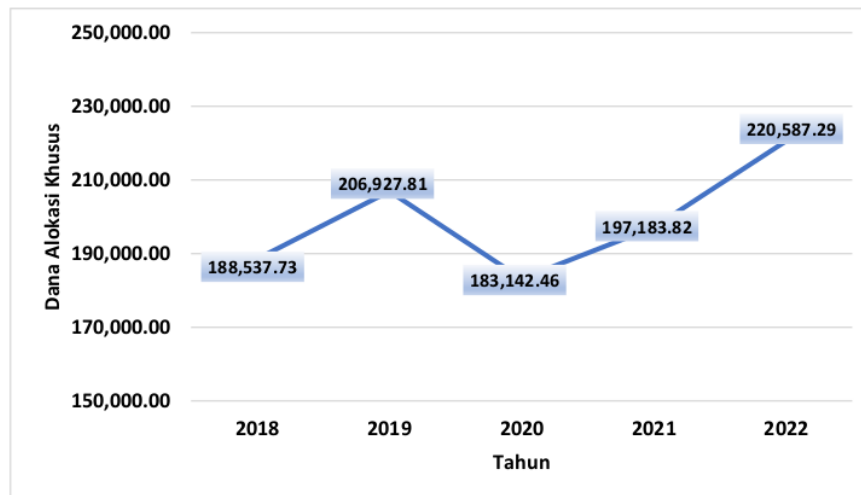
Gambar 4.4 menggambarkan perkembangan rata-rata dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada pemda di 140 Kabupaten di Indonesia tahun 2018 – 2022. Dana alokasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp578.145,50 juta dan kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp593.778,22 juta. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga 2021 dan kembali terjadi peningkatan di tahun 2022 dengan besaran alokasi yaitu Rp538.437,66 juta.

4.2.5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus yang sejalan dengan prioritas nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah pada tahun anggaran tersebut. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan dibiayai oleh DAK dan penetapannya dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,

dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Penentuan daerah yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, khusus, dan teknis. Penggunaan DAK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab daerah. Besaran dana DAK yang diberikan pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui berbagai mekanisme, seperti kesenjangan fiskal (*deficit grant*), alokasi berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau panjang (*capitalization grant*), serta subsidi, misalnya persentase pinjaman yang ditanggung pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik melalui utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*subsidised loan*).



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

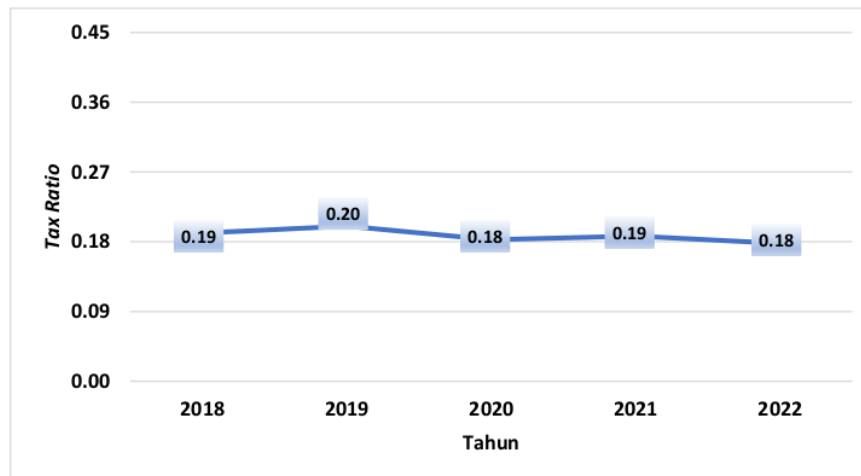
4

Gambar 4.5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Pada Gambar 4.5 di atas menunjukkan rata-rata dana aloksi khusus setiap tahunnya dari tahun 2018–2022 di 140 kabupaten. DAK pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp206.927,81 juta dari yang semula Rp188.537,73 juta pada tahun 2018. Akan tetapi terjadi penurunan dana alokasi pada tahun 2020 sebesar Rp183.142,46 juta. Alokasi khusus dari pemerintah pusat terus mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp197.183,82 juta dan Rp220.587,29 juta pada tahun 2022.

4.2.6 Perkembangan *Tax Ratio*

Tax ratio merupakan sejumlah nilai pajak daerah yang kemudian dibandingkan dengan ⁸⁰ Produk Domestik Regional Bruto selama periode tertentu. Umumnya, ⁸⁰ data yang digunakan merujuk pada data PDRB atas harga berlaku. Nilai dari *tax ratio* merupakan angka yang menggambarkan persentase yang ditarik sebagai pajak. Tingginya *tax ratio* menunjukkan seberapa besar pajak yang dapat ditarik dari output agregat. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya dalam realisasi pembangunan daerah karena pajak adalah sumber penerimaan dari negara untuk mendanai seluruh biaya, termasuk belanja pengembangan. Pajak juga diperlukan guna membiayai pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, penyediaan kemanaan, pembiayaan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan pemerintah pusat dan daerah lainnya.



Sumber: BPS dan DJPK Kemenkeu (diolah) 2024

Gambar 4.6 Perkembangan Tax Ratio di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan rata-rata *tax ratio* selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup fluktuatif namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 0,19 persen menjadi 0,20 persen. Kemudian kembali terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,18 persen. Akan tetapi *tax ratio* kembali meningkat menjadi 0,19 persen dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 0,18 persen.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Estimasi Model *Generalized Method of Moment*

Penelitian ini menggunakan data panel dengan runtun waktu dari tahun 2018-2022 dengan observasi di 140 Kabupaten Sektor Unggulan Primer di Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh dari variabel output

primer, ²⁷ dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten Indonesia dengan sektor unggulan primer.

Pada tahap pengujian hipotesis, estimasi dilakukan ¹⁴ dalam model regresi data panel dinamis melalui pendekatan *first-difference* GMM dari penduga dua langkah (*two step*) dan *system* GMM dari penduga dua langkah (*two step*). Berikut adalah besaran nilai intersep dan koefisien regresi ¹¹¹ masing-masing variabel independen dengan menggunakan pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM.

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Pendekatan FD-GMM

Kemandirian Keuangan Daerah ¹⁶⁹				
Variabel	Koefisien	Std. Error	z	P-value
L1.KKD	0.1551797	0.1857116	0.84	0.403
lnOP	0.2730803	0.3306552	0.83	0.409
lnDBHSDA	-0.4186265	0.152264	-2.75	0.006
lnDAU	-5.135461	0.9928588	-5.17	0.000
lnDAK	-0.6299057	0.4456856	-1.41	0.158
TR	7.175357	1.304252	5.5	0.000
_cons	81.63787	12.46853	6.55	0.000

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.1 dari pendekatan FD-GMM untuk variabel dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ²⁴ kemandirian keuangan daerah, sementara variabel *tax ratio* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel ⁷⁶ *lag* kemandirian keuangan daerah, output primer dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Pendekatan SYS-GMM

Kemandirian Keuangan Daerah				
Variabel	Koefisien	Std. Error	z	P-value
L1.KKD	0.5340715	0.1272203	4.20	0.000
lnOP	1.347092	0.6000129	2.25	0.025
lnDBHSDA	-0.5988536	0.1615019	-3.71	0.000
lnDAU	-4.939938	1.104383	-4.47	0.000
lnDAK	-0.9483406	0.4848271	-1.96	0.050
TR	9.061156	1.074011	8.44	0.000
_cons	73.17186	14.45784	5.06	0.000

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.2 dari pendekatan SYS-GMM untuk variabel dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel lag kemandirian keuangan daerah, output primer dan tax ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.3.2 Hasil Uji Spesifikasi Regresi

Pengujian ini bertujuan guna memilih model estimasi regresi data panel dinamis yang terbaik untuk penelitian ini. Model estimasi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan first-differences generalized method of moments (FD-GMM) dan pendekatan system generalized method of moment (SYS-GMM). Uji spesifikasi model dilakukan dengan melalui pengujian pada dua model yang nantinya akan dipilih yang paling baik antara FD-GMM dan SYS-GMM dengan melakukan uji sargan terlebih dahulu guna melihat valid atau tidaknya instrumen yang diuji, kemudian melakukan uji Arellano-Bond untuk memastikan bahwa

model yang diestimasi bersifat konsisten. Kemudian melakukan uji ketidakhiasan guna melihat apakah estimasi yang dihasilkan bersifat bias atau tidak. Kesimpulan akhir yang diperoleh adalah ketika sudah terpilih model terbaik dari dua pendekatan yang memiliki estimator tidak bias serta instrumen yang terpilih terbukti valid dan konsisten.

4.3.2.1 Uji Sargan (Validitas Instrumen)

Pengujian Sargan berfungsi untuk memeriksa validitas variabel instrumen dalam suatu model. Selain itu, pengujian ini juga dapat digunakan untuk menilai homoskedastisitas dari data residual estimasi GMM. Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam pengujian ini adalah ketika nilai Prob chi2 > α (0,05) maka tidak tolak H_0 , berarti estimasi model memang valid atau variabel instrumen tidak memiliki keterkaitan dengan *error*. Sebaliknya, ketika nilai Prob chi2 < α (0,05) maka tidak tolak H_1 yang berarti bahwa estimasi model tersebut tidak valid atau variabel instrumen memiliki keterkaitan dengan *error*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Sargan Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM

Sargan test of overidentifying restrictions		
H0: Overidentifying restrictions are valid		
	Dependent Variabel = KKD	
	First Difference GMM	System GMM
Nilai Statistik	4.874225	13.70987
P-value	0.4314	0.0896

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil Uji Sargan dengan pendekatan FD-GMM menunjukkan bahwa nilai Prob chi2 (0,4314) > α (0,05) yang berarti bahwa model tersebut valid atau variabel instrumen tidak memiliki korelasi dengan *error*. Sementara untuk pendekatan SYS-GMM menunjukkan bahwa nilai Prob chi2

(0,0896) > α (0,05) yang artinya model valid atau variabel instrumen tidak memiliki korelasi dengan *error*.

4.3.2.2 Uji Arellano-Bond (Konsistensi)

Uji Arellano-Bond berguna untuk memastikan bahwa *error term* tidak memiliki hubungan serial pada AR(1) dan AR(2). Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa estimasi yang dihasilkan konsisten dengan hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya autokorelasi. Keputusan pada uji ini dapat dilihat pada tabel Arellano-Bond *test for zero autocorrelation in first-differenced errors*. Jika nilai Prob pada AR(1) < α (0,05) dan pada AR(2) > α (0,05) maka tidak tolak H_0 yang berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai Prob pada AR(1) > α (0,05) dan pada AR(2) < α (0,05) maka tidak tolak H_1 , yang berarti ada autokorelasi dalam penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Uji Arellano-Bond Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM

Dependent Variabel = KKD				
Order	FD-GMM		SYS-GMM	
	Nilai Statistik AB-Test	P-value	Nilai Statistik AB-Test	P-value
1	-2.3362	0.0195	-4.4547	0.0000
2	-0.72071	0.4711	0.05162	0.9588

Sumber: Output STATA

Tabel 4.4 menunjukkan hasil Uji Arellano-Bond melalui dua pendekatan. Pada pendekatan FD-GMM diketahui bahwa nilai uji signifikansi AR(1) sebesar 0,0195 serta nilai uji signifikansi AR(2) sebesar 0,4711, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan FD-GMM pada penelitian ini memiliki sifat konsisten. Sementara itu, pendekatan SYS-GMM menunjukkan bahwa nilai uji signifikansi AR(1) yaitu sebesar 0,0000 serta nilai uji signifikansi AR(2) sebesar 0,9588, maka

keputusan yang dapat diambil adalah model ini memiliki sifat konsisten karena hasilnya tidak signifikan. Setelah melihat hasil dari kedua pendekatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model FD-GMM dan SYS-GMM konsisten dan tidak terjadi autokorelasi pada kedua model tersebut.

4.3.2.3 Uji Ketidakbiasan

Uji ini berguna untuk menilai apakah estimasi yang dihasilkan bersifat bias atau tidak. Ketidakbiasan ditentukan melalui perbandingan estimator lag dependen GMM dengan FEM yang cenderung *biased downward* dan PLS (*Pooled Least Square*) yang biasanya *biased upwards*. Estimasi yang tidak bias dapat dilihat dengan nilai koefisien FD-GMM atau SYS-GMM yang berada di antara FEM dan PLS.

Tabel 4.5 Hasil Uji Ketidakbiasan Model Fixed Effect Model, FD-GMM, SYS-GMM, dan Pooled Least Square

Variabel	FEM	FDGMM	SYSGMM	PLS
L1.KKD	0.17325869	0.15517965	0.53407148	0.69513482
lnOP	0.40135234	0.27308032	1.3470919	0.75382639
lnDBHSDA	-0.40352388	-0.41862646	-0.59885365	-0.16793635
lnDAU	-5.9656459	-5.1354611	-4.9399378	0.48858092
lnDAK	-0.37082055	-0.62990569	-0.94834056	-0.24044572
TR	7.482826	7.175357	9.0611559	4.8713616
_cons	88.097368	81.637869	73.17186	-6.8512607
N	560	420	560	560
r2	0.20819408			0.80318782
r2_a	-0.06912925			0.80105242

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari lag variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah pada model FD-GMM sebesar (0.15517965) < FEM (0.17325869) < PLS (0.69513482) yang berarti bahwa pendekatan FD-GMM pada penelitian ini tidak lolos uji ketidakbiasan atau

estimator yang dihasilkan pada pendekatan tersebut bersifat bias. Sementara nilai koefisien dari *lag* variabel dependen pada model FEM (0.17325869) < SYS-GMM (0.53407148) < PLS (0.69513482) yang berarti bahwa estimator yang dihasilkan tidak bersifat bias. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah SYS-GMM karena instrument yang digunakan valid, konsisten, serta tidak bias.

⁵⁴ 4.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel Dinamis

Hasil uji spesifikasi model regresi pada data panel dinamis menunjukkan bahwa pendekatan SYS-GMM telah memenuhi kriteria spesifikasi model. Oleh sebab itu, model SYS-GMM lebih tepat dipilih. ²⁵ Blundell dan Bond menunjukkan bahwa bias dan kurangnya presisi dari estimator FD-GMM dapat disebabkan oleh instrumen yang lemah dan ditandai dengan konsentrasi parameter. Selain itu, ²⁵ tambahan pembatasan stasioneritas ringan pada proses kondisi awal memungkinkan penggunaan estimator SYS-GMM yang lebih luas dengan menggunakan *lag* perbedaan ²⁵ dari y_{it} sebagai instrumen untuk persamaan pada tingkat level, selain menggunakan tingkat *lag* dari y_{it} sebagai instrumen dalam FD-GMM. Metode SYS-GMM telah terbukti lebih efisien daripada FD-GMM (Baltagi, 2005).

4.3.4 Hasil Estimasi Model

Tabel 4.6 Hasil Estimasi Model SYS-GMM

Kemandirian Keuangan Daerah				
Variabel	Koefisien	Std. Error	z	P-value
L1.KKD	0.5340715	0.1272203	4.20	0.000
lnOP	1.347092	0.6000129	2.25	0.025
lnDBHSDA	-0.5988536	0.1615019	-3.71	0.000
lnDAU	-4.939938	1.104383	-4.47	0.000
lnDAK	-0.9483406	0.4848271	-1.96	0.050
TR	9.061156	1.074011	8.44	0.000
_cons	73.17186	14.45784	5.06	0.000

Sumber: Output STATA

Tabel 4.6 menunjukkan hasil estimasi dengan model terpilih SYS-GMM dan dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KKD_{i,t} = & 73.17186 + 0.5340725 KKD_{i,t-1} + 1.347092 \ln OP_{i,t} \\
 & - 0.5988536 \ln DBHSDA_{i,t} - 4.939938 \ln DAU_{i,t} \\
 & - 0.9483406 \ln DAK_{i,t} + 9.061156 TR_{i,t} + \varepsilon_{i,t}
 \end{aligned}$$

130

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 73.17186 menunjukkan bahwa apabila variabel Output Primer, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan *Tax Ratio* bernilai 0 (nol) maka variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 73.17186 persen.
- L1.KKD = 0.5340715 artinya ketika variabel Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun lalu mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun saat ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- lnDBHSDA = -0.5988536, artinya ketika variabel Dana Bagi Hasil SDA naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami

150

penurunan sebesar 0,59 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

- d. $\ln\text{DAU} = -4.939938$, artinya ketika variabel Dana Alokasi Umum naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 4,93 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- e. $\ln\text{DAK} = -0.9483406$, artinya ketika variabel Dana Alokasi Khusus naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- f. $\text{TR} = 9.061156$, artinya ketika variabel *Tax Ratio* naik sebesar 1 persen, maka Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 9,06 persen, dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

4.3.5 Hasil Hipotesis Statistik

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Parsial

Variabel	z	P-value
L1.KKD	4.20	0.000
$\ln\text{OP}$	2.25	0.025
$\ln\text{DBHSDA}$	-3.71	0.000
$\ln\text{DAK}$	-1.96	0.050
$\ln\text{DAU}$	-4.47	0.000
TR	8.44	0.000
_cons	5.06	0.000

Sumber: Output STATA

Berdasarkan Tabel 4.7, ditampilkan hasil uji statistik parsial menggunakan pendekatan model SYS-GMM. Keputusan ketika tidak terima H_0 dapat diambil apabila nilai $P_{\text{value}} < \alpha$ (0,05). Hasil uji statistik parsial ini menunjukkan bagaimana

variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yang dapat dilihat sebagai berikut.

a. Pengaruh *lag* Kemandirian Keuangan Daerah

$H_0 : \beta_1 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_1 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas ($P\text{-value}$) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas ($P\text{-value}$) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas *lag* kemandirian keuangan daerah lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan *lag* kemandirian keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

b. Pengaruh Output Primer

$H_0 : \beta_2 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh output primer daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_2 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan output primer terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas ($P\text{-value}$) < α (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas ($P\text{-value}$) > α (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas output primer lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

c. Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

$H_0 : \beta_3 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_3 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas ($P\text{-value}$) < α (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas ($P\text{-value}$) > α (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas dana bagi hasil sumber daya alam lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

d. Pengaruh Dana Alokasi Umum

$H_0 : \beta_4 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_4 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas dana alokasi umum lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

e. Pengaruh Dana Alokasi Khusus

$H_0 : \beta_5 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_5 > 0$, Terdapat pengaruh positif dan signifikan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas (*P-value*) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas (*P-value*) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 .

Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas ¹¹³ dana alokasi khusus lebih ³ besar dari 0,05 maka tidak tolak H_0 . Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

f. Pengaruh *Tax Ratio*

$H_0 : \beta_6 \leq 0$, Tidak terdapat pengaruh *tax ratio* terhadap ² kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_6 > 0$, ¹⁶ Terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan:

Apabila nilai probabilitas ¹² ($P\text{-value}$) $< \alpha$ (0,05) maka tidak terima H_0 . Sebaliknya jika nilai probabilitas ($P\text{-value}$) $> \alpha$ (0,05) maka tidak tolak H_0 . Berdasarkan hasil estimasi di atas, nilai probabilitas *tax ratio* ⁶⁰ lebih kecil dari 0,05 maka tidak terima H_0 . Artinya terdapat pengaruh signifikan *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer di Indonesia tahun 2018-2022, ⁹ dengan asumsi variabel lain *ceteris paribus*.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Output Primer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM ⁸⁴ yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Output Primer berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien yang didapatkan yaitu sebesar 1,347092 yang berarti bahwa peningkatan output primer sebesar 1 persen akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 1,34 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana p -value $0,025 < \alpha 0,05$ yang berarti tidak tolak H_1 dan konsekuensinya tolak H_0 . Dengan ini, variabel Output Primer memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik dimana Adam Smith dan David Ricardo menyebutkan bahwa kekayaan alam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Adam Smith berpendapat jika kekayaan alam dapat diperoleh manusia tanpa harus bekerja keras karena sifatnya gratis atau alamiah. Akan tetapi, Ia juga mengungkapkan bahwa kekayaan alam dapat dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk mengolah kekayaan alam tersebut menjadi nilai tambah bagi pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan kondisi saat ini yang mana kekayaan alam bersifat gratis dan boleh dimiliki oleh siapapun selama tidak memiliki hak milik, akan tetapi diperlukan tenaga kerja dan juga modal yang cukup sehingga lebih banyak peluang untuk meningkatkan perekonomian di daerah.

Sementara David Ricardo berpendapat bahwa teorinya lebih berfokus pada hubungan dengan produksi dan distribusi pendapatan. Ia mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri dapat meningkatkan nilai tanah karena permintaan untuk sumber daya alam juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan perkembangan industri dapat memberikan dampak positif

terhadap permintaan sumber daya alam seperti lahan dan mineral. Hal tersebut dapat meningkatkan harga tanah karena tanah memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dalam kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi yang semakin berkembang.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi yang diungkapkan oleh (Umam, 2017; Oki, 2019; Adha, 2022) bahwasanya output primer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Hal ini berarti peningkatan yang terjadi pada output primer dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sektor pertanian menjadi sektor terpenting dalam suatu perekonomian Indonesia karena jika dilihat dari peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penting di Indonesia. Hal tersebut juga karena sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumber daya alam sebagai objek mata pencaharian. Sektor primer juga meliputi sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Sektor tersebut menjadi sumber pendapatan utama dari pajak dan retribusi bagi pemda. Segala kegiatan seperti penebangan kayu, penangkapan ikan, pertambangan mineral, serta penggalian bahan baku dapat berpengaruh pada pengenaan pajak bumi dan bangunan dari lahan yang dimiliki, pajak pertambahan nilai dari hasil penjualan, dan juga retribusi dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Hasil positif dan signifikan antara variabel output primer terhadap kemandirian keuangan daerah juga dapat dipengaruhi oleh beberapa Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua yang mana sektor perekonomian provinsi tersebut didominasi oleh kegiatan di sektor pertambangan dan penggalian (Opini Kemenkeu, 2021).

Output primer jika memiliki nilai yang tinggi maka akan mampu meningkatkan PAD suatu daerah di mana PAD merupakan sumber utama pendapatan yang memungkinkan pemda untuk terus mendukung pengelolaan dan pembangunan di ¹⁰⁷daerahnya tanpa harus bergantung dengan dana bantuan dari pemerintah pusat maupun lembaga eksternal lainnya. ¹⁹⁵Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh suatu daerah, maka pemda sudah mampu mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat maupun bantuan eksternal yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan itu juga pemda dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara mandiri berdasarkan kondisi perekonomian daerahnya.

Nilai output primer yang lebih besar dalam suatu perekonomian daerah akan mampu membantu mengurangi risiko terjadinya fluktuasi ekonomi ¹²⁸yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Diversifikasi pendapatan sangat penting agar daerah memiliki lebih banyak sumber pendapatan yang beragam sehingga perekonomian dapat terus berkembang pesat. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan beragam agar mengurangi terjadinya risiko keuangan yang timbul dari ketergantungan pada satu pendapatan saja dan suatu daerah dianggap lebih tahan terhadap perubahan ekonomi atau keuangan. Diversifikasi pendapatan juga menandakan bahwa pemda mampu mengelola kekayaan alam yang diberikan secara optimal yang mana hal tersebut dapat menjadikan pertambahan terhadap pajak daerah serta retribusi daerah sehingga PAD meningkat dan daerah akan menjadi lebih mandiri dari segi keuangan.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh mengenai pengaruh positif yang signifikan variabel output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten di Indonesia, maka pemerintah daerah dapat mengambil beberapa kebijakan untuk memaksimalkan kekayaan alam di Kabupaten yang memiliki nilai output primer lebih tinggi dibandingkan output sekunder dan tersier. *Pertama*, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Alih-alih terlalu fokus pada pemanfaatan non-hayati yang dapat menimbulkan kerusakan, maka sebaiknya pemerintah daerah juga lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam hayati yang dihasilkan dari kehutanan dan pertanian. Hal tersebut karena sumber daya alam hayati tidak akan habis jika dikelola dengan baik, sementara sumber daya alam non-hayati ada yang bersifat dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.

Kedua, pengelolaan produksi pertanian. Permasalahan yang terjadi saat ini terkait dengan pembangunan pertanian adalah peningkatan penduduk yang semakin pesat, penurunan kualitas sumber daya lahan dan air, perubahan iklim, meningkatnya persaingan, serta memburuknya kualitas lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, produktivitas lahan, daya saing global, dan perhatian terhadap aspek lingkungan. Meningkatkan produksi pangan hanya melalui pertanian lahan sawah saja tidaklah cukup tanpa didukung oleh pemberdayaan lahan kering dan lahan rawa. Mengingat perubahan iklim yang terjadi saat ini, optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan lahan rawa untuk produksi pangan menjadi sangat penting (Djufry, et al., 2019). Dengan begitu, nilai output primer terus bertambah

naik yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat sejahtera dan daerah pun menjadi lebih mandiri.

Ketiga, pengelolaan kawasan konversi perairan dan perikanan. Pengelolaan perikanan sendiri telah dimuat dalam UU ⁴¹ No. 31 Tahun 2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang yaitu pada UU No. 45 Tahun 2009. Dalam konteks dasar hukum tersebut, pengelolaan perikanan diartikan sebagai seluruh upaya meliputi proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan Keputusan, alokasi sumberdaya ikan, serta implementasi maupun penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lain yang bertanggungjawab berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. ⁷⁸ Implementasi pengelolaan perikanan di Indonesia sendiri membutuhkan adaptasi struktural dan fungsional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut karena menyangkut perubahan kerangka berpikir seperti otoritas perikanan tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif perikanan, melainkan ¹⁰⁶ lebih dari itu menjalankan pengelolaan perikanan (Adrianto, et al., 2008). ¹⁵⁵ *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) merupakan konsep yang bertujuan untuk menyeimbangkan dimensi-dimensi pengelolaan perikanan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis ekosistem. EAFM hadir untuk mengoptimalkan pengelolaan perikanan di Indonesia yang bertujuan agar ¹⁰⁶ memberikan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat khususnya meningkatkan taraf hidup nelayan. Jika perairan dan perikanan sudah dikelola secara optimal, maka pendapatan daerah cenderung

meningkat yang mana berakhir pada kesejahteraan masyarakat pada daerah yang semakin mandiri tersebut.

Bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, (Fatmala, 2020) justru mengatakan bahwa output primer memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Pertumbuhan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun anggaran 2008-2012 juga diiringi oleh peningkatan Total Pendapatan Daerah di periode yang sama. Menurut kajian yang dilakukan oleh (Fatmala, 2020), sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi, kontribusi sektor ekonomi pertanian tidak dapat langsung diserap sebagai pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa.

4.4.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar -0,5988536 yang berarti apabila dana bagi hasil sumber daya alam mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,59 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana p -value $0,000 < \alpha 0,05$ yang berarti tidak tolak H_1 dan konsekuensinya tolak H_0 .

Dengan ini, variabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut Teori Keagenan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah, begitu juga dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri segala aktivitas pemerintahannya. Pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil sumber daya alam secara merata sesuai dengan pendapatan sumber daya alam daerah masing-masing yang kemudian dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar tercipta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas publik. Sementara berdasarkan teori *Fiscal Federalism*, yang berfokus pada alokasi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berbeda pada suatu negara. Dana bagi hasil SDA merupakan dana yang berperan penting dalam otonomi daerah dan pengelolaan keuangan, karena besaran dana bagi hasil SDA dan pendistribusiannya dapat berpengaruh pada kemandirian daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pengelolaan potensi daerah masing-masing.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Verawaty, et al., 2017; Martini, et al., 2019; Indrianingrum & Priyono, 2023; Rahayu, et al., 2024) bahwasanya dana bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini berarti bahwa setiap pertambahan dana bagi hasil sumber daya alam yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemda akan mengakibatkan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil ini juga menandakan bahwa pemda masih

sangat bergantung pada pemerintah pusat dan belum mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik agar menjadi sumber pendapatan daerahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Martini, et al., 2019) dengan judul “*Financial Independence of The South Sumatra Regional Government*” yang juga memasukkan faktor dana bagi hasil sumber daya alam sebagai peningkatan kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitiannya memperoleh hasil negatif dan signifikan antara dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan. Ini berarti bahwa dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum dapat digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana bagi hasil SDA belum mampu mencapai target dan tujuan kepentingan umum serta belum mampu menghasilkan output yang berdampak maksimal pada peningkatan pendapatan regional. Kondisi ini disebabkan oleh masalah distribusi DBH SDA yang sering muncul, seperti praktik distribusi triwulanan yang tidak tepat waktu menjadi keluhan bagi daerah penerima DBH SDA. Setelah pembayaran dilakukan, masih ada masalah seperti kelebihan atau kekurangan pembayaran untuk suatu daerah yang mengakibatkan gangguan pada sistem perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Akan tetapi, hasil ini bertentangan dengan kajian yang telah dilakukan oleh (Sanga, et al., 2018; Marzuki, et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hakikatnya, DBH diharapkan dapat berdampak positif dalam mengatasi eksternalitas negatif serta dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di

Indonesia. DBH SDA tidak hanya disalurkan kepada daerah penghasil saja, akan tetapi disalurkan secara merata ke daerah lain yang mungkin tidak memiliki potensi sumber daya alam yang besar. DBH menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan sebagai modal dasar pemda dalam menerima dana pembangunan untuk menjalankan segala aktivitas pemerintahan. Dana bagi hasil sendiri ditujukan untuk memberikan insentif kepada daerah yang menghasilkan sumber daya alam agar daerah tersebut ikut merasakan manfaat positif dari eksploitasi sumber daya maupun aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Tujuannya adalah agar daerah-daerah tersebut dapat mengatasi dampak negatif seperti kerusakan lingkungan atau konflik sosial. Dengan memberikan pendapatan tambahan berupa DBH kepada daerah tertentu, maka diharapkan tingkat pembangunan antarwilayah dapat merata dan ketimpangan pendapatan antar-daerah dapat diminimalisir. Penggunaan DBH juga diharapkan dapat mendorong kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menyatakan adanya pengaruh negatif dan signifikan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah yang disebabkan karena penelitian ini berfokus pada 140 Kabupaten di Indonesia dengan sektor unggulan primer dan kemandirian keuangan daerahnya masih sangat rendah sehingga dapat dibuktikan bahwa alokasi dana bagi hasil SDA yang diberikan oleh pemerintah pusat belum dimaksimalkan untuk kegiatan pembangunan daerah, justru daerah tersebut hanya mengandalkan pembagian DBH saja. Hal ini menandakan juga bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada sumber dana eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan terkait dana bagi hasil SDA agar dapat menjadi faktor peningkatan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan artikel dari Media Keuangan Kemenkeu, ada beberapa cara agar dana bagi hasil dapat dikelola secara adil. *Pertama*, melakukan pemerataan di seluruh pelosok Indonesia. Dana bagi hasil merupakan dana transfer yang tujuannya untuk disalurkan melalui pemerintah pusat kepada pemda agar memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan cara memperhatikan potensi sumber daya alam daerah penghasil. Sangat diperlukan koordinasi yang kuat antara lembaga nasional dengan pemerintah daerah untuk terus melakukan dukungan dalam hal penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur keuangan publik.

Kedua, melakukan redesain DBH agar dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan. Redesain merupakan suatu Tindakan untuk mengubah serta memperbaiki struktur suatu objek, sistem, maupun konsep dengan tujuan meningkatkan efisiensi kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan redesain DBH sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang mana tujuannya agar mengurangi ketimpangan yang terjadi antarwilayah. Menurut Adriyanto – Direktur Dana Transfer Umum, mengatakan bahwa sejak tahun 2023, alokasi dana bagi hasil telah menggunakan data Realisasi T-1 dalam penghitungan alokasi DBH. Penghitungan tersebut diharapkan dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kondisi aktual dan dapat mengurangi perbedaan alokasi dengan penerimaan yang sebenarnya dibagihasilkan. Ia juga berpendapat kalau alokasi tidak hanya bersumber dari DBH, akan tetapi dari kinerja pemda dalam mendorong

pendapatan negara serta usaha untuk memulihkan lingkungan akibat aktivitas ekstraksi sumber daya alam.

Ketiga, melakukan proses verifikasi dengan cepat. Upaya redesain dana bagi hasil bertujuan untuk mendukung peningkatan penerimaan negara melalui pengelolaan yang lebih adil. Redesain tersebut juga berguna untuk mengurangi disparitas antar wilayah baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut Adriyanto, pembagian alokasi berdasarkan kinerja yang dipertimbangkan dalam distribusi dana bagi hasil SDA dapat mendorong pemda untuk aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki kondisi lingkungan. Dengan mempercepat proses verifikasi dari redesain DBH, maka pemerintah semakin maju menuju pengalokasian ⁵ dana bagi hasil yang lebih baik dan lebih adil. Ditjen Perimbangan Keuangan yang bertugas melakukan percepatan proses verifikasi atas laporan dana bagi hasil *earmarked* telah melakukan upaya untuk mengurangi keterlambatan laporan dengan membagikan informasi secara massif, sosialisasi, serta diskusi grup agar pemda tidak terlambat dalam menyampaikan laporan DBH. ²⁰¹ Memang sangat diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tercipta penyaluran DBH yang adil sehingga daerah tidak merasa dirugikan karena setiap daerah pasti memiliki program pembangunannya masing-masing yang mana hal tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya.

4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan

Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Dana Bagi Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien dari variabel yaitu -4,939938 yang berarti bahwa peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 persen mampu menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar 4,93 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana $p\text{-value}$ 0,000 < alpha 0,05 yang berarti tidak tolak H_1 dan konsekuensinya tolak H_0 . Dengan ini, variabel DAU memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Sesuai teori *Fiscal Federalism* yang telah dikemukakan oleh Musgrave (1959) yang memusatkan perhatian pada pembagian sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbeda dalam suatu negara. DAU berperan penting dalam otonomi daerah dan pengelolaan keuangan, karena besaran DAU dan pendistribusiannya dapat berpengaruh pada kemandirian daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pengelolaan potensi daerah masing-masing. Menurut teori Keagenan, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah, begitu juga dengan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri segala aktivitas pemerintahannya. Pemerintah pusat mendistribusikan dana alokasi umum secara adil berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Haryanto, 2019; Musfirati & Sugiyanto, 2021; Siringo, 2022) yang menyatakan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hal ini berarti semakin besar pemda mengalokasikan DAU untuk realisasi, maka tingkat kemandirian di suatu daerah justru akan menurun. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit alokasi DAU yang direalisasikan oleh pemda, maka akan terjadi peningkatan kemandirian keuangan daerah. Musfirati & Sugiyanto (2021) menjelaskan bahwa hasil negatif dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah karena dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah sangatlah besar, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan alokasi DAU sebagai dana transfer tertinggi di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY sehingga dapat mengartikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer umum masih tinggi. Pada studi kasus kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer, menyimpulkan bahwa rendahnya kemandirian keuangan kemandirian pada Kabupaten tersebut disebabkan karena masih tingginya dana transfer umum, khusus, serta bagi hasil sumber daya alam yang tinggi di beberapa kabupaten dengan basis ekonomi pertanian.

Alokasi DAU disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan fiskal setiap daerah. Daerah dengan potensi fiskal yang tinggi namun kebutuhan fiskalnya rendah, akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil dari pemerintah pusat, sementara daerah dengan potensi fiskal rendah tetapi kebutuhan fiskalnya besar, akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar dibandingkan dengan daerah

yang lebih kaya. Jika suatu daerah memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, maka DAU akan diberikan lebih besar dibandingkan daerah yang kaya (Setiawan, et al., 2021). Daerah yang kaya tidak menentukan daerah tersebut mandiri secara keuangan karena kebutuhan fiskal masing-masing daerah berbeda. Optimalisasi realisasi DAU untuk pembangunan ekonomi lokal sangat diperlukan agar besar kecilnya alokasi DAU dapat berpengaruh kepada peningkatan kemandirian daerah.

Jika melihat pada ¹¹⁰ hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum pada 140 Kabupaten di Indonesia justru ²⁴ berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, maka terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan di daerah agar lebih memperhatikan ²⁶ dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga menjadi peningkatan bagi kemandirian keuangan. ³⁰ Pertama, menggunakan dana alokasi umum secara efisien. Dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pengalokasian DAU dari pemerintah pusat diberikan atas dasar melihat kebutuhan daerah melalui ²⁸ pendekatan *fiscal gap*, yang mana ditentukan dari kebutuhan daerah dengan potensi daerahnya. Menurut Halim (2016) dalam jurnal (Periansya, 2019) menyatakan bahwa ⁴⁶ dana alokasi umum merupakan dana transfer yang bersifat *block grant*. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk ²⁷ menggunakan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah masing-masing. Dalam hasil penelitian ini, dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah belum dioptimalkan ⁴ secara efektif dan efisien karena apabila pemerintah daerah telah mampu meningkatkan sarana prasarana

sesuai kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan merasa puas terhadap fasilitas dan pelayanan publik yang berdampak pada tingginya produktivitas masyarakat yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal (Periansya, 2019).

Kedua, memaksimalkan potensi fiskal agar dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu memahami seberapa besar potensi fiskal yang dimiliki oleh setiap daerah agar dapat dioptimalkan secara tepat. Untuk mengetahui hal tersebut, bisa dilakukan pendataan potensi ekonomi dengan diiringi pembukaan kesempatan investasi ¹⁷⁸ yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan program pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara nasional. Hal tersebut dapat menjaga kondisi ekonomi daerah agar terus stabil serta peningkatan ekonomi di pusat dan daerah. Program-program yang telah ditetapkan oleh nasional dapat membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari otonomi daerah. Apabila daerah telah mampu melaksanakan otonomi ³² daerah, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengurus dan mengelola sendiri segala kegiatan pemerintahan dan keuangan daerahnya.

Ketiga, ¹⁰⁷ mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, perlu dibutuhkan kerja sama antar pihak pemerintah pusat dan daerah. Meskipun telah menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan dalam hal pengalokasian dana bantuan dari pusat agar dana

yang diberikan oleh pusat dapat digunakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah pun perlu terus meningkatkan performa kinerja fiskal daerah yang dicerminkan dari program-program daerah serta kualitas serapan APBD. Tujuan pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum agar daerah dapat meningkatkan infrastruktur publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang nantinya akan meningkatkan PAD dan meningkatkan kemandirian keuangan pada daerah tersebut. Akan tetapi, pengalokasian dana alokasi umum kepada daerah justru semakin membuat daerah ⁷⁴ ketergantungan dengan dana transfer pusat sehingga daerah menjadi tidak mandiri. Padahal, ada beberapa upaya agar pemda mampu meningkatkan kemandirian daerah, seperti inovasi dalam pajak daerah, kerja sama dengan badan usaha, memanfaatkan dana abadi daerah, serta terus melakukan penggalan pada potensi daerah. Dengan begitu, pemda dapat memperoleh lebih banyak pendapatan agar daerahnya menjadi semakin mandiri.

Pengaruh negatif yang ditimbulkan dari ⁶⁶ dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat belum berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga pengalokasian dana tersebut tidak dapat menghasilkan output yang maksimal. Pemerintah daerah pada studi kasus 140 Kabupaten di Indonesia belum mampu menggunakan dana transfer dengan efektif dan efisien sehingga dana alokasi tersebut tidak dapat membantu mengoptimalkan ⁶⁹ sektor-sektor produktif yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dana alokasi umum dari pemerintah pusat

hanya bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan saja tetapi tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.²

4.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien yang didapatkan sebesar -0,9483406, artinya ketika dana alokasi khusus meningkat sebesar 1 persen, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,94 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana p -value 0,050 > alpha 0,05 yang berarti tidak tolak H_0 dan konsekuensinya tolak H_1 . Dengan ini, variabel DAK tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.¹³¹

Hasil temuan penelitian ini konsisten dengan studi yang pernah dilakukan oleh (Hutahaean, 2017; Affifah & Rahayu, 2021; Prapat, et al., 2021; Setiawan, et al., 2021) bahwasanya variabel DAK tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti alokasi DAK kepada masing-masing pemda cenderung ketat peraturannya sehingga daerah tidak fleksibel dalam menjalankan kegiatan daerahnya dengan dana alokasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut penelitian oleh (Setiawan, et al., 2021) yang mengkaji mengenai “Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016” menyimpulkan bahwa DAK yang diterima oleh pemda Provinsi di Pulau Sumatera tidak

mempengaruhi peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan oleh fokus pelaksanaan DAK yang lebih besar pada investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan infrastruktur masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Tidak berpengaruhnya DAK terhadap kemandirian keuangan yaitu disebabkan oleh keterbatasan kewenangan pemda dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut, karena penggunaannya telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemda hanya dapat menggunakan DAK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, hasil ini bertentangan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah, 2019; Marzuki, et al., 2022; Riyadi, 2022) yang mengungkapkan bahwa DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Aisyah (2019) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Periode Tahun Anggaran 2012 – 2018” menyatakan hasil bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan. Dalam studi kasusnya, Ia menyatakan bahwa semakin besar daerah menerima distribusi dana alokasi khusus, maka semakin rendah pula tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Sebaliknya, jika semakin kecil daerah menerima distribusi dana alokasi khusus maka semakin kecil juga tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Hal tersebut dikarenakan dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu disebabkan pendapatan asli daerah yang masih rendah. Dana alokasi khusus sendiri dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan

menjadi tanggung jawab daerah. Dengan dana tersebut, dapat membantu daerah dalam pembiayaan kebutuhan fisik seperti sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah, serta lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah pusat mengenai penyaluran DAK, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, terus mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi DAK fisik dan nonfisik dilakukan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kebijakan DAK fisik yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2023 adalah:

Pertama, DAK fisik ditujukan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan layanan dasar dan topik tertentu, dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. *Kedua*, meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK fisik dengan memaksimalkan penggunaan sistem informasi. *Ketiga*, memperkuat alokasi dan penyaluran serta meningkatkan sinergi pendanaan DAK fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, dan sumber dana lainnya. Selain itu, memperdalam penerapan konsep tematik melalui berbagai pendekatan untuk mencapai hasil yang optimal dan merumuskan kebijakan DAK fisik yang terintegrasi antar berbagai bidang.

Sementara kebijakan yang dilakukan pemerintah mengenai penyaluran DAK nonfisik pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. *Pertama*, menetapkan DAK nonfisik berdasarkan prioritas nasional serta melanjutkan peningkatan fokus pada aktivitas DAK nonfisik yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, melanjutkan upaya peningkatan di bidang pendidikan dengan meningkatkan ²¹² Dana BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, memperluas cakupan tunjangan guru, serta mengalokasikan ¹ DAK nonfisik berdasarkan kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja. *Ketiga*, memperkuat bidang kesehatan dengan mengalihkan ¹ penyaluran BOK Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas dan meningkatkan kualitas serta akurasi data pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas dengan menyediakan menu Insentif UKM.

Untuk mengoptimalkan penyaluran dana alokasi khusus, pemerintah telah melakukan berbagai upaya sehingga diharapkan kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan. Langkah pertama, pemerintah melakukan kebijakan pendistribusian dana berbasis kinerja. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana ²¹⁵ transfer ke daerah akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan laporan penggunaan atas penyaluran dana tersebut. Laporan mengenai DAK fisik dan DAK nonfisik tersebut akan diawasi secara periodik. Selain itu, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi terhadap penggunaan dana alokasi khusus oleh pemda untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana. Upaya lainnya meliputi penyediaan pelatihan dan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, serta adanya dorongan untuk meningkatkan transparansi dengan

pengembangan sistem informasi keuangan yang efektif. Peningkatan dalam perencanaan pembangunan juga menjadi fokus utama dengan harapan menciptakan perencanaan yang lebih baik yang akan mengarah pada penggunaan dana alokasi khusus sesuai dengan target serta memberikan dampak pembangunan yang lebih besar. Selain itu, dibutuhkan juga ⁵³ koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus secara efektif dan efisien. Upaya-upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah secara menyeluruh.

⁴⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dan alokasi khusus tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah dana alokasi yang ¹⁹¹ diberikan oleh pemerintah pusat tidak berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten di Indonesia. Pengimplementasian DAK ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan ² investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan atau perbaikan sarana fisik masyarakat yang memiliki umur manfaat yang lama. Dengan demikian, pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemda. Sementara, pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengelola DAK karena dana alokasi khusus telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga tugas pemda hanya melaksanakan sesuai instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

¹¹ 4.4.5 Pengaruh *Tax Ratio* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji estimasi GMM dengan pendekatan model SYS-GMM yang telah dilakukan diperoleh ¹¹ bahwa variabel *Tax Ratio* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien dari variabel adalah sebesar 9,061156, artinya ketika terjadi peningkatan pada variabel *tax ratio* sebesar 1 persen, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat sebesar 9,06 persen. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan uji statistik parsial yang mana *p-value* 0,000 < alpha 0,05 yang berarti tidak tolak H_0 dan konsekuensinya tolak H_1 . Dengan ini, variabel *Tax Ratio* memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut teori Stiglitz, *tax ratio* merupakan indikator dalam sektor publik yang menunjukkan bahwa peningkatan skala publik dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat berpengaruh kepada peningkatan kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugas sektor publik. Namun, nilai rasio pajak yang tinggi juga akan menambah beban bagi masyarakat lokal dimana hal ini tidak sejalan dengan tujuan akhir dari adanya otonomi daerah yaitu kesejahteraan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Safarina, 2021; Marselina, 2022; Rachmadani, 2022) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berdasarkan rasio pajak, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh (Anisa, 2023) juga menyatakan bahwa *tax ratio* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, khususnya di daerah hasil pemekaran (studi kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan Gorontalo). Artinya ketika rasio pajak suatu daerah mengalami peningkatan, maka akan terjadi peningkatan juga pada kemandirian keuangan daerah tersebut. *Tax Ratio* menggambarkan tentang seberapa besar kinerja sektor

perpajakan dari PDRB yang dapat diterima oleh pemerintah. Kenaikan yang terjadi pada *tax ratio* mencerminkan bahwa penghasilan yang diterima masyarakat pun semakin besar yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada besarnya pendapatan daerah. Besar kecilnya nilai pajak dapat menentukan bagaimana kinerja daerah dalam pembiayaan dan pengeluaran anggaran rutin. Peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahun akan meningkatkan pendapatan suatu daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat kemandirian pemda dalam memnuhi berbagai kebutuhan pengeluaran tanpa terus bergantung pada pemerintah pusat (Sunarto & Sunyoto, 2016).

Tax ratio menjadi penting dalam perekonomian karena dapat melihat ¹⁰ perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan pendapatan suatu perekonomian. ¹⁰⁸ Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara total pajak daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran rasio pajak di suatu daerah dipengaruhi oleh nilai PDRB nya. PDRB mencerminkan ¹⁰ jumlah pendapatan yang dapat dikenai pajak dan menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat. Jika berkembang dengan baik, hal ini dapat menjadi potensi ¹⁰ untuk pengenaan pajak di daerah tersebut. Oleh Karena itu, analisis rasio pajak penting untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi jenis pajak potensial dan sektor ekonomi terkait, serta untuk mengevaluasi kondisi daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain.

Dalam konteks perekonomian daerah, daerah dengan *tax ratio* yang tinggi ²¹⁴ cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat terlihat dari kemajuan sektor-sektor produksi yang

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang telah berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan pajak daerah juga sangat penting.

Tax ratio dapat diperhatikan dari dua sisi yang berbeda. *Pertama*, *tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak daerah semakin tinggi, maka semakin besar juga nilai *tax ratio*. Semakin besar pajak yang diterima akan memungkinkan suatu daerah melaksanakan manajemen pemerintahan dengan lebih fleksibel. *Kedua*, *tax ratio* dapat menggambarkan ukuran beban pajak. Secara logika, PDRB juga dapat dilihat sebagai total penghasilan seluruh masyarakat di dalam suatu perekonomian. Dengan itu, apabila *tax ratio* semakin tinggi maka penghasilan masyarakat pun semakin tinggi yang mana nantinya akan dimasukkan ke dalam penerimaan pajak (*ceteris paribus*). Menurut buku “Belanja & Pendapatan Pusat Kajian Anggaran” mengungkapkan bahwa *tax ratio* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat mikro dan makro. Faktor mikro yang dapat mempengaruhi *tax ratio* yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi di antara lembaga negara serta keselarasan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Sementara faktor makro yaitu besaran tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita, serta tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik.

Terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *tax ratio* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah pada 140 Kabupaten di Indonesia dapat menggali dan

mengeksplorasi lebih banyak potensi daerah yang bisa menjadi sumber pajak daerah. Beberapa strategi untuk menggali potensi pajak daerah dapat ditemukan dalam buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) yang digagas oleh (Anggoro, et al., 2023), yaitu:

Pertama, penguatan kelembagaan/organisasi. Pemerintah dapat melakukan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah. Misalnya Bapenda Kab. Bandung Barat yang berdiri sendiri sejak Februari 2021 dan memisahkan diri dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sehingga lebih fokus menggali pendapatan daerah (*bapenda.bandungbaratkab.go.id*, 2023). Kemudian bentuk penguatan lainnya yaitu meningkatkan kapasitas SDM yang ahli di bidang perpajakan. *Kedua*, melakukan pendataan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendata ulang terkait penggalan potensi agar menghasilkan bentuk-bentuk potensi sesungguhnya pada daerah masing-masing. *Ketiga*, *profiling* wajib pajak daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kab/Kota dapat berkerjasama dengan pemerintah provinsi atau SAMSAT dalam melakukan pendataan ke lapangan dari rumah ke rumah. *Keempat*, analisis potensi. Pendataan yang telah dilakukan sebelumnya kemudian ditindaklanjuti dengan analisa dan kajian untuk diubah menjadi suatu kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut nantinya dikembalikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Menurut Kementerian Keuangan RI tahun 2021, ada beberapa strategi untuk mengoptimalkan pajak daerah yang dapat diterapkan oleh Pemda guna meningkatkan potensi pajak dan memperkuat kemandirian keuangan. *Pertama*, pemerintah perlu memperbaiki basis data perpajakan dengan melakukan pendataan

⁵ wajib pajak dan objek pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah lain dan ⁵ memanfaatkan data dari pihak ketiga (seperti BPN untuk PBB). *Kedua*, melakukan penilaian, penagihan, serta pemeriksaan. Penilaian maupun penagihan tersebut dikoordinasikan dengan DJP dan DJKN. Kemudian nantinya akan dilakukan monitoring bersama dengan Polri, Kejaksaan, BPK, dan BPKP. *Ketiga*, peningkatan pada ¹⁸ sumber daya manusia. SDM yang unggul dan ahli dalam penilaian, penagihan, pemeriksaan, serta praktik pemungutan perpajakan yang baik sangat dibutuhkan lebih banyak agar tercipta kerja sama yang sukses dalam pemungutan perpajakan. Kemudian pemungutan perpajakan juga harus melibatkan kemitraan dengan pemerintah daerah lainnya. *Keempat*, menyesuaikan ³² dasar pengenaan pajak dengan melakukan penilaian ulang agar sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, serta insentif pajak dalam rangka mendukung kemudahan dalam usaha dan investasi. *Kelima*, modernisasi. Modernisasi diciptakan dari adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data, pelayanan perpajakan, menyusun SOP pelayanan, serta membentuk organisasi perpajakan daerah sesuai fungsinya masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data menggunakan GMM dengan pendekatan SYS-GMM mengenai kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten sektor unggulan primer dari tahun 2018 hingga 2022, maka dapat disusun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Output primer memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,347092 dengan nilai probabilitas (0,025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel output primer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya ketika terjadi peningkatan pada output primer maka kemandirian keuangan daerah akan mengalami kenaikan.
2. Dana Bagi Hasil SDA memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,5988536 dengan dengan nilai probabilitas (0,000). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel DBH SDA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya ketika terjadi peningkatan pada dana bagi hasil sumber daya alam maka kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan.
3. Dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar -4,939938 dengan dengan nilai probabilitas (0,000). Hal tersebut berarti variabel DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya ketika terjadi peningkatan pada dana alokasi umum maka kemandirian keuangan daerah akan mengalami penurunan.

4. Dana alokasi khusus memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,9483406$ dengan nilai probabilitas ($0,050$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel DAK tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa penurunan ataupun peningkatan yang terjadi pada dana alokasi khusus tidak akan berpengaruh pada penurunan ataupun peningkatan kemandirian keuangan daerah pula.
5. *Tax ratio* memiliki nilai koefisien regresi sebesar $9,061156$ dengan nilai probabilitas ($0,000$). Hal tersebut berarti bahwa variabel *tax ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya ketika terjadi peningkatan pada *tax ratio* maka kemandirian keuangan daerah akan mengalami kenaikan.

5.2 Saran

Setelah melihat hasil penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah di Indonesia, terdapat beberapa implikasi yang dapat diambil, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa output primer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, maka berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengoptimalkan kekayaan alam yang ada di daerahnya serta melakukan diversifikasi ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor-sektor lain yang dapat menjadi penghasil pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.
2. Dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat harus lebih memperhatikan alokasi dana

bantuan sesuai potensi dan kapasitas daerah serta melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah agar dana bantuan dari pusat dapat dioptimalkan untuk infrastruktur daerah.

3. Dari ²¹⁷ hasil penelitian yang menyatakan bahwa *tax ratio* yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan agar semakin banyak kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah lewat pajak yang diterima oleh daerah.
4. Bagi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten yang memiliki sektor unggulan primer, diharapkan mampu mengembangkan kekayaan sumber daya alamnya dengan maksimal agar kekayaan tersebut menjadi tambahan pendapatan bagi daerahnya dikarenakan pada studi kasus penelitian ini menyatakan bahwa output primer dapat berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, pemda juga bertugas untuk memberikan kebijakan yang lebih efektif agar dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah dalam menunjang segala kegiatan pemerintahan serta diharapkan dapat mengelola dana alokasi dengan sebaik-baiknya agar tidak hanya mengandalkan dana dari pusat saja.
5. Bagi pemerintah pusat, diharapkan dapat mengawasi pemerintah daerah dalam menggunakan dana alokasi yang diberikan serta terus melakukan sosialisasi agar pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat saja. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat mendorong

pemerintah daerah agar semakin mandiri secara keuangan dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam yang ada.

6. ¹⁰ Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel publik lainnya yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Peneliti juga dapat memperluas ruang objek penelitian agar hasil penelitian dapat dibandingkan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
7. ⁷⁶ Penelitian ini masih terbatas karena hanya menggunakan alat analisis STATA 14 dengan pendekatan *Generalized Method of Moment* (GMM). Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat analisis lainnya yang terbaru dan dengan pendekatan yang lebih beragam, tidak hanya GMM saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. N. (2022). Model Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi di Indonesia. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Anisa, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan Gorontalo). Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations (Vol. 58, Issue 2).
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (Third Edition)*.
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. In *Journal of Econometrics* (Vol. 87).
- Direktorat Dana Perimbangan. (2017). *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fatmala, W., & Baubau, P. (2020). Pengaruh Sektor Ekonomi Dominan terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Vol. 8).
- Ginjar, R. A. F., Zahara, V. M., Suci, S. C., & Suhendra, I. (2020). Human Development Convergence and the Impact of Funds Transfer to Regions: A Dynamic Panel Data Approach. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 593–604. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.593>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi Kelima)*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryanto, A. F. A. N. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Hendri, W., & Utama, M. S. (2019). Analysis of Factors that Influence The Independence of Regional Finance In West Nusa Tenggara Province. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 89(5), 169–175. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-05.20>
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2006 – 2021. *Jurnal Economina*, 2 (1).

- Jensen, M. C. , & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *In Journal of Financial Economics* 3, 305–360.
- Julia, D., Asmara, A., & Heriyanto, D. (2015). Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau The Impact of Fiscal Policy on Performance of Agriculture in Riau Province. *Jurnal Dinamika Pertanian*, 233–248.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Edisi Revisi)*. PT Rineka Cipta.
- Listya Nindita, N., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance Edisi*, 2(1). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Martadinata, M. A. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 37.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Martha, I., Hendrati, & Manurung, M. (2012). Exploring Indonesia Tax Ratio Development 1970-2010. *Public Finance Management Conference*.
- Marzuki, Akhyar, C., Nurlala, & Yandani, F. (2022). Pengaruh Penerimaan APBD terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Visioner & Strategis*, 11(1).
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Sunstansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5 (1).
- Oki, K. K. (2019). Dampak Otonomi Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT Impact Of Regional Autonomy On Fiscal Capacity In The District Of Timor Tengah Utara, Ntt Province. In *EKOPEM | Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 4, Issue 2). Online.
- Olivia, D. (2020). Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam Kerangka Penyelenggaraan Desentralisasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(Desember), 85–93.
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Vol. 05). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-finance>
- Prapat, E. P., Hutagalung, D. S., & Malau, E. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Pematangsiantar. *JAMIN*, 3(1).
- Rahmadani, F. (2022). Factors Affecting Regional Financial Independence in the Special Region of Yogyakarta. *Efficient: Indonesian Journal of*

- Development Economics*, 5(1), 1468–1478.
<https://doi.org/10.15294/efficient.v5i1.50786>
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. In *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun* (Vol. 3).
- Rochmah, S. N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Roodman, D. (2009). Practitioners' corner: A note on the theme of too many instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135–158. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00542.x>
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Menara Ekonomi*, VII (1).
- Shah, A. (1994). *A Fiscal Needs Approach to Equalization in a Decentralized Federation* (Policy Research Working Paper No. 1289)
- Siringo, R. W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4 (4), 200–213.
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).
- Suyanto. (2010). Flypaper Effect Theory dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 11, Issue 1).
- Umam, K. (2017). Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 6(2).
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(1), 1–10.
- Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Lampiran 1. Data Penelitian

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Aceh Barat	2018	12,03	3129,26	15994469124	570763544000	180969637761	0,21
Aceh Barat	2019	10,99	3307,16	28874550119	588209483000	190075537970	0,26
Aceh Barat	2020	11,29	3513,84	16663917659	553850567000	154158397706	0,26
Aceh Barat	2021	10,04	3777,37	33230480366	543825941000	210996651850	0,25
Aceh Barat	2022	9,93	3833,22	67812897784	543825941000	164078457561	0,22
Aceh Timur	2018	10,53	3898,77	16791089295	785902550587	192612259187	0,16
Aceh Timur	2019	9,55	4020,92	17997410206	819436048000	245061516446	0,14
Aceh Timur	2020	10,85	4148,93	10564409358	769038917000	189394300895	0,11
Aceh Timur	2021	6,75	4065,34	3587070033	759513864000	245622597466	0,12
Aceh Timur	2022	6,97	4209,97	16821794197	760233269000	261568974241	0,13
Aceh Utara	2018	10,29	8660,30	40787003000	835915569772	364373142302	0,15
Aceh Utara	2019	10,73	9049,94	52414242059	893015394074	455165428006	0,35
Aceh Utara	2020	8,78	9540,62	40889717366	897980136000	378588927584	0,14
Aceh Utara	2021	7,22	9025,77	13384973409	882657786000	359260376439	0,13
Aceh Utara	2022	7,46	10099,00	20029068185	882657786000	433919662302	0,14
Gayo Lues	2018	5,67	788,80	4222104153	462943021000	166695480399	0,24
Gayo Lues	2019	5,38	781,40	6253949591	472230875000	103023139832	0,27
Gayo Lues	2020	6,34	811,15	4739565246	423662731000	100377292837	0,22
Gayo Lues	2021	7,35	814,08	3563493411	419760894000	103312411233	0,28
Gayo Lues	2022	6,98	847,02	7563220721	420433218000	96935071543	0,22
Nagan Raya	2018	9,89	3617,56	5206846471	501612944200	146257947462	0,23
Nagan Raya	2019	7,79	3887,34	5473479711	514300667890	145333511975	0,23
Nagan Raya	2020	9,53	4093,60	6605742026	485041973000	138348797994	0,20
Nagan Raya	2021	8,93	4277,23	8898097877	477108051000	148506462128	0,17
Nagan Raya	2022	8,29	4354,79	14111406932	477405680000	153170878855	0,17
Bener Meriah	2018	7,73	1757,90	3545478574	448988545000	117742883739	0,10
Bener Meriah	2019	8,35	1844,79	4358876245	458759081000	144364691621	0,11
Bener Meriah	2020	7,19	1853,57	4715561732	424584268000	131457952854	0,10
Bener Meriah	2021	6,18	1917,17	3461408743	417698518000	143512910342	0,11
Bener Meriah	2022	6,36	1995,02	6984015003	418060203000	119462411996	0,13
Pidie Jaya	2018	6,73	1162,53	3553182577	420639477000	177599868091	0,24
Pidie Jaya	2019	6,57	1206,35	4313343827	441952256000	161482733760	0,26

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Pidie Jaya	2020	8,27	1237,76	4702296411	410145461000	123021751871	0,22
Pidie Jaya	2021	8,71	1223,73	3492341734	404301754000	128449179506	0,24
Pidie Jaya	2022	9,12	1263,49	6917892846	404301754000	173217294700	0,24
Asahan	2018	8,85	10608,78	3586343037	877794638000	231933908489	0,12
Asahan	2019	8,68	11222,13	3493526651	917363719000	241617990917	0,15
Asahan	2020	9,79	11417,90	3188090884	830586749000	203640416243	0,15
Asahan	2021	8,20	12075,53	7676428200	818693947000	207013280597	0,17
Asahan	2022	9,40	12892,54	11907072258	818693947000	317173027414	0,18
Karo	2018	10,65	7763,71	3862867703	738378312000	184960051262	0,23
Karo	2019	8,26	7919,63	4003884235	758968872000	214919677643	0,22
Karo	2020	7,91	7909,27	3390794464	687569658000	156281446842	0,18
Karo	2021	8,00	8139,64	8142825637	679135837000	207166863375	0,19
Karo	2022	7,46	8456,67	12174959039	679135837000	215031542338	0,22
Mandailing Natal	2018	5,57	4364,78	7647101249	783200132000	248799513596	0,08
Mandailing Natal	2019	5,86	4598,64	7235390531	816400130000	304349920363	0,22
Mandailing Natal	2020	6,00	4625,88	10803961638	751402758000	214805539148	0,07
Mandailing Natal	2021	8,38	4833,10	22268481354	742346622000	326663256579	0,53
Mandailing Natal	2022	5,92	5107,26	31346375678	743340668000	325748673058	0,10
Tapanuli Selatan	2018	10,23	5305,27	92504988154	642196018670	163894825061	0,27
Tapanuli Selatan	2019	11,39	5510,69	103891249745	676183229000	173137172623	0,42
Tapanuli Selatan	2020	10,13	5606,81	46645496241	604693533000	155934176856	0,23
Tapanuli Selatan	2021	8,86	5787,78	178057039206	595549093000	170941640564	0,22
Tapanuli Selatan	2022	8,31	6106,36	310465481207	595549093000	187617936614	0,23
Tapanuli Tengah	2018	6,30	3283,75	4388704856	627027553000	241018512560	0,20
Tapanuli Tengah	2019	7,33	3430,82	4389823687	670689528000	179114987145	0,20
Tapanuli Tengah	2020	7,38	3465,16	3881094661	609816945000	218573854886	0,19
Tapanuli Tengah	2021	7,27	3546,73	9117634221	603228847000	195569225120	0,20

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Tapanuli Tengah	2022	6,42	3691,11	13517418021	603228847000	253916012302	0,19
Tapanuli Utara	2018	8,19	2538,17	5736802204	639394068000	191102620448	0,24
Tapanuli Utara	2019	8,55	2605,45	4476567268	659877311000	220840905201	0,27
Tapanuli Utara	2020	10,33	2665,41	4100175709	606062527000	179466901072	0,24
Tapanuli Utara	2021	11,48	2787,70	8800735012	597636159000	204907179019	0,25
Tapanuli Utara	2022	11,11	2921,51	13321185481	597808962000	228886422026	0,28
Nias Selatan	2018	1,68	2146,30	4018504137	556174150536	199651552996	0,10
Nias Selatan	2019	1,96	2233,28	4281273043	588723530000	264850082968	0,10
Nias Selatan	2020	1,14	2261,22	3822339196	626743578000	330253546843	0,08
Nias Selatan	2021	2,34	2307,64	9244267474	617556640000	280096164424	0,12
Nias Selatan	2022	2,16	2383,84	15943013958	617556640000	311446518229	0,13
Humbang Hasundutan	2018	10,10	1814,86	3699528237	523818445000	142133738492	0,16
Humbang Hasundutan	2019	7,32	1884,52	4183331780	536163886000	162229916367	0,19
Humbang Hasundutan	2020	7,23	1891,86	3541322125	489171029000	148542851038	0,15
Humbang Hasundutan	2021	3,11	1912,48	8164300974	481828482000	148760794883	0,14
Humbang Hasundutan	2022	6,93	3052,64	12269653225	481987960000	186374887504	0,19
Serdang Bedagai	2018	12,44	8052,14	3694879965	763943386000	310954071433	0,24
Serdang Bedagai	2019	9,09	8438,59	3653384508	798240981000	252632039082	0,25
Serdang Bedagai	2020	8,02	8563,72	3203850359	727436456000	260890435464	0,22
Serdang Bedagai	2021	8,54	8828,25	7689388959	718135179000	268404820257	0,20
Serdang Bedagai	2022	7,61	9372,62	12108496079	718135179000	356895296816	0,21
Samosir	2018	5,91	1553,69	3688724037	453737230000	139883498974	0,36
Samosir	2019	6,84	1625,91	3895103258	465249052000	162075954323	0,39
Samosir	2020	7,56	1621,96	3473524340	418883094000	113710367331	0,33
Samosir	2021	7,26	1662,71	8076997016	414127985000	144676282350	0,33
Samosir	2022	7,80	1738,77	12263091984	414328359000	164563406713	0,35
Padang Lawas	2018	4,61	3962,83	4321042897	521562942000	157464009272	0,10
Padang Lawas	2019	4,59	4165,74	6311748735	541104708000	197209133432	0,09

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Padang Lawas	2020	4,25	4307,40	3875671419	496576468000	152417989816	0,11
Padang Lawas	2021	4,39	4538,79	10441134944	490264639000	138146133026	0,10
Padang Lawas	2022	4,53	4772,36	14010505426	490835624000	166831496358	0,15
Padang Lawas Utara	2018	6,99	3412,41	3823263134	537455568015	138216844240	0,12
Padang Lawas Utara	2019	3,58	3609,30	3907423695	554953633000	189907774747	0,11
Padang Lawas Utara	2020	4,63	3729,96	3652459862	521528022000	149964719310	0,18
Padang Lawas Utara	2021	3,77	3950,10	8706500423	513912559000	163460322050	0,13
Padang Lawas Utara	2022	3,91	4193,55	11684825216	513951816000	186006605462	0,13
Nias Utara	2018	6,71	1357,92	3694879965	413338900108	136489812774	0,14
Nias Utara	2019	6,55	1411,27	3653384508	429134187000	227864833863	0,25
Nias Utara	2020	7,60	1442,96	3203850359	392014347000	155695405149	0,16
Nias Utara	2021	2,71	1480,98	7689388959	388378010000	139367764338	0,12
Nias Utara	2022	1,63	1534,67	12108496079	389171996000	166695862342	0,13
Nias Barat	2018	5,61	718,46	3694879965	347722710417	206066316839	0,37
Nias Barat	2019	2,47	748,41	3653384508	359696030000	195171264445	0,35
Nias Barat	2020	3,02	767,21	3203850359	332435947000	132881922300	0,33
Nias Barat	2021	2,86	787,25	7689388959	329531869000	117227436440	0,27
Nias Barat	2022	1,75	810,90	12108496079	330192600000	234877240114	0,29
Kep. Mentawai	2018	4,97	1393,62	2291566376	610487048025	152970429302	0,11
Kep. Mentawai	2019	3,97	1428,23	3882740209	623196979000	184089277891	0,11
Kep. Mentawai	2020	4,19	1471,84	3498768001	556457541000	88727843885	0,08
Kep. Mentawai	2021	3,81	1512,88	7437478202	548987977000	115959395825	0,08
Kep. Mentawai	2022	5,90	1568,88	6550156692	549794757000	138220948692	0,12
Pasaman	2018	10,12	3002,63	1700641251	596083486000	147062049488	0,12
Pasaman	2019	9,51	3090,26	1967272903	618232956000	165376978437	0,12
Pasaman	2020	9,05	3087,29	2058650659	557421256000	164280193869	0,10
Pasaman	2021	8,76	3185,04	3359359977	551664960000	186960627446	0,10
Pasaman	2022	8,71	3309,51	4857725055	551732418000	225183411767	0,10
Sijunjung	2018	8,40	2785,78	1999724007	548573107000	139505882043	0,17
Sijunjung	2019	8,41	2852,09	4266414520	562028285000	168973858954	0,16
Sijunjung	2020	9,82	2842,34	4810891932	509071532000	145195451116	0,14
Sijunjung	2021	9,46	2848,66	4795268340	502198374000	174387318128	0,15

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Sijunjung	2022	10,01	2922,26	10131035515	502198374000	212100257205	0,17
Indragiri Hilir	2018	8,37	20167,01	172302436388	918602922000	221058798121	0,05
Indragiri Hilir	2019	7,65	20954,97	190044884415	991610493000	279039846046	0,06
Indragiri Hilir	2020	9,12	21670,23	217141053090	884826668000	266627100585	0,09
Indragiri Hilir	2021	11,47	22552,23	114727681012	885153707000	275049718032	0,06
Indragiri Hilir	2022	8,85	23660,76	187129061956	885858086000	301079695267	0,05
Kampar	2018	9,88	27795,93	373824111279	774370036000	305292493019	0,15
Kampar	2019	9,59	27946,90	530339356306	821233336000	413310248080	0,16
Kampar	2020	10,41	28054,15	301260803179	765107999000	362509735421	0,16
Kampar	2021	10,79	28731,02	170289067808	766486966000	362430566620	0,17
Kampar	2022	10,73	29908,02	330755287375	768144602000	450225422710	0,14
Kuantan Singingi	2018	6,76	11949,90	161799587168	618561583000	202328743402	0,14
Kuantan Singingi	2019	5,17	12372,05	164113038695	655605939401	274916766368	0,09
Kuantan Singingi	2020	5,10	12749,14	198371688323	603990247000	189822028586	0,08
Kuantan Singingi	2021	7,07	13146,96	87487693699	599278856000	178318164933	0,08
Kuantan Singingi	2022	5,85	13702,41	142932315101	600053050000	175394052317	0,07
Rokan Hilir	2018	6,18	31953,06	500945219255	1568825512037	168071481411	0,06
Rokan Hilir	2019	5,54	31596,26	721451324562	461142719000	258304768750	0,07
Rokan Hilir	2020	5,72	31213,05	420671590686	489590681000	283501675103	0,06
Rokan Hilir	2021	7,10	31240,15	219897557305	491328649000	285143068891	0,07
Rokan Hilir	2022	6,75	31668,93	385253081907	495023160000	360904676911	0,07
Rokan Hulu	2018	5,43	13618,17	163065226019	654291480000	234938355856	0,10
Rokan Hulu	2019	9,24	14167,11	234392472303	693689933000	253711334485	0,28
Rokan Hulu	2020	6,64	14604,77	146177129855	647253374000	217350875282	0,11
Rokan Hulu	2021	9,68	15358,70	91117186880	641923852000	277091381178	0,21
Rokan Hulu	2022	6,87	16101,22	142685801370	642947308000	326332145577	0,09
Kep. Meranti	2018	6,39	6310,98	161515867404	403426873000	158755443046	0,07
Kep. Meranti	2019	6,71	6345,49	229925023368	427224133000	197555669150	0,07
Kep. Meranti	2020	6,20	6624,21	150107264567	409248293000	218610841873	0,07
Kep. Meranti	2021	9,30	6730,07	97542847084	406358050000	160349772503	0,06
Kep. Meranti	2022	7,63	6900,12	178532611424	407577804000	172348069625	0,06
Batanghari	2018	8,24	6059,71	59590797381	605739426000	141430445078	0,23
Batanghari	2019	6,93	6417,21	94368877441	627388776000	163938061698	0,13

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Batanghari	2020	8,71	6420,60	40673294324	569633516000	180393385685	0,17
Batanghari	2021	11,04	6889,54	82725361509	559821528000	210296297189	0,11
Batanghari	2022	8,46	8324,33	133413066636	560125901000	219507236579	0,11
Merangin	2018	6,69	4819,13	47046611642	718849295000	194318877142	0,15
Merangin	2019	7,04	4970,85	51358669378	742330942000	239597542930	0,16
Merangin	2020	7,32	5058,82	55383582129	666860141000	228176066269	0,15
Merangin	2021	7,84	5318,39	43920925499	658730208000	220751547287	0,16
Merangin	2022	7,94	5679,83	91821508619	658892837000	205931893617	0,14
Muaro Jambi	2018	6,85	8382,44	49279443200	670341091000	175375563818	0,21
Muaro Jambi	2019	6,70	8779,11	79099642293	699024250000	182662518814	0,21
Muaro Jambi	2020	7,01	8910,56	37612729716	629162056000	173488609584	0,22
Muaro Jambi	2021	7,98	9251,23	45692738969	619495157000	206644886613	0,22
Muaro Jambi	2022	8,02	10352,05	92003768517	620129875000	228585507276	0,20
Sarolangun	2018	9,69	5711,57	71571092793	583152387000	143747196458	0,38
Sarolangun	2019	7,15	5963,77	113184911685	599555685000	211193891759	0,11
Sarolangun	2020	6,07	5931,09	70117416830	536952715000	169603177135	0,11
Sarolangun	2021	5,56	6515,76	78455188716	529163500000	152711249182	0,11
Sarolangun	2022	5,22	7194,05	163540339634	529502380000	193618611246	0,11
Tanjung Jabung Barat	2018	7,36	18777,65	340962107966	506466327157	142753764049	0,08
Tanjung Jabung Barat	2019	7,32	19880,02	489684290397	536177694000	166498906384	0,08
Tanjung Jabung Barat	2020	8,13	19677,27	268641824917	487550827000	176246637961	0,08
Tanjung Jabung Barat	2021	7,69	19913,75	267126296623	479384508000	163528155131	0,08
Tanjung Jabung Barat	2022	7,84	20366,07	564453735450	479788318000	185388443874	0,07
Tanjung Jabung Timur	2018	4,54	12606,62	104794606439	540400531000	196922022086	0,07
Tanjung Jabung Timur	2019	4,51	13120,46	150243586539	564422212000	189167882580	0,07
Tanjung Jabung Timur	2020	4,72	12516,47	84793317713	521920298000	170201426594	0,08
Tanjung Jabung Timur	2021	7,02	12406,26	72615219679	514767343000	201599418952	0,09

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Tanjung Jabung Timur	2022	4,67	12361,54	140738199146	514988353000	226040530967	0,09
Tebo	2018	6,92	5880,22	55431716603	582313417000	129648054971	0,16
Tebo	2019	7,19	6121,51	60020947614	598297279000	160270455017	0,18
Tebo	2020	7,23	6176,50	59997036928	534449531000	143800605546	0,13
Tebo	2021	7,96	6441,73	54295903112	528393374000	200946021148	0,13
Tebo	2022	6,73	6972,15	108586627482	528684400000	245650535667	0,12
Lahat	2018	5,87	6988,48	367439418945	696379856000	221396196527	0,25
Lahat	2019	6,20	7413,03	522469302300	723556689000	279988217333	0,28
Lahat	2020	6,56	7516,07	304779330227	649875559000	205177625209	0,25
Lahat	2021	7,07	8025,24	393192768329	640553208000	245737495674	0,24
Lahat	2022	6,50	8841,92	900464239590	640553208000	274162038034	0,20
Musi Banyuasin	2018	6,96	31221,41	1140595500033	370826979000	258339719486	0,13
Musi Banyuasin	2019	7,27	32544,60	1708793918261	397430383000	304876937420	0,11
Musi Banyuasin	2020	10,00	32252,13	1212965665238	376024938000	332184817761	0,12
Musi Banyuasin	2021	10,75	33253,09	745599377091	372756063000	302933919464	0,11
Musi Banyuasin	2022	10,94	34255,90	1446538588076	374562563000	356582702087	0,11
Musi Rawas	2018	6,04	8571,55	238857767080	639753278000	274429844260	0,16
Musi Rawas	2019	6,70	9078,80	332355395713	662471353000	246498967618	0,19
Musi Rawas	2020	9,38	9081,28	217486916225	594887320000	252806445176	0,43
Musi Rawas	2021	8,75	9226,52	140392334659	586767527000	292255060627	0,21
Musi Rawas	2022	7,56	9509,69	295105390027	587338179000	294290818496	0,18
Muara Enim	2018	9,20	27415,02	425449223197	661337068000	235688695036	0,13
Muara Enim	2019	9,87	29355,14	694750988561	686250571000	268383103183	0,24
Muara Enim	2020	10,10	28764,30	463864249617	613136927000	236012566306	0,14
Muara Enim	2021	8,78	31101,19	420868789067	606450888000	243525675881	0,12
Muara Enim	2022	7,69	34676,89	1090999741841	606756199000	336007679109	0,08
Ogan Komering Ilir	2018	10,61	11952,57	127823654693	1053840757000	369716929562	0,17
Ogan Komering Ilir	2019	7,91	12391,02	130641641533	1080762813000	347421921243	0,22
Ogan Komering Ilir	2020	7,52	12495,65	172332462314	969636496000	256690573285	0,21
Ogan Komering Ilir	2021	7,03	12859,05	115091194126	966478190000	309623462016	0,21
Ogan Komering Ilir	2022	7,40	13286,91	232582333666	967657461000	392338867999	0,25
Banyuasin	2018	6,76	7941,97	125040668207	933631693000	319248731658	0,31

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Banyuasin	2019	8,19	8272,93	255089755486	979541981000	371770283011	0,45
Banyuasin	2020	9,12	8293,28	126784039487	878495803000	341483438395	0,43
Banyuasin	2021	9,99	8642,45	96019145464	873987182000	354892783074	0,45
Banyuasin	2022	9,65	8825,24	219884751538	876013711000	467145543449	0,46
Penukal Abab Lematang Ilir	2018	6,07	2793,28	127950373837	317402008000	152733330695	0,25
Penukal Abab Lematang Ilir	2019	5,56	2957,11	198092105970	325990755000	103366339610	0,26
Penukal Abab Lematang Ilir	2020	5,02	2937,50	117128891254	295503062000	88827606866	0,17
Penukal Abab Lematang Ilir	2021	4,15	2982,99	94064163976	291072818000	86772745321	0,25
Penukal Abab Lematang Ilir	2022	3,72	3060,91	198699605924	291104702000	133844973114	0,25
Musi Rawas Utara	2018	3,27	3945,61	131378100606	383935458000	186721499530	0,14
Musi Rawas Utara	2019	3,69	4099,54	222175142890	397354009000	115886089587	0,17
Musi Rawas Utara	2020	5,44	4107,10	113183515242	365295893000	106466475230	0,32
Musi Rawas Utara	2021	5,26	4196,98	115840081343	362017608000	103611820491	0,10
Musi Rawas Utara	2022	4,33	4383,33	263869764430	362621650000	138096886215	0,15
Bengkulu Utara	2018	10,25	2366,79	25787108982	625035467000	178507519724	0,20
Bengkulu Utara	2019	5,85	2459,28	45588797927	643623488000	236116336099	0,17
Bengkulu Utara	2020	6,56	2471,69	22259308393	588327285000	255568903856	0,17
Bengkulu Utara	2021	8,01	2597,25	29150891927	579751729000	254305038188	0,16
Bengkulu Utara	2022	6,36	2668,52	82991667870	580035368000	202885003392	0,16
Kaur	2018	4,94	1176,89	6267622658	435518398000	102413423004	0,29
Kaur	2019	6,69	1214,09	17043749331	453279047000	154602058752	0,28
Kaur	2020	6,84	1216,57	4969370154	413916220000	140119474480	0,20
Kaur	2021	5,12	1245,08	7700890187	408155458000	167627461842	0,20
Kaur	2022	4,08	1291,83	16844331563	408812452000	146110652743	0,19
Seluma	2018	6,50	1431,52	8616825302	497868275000	165274694591	0,26
Seluma	2019	6,61	1470,48	19412832450	519867852000	241858440409	0,32
Seluma	2020	7,30	1474,56	6194695534	475498288000	166092835243	0,22
Seluma	2021	3,91	1493,57	8595674633	468190986000	189479900195	0,23

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Seluma	2022	3,49	1527,50	20334508609	468688044000	176829116043	0,23
Mukomuko	2018	10,10	1484,68	6099702368	492253329623	118315585553	0,40
Mukomuko	2019	8,65	1530,81	14625665163	503012826000	167742015616	0,22
Mukomuko	2020	9,65	1546,25	6888492744	457001337000	156145828246	0,22
Mukomuko	2021	6,28	1579,95	9085763780	452497926000	124784416534	0,25
Mukomuko	2022	6,28	1648,40	18756598251	452918047000	149574162404	0,36
Lebong	2018	5,31	932,63	7420752132	405048287000	94531189096	0,21
Lebong	2019	3,76	960,30	18888959600	417398620000	121706166297	0,17
Lebong	2020	2,93	963,47	5888756836	376400126000	128992296558	0,15
Lebong	2021	2,48	990,70	8023733485	370404471000	119333837117	0,19
Lebong	2022	2,50	1023,54	18509412346	370515620000	126648660662	0,20
Bengkulu Tengah	2018	3,17	1249,27	27451038486	429990059527	117192906321	0,19
Bengkulu Tengah	2019	2,88	1295,13	57178024079	448960420000	142480897319	0,20
Bengkulu Tengah	2020	3,02	1273,53	20896787814	407865706000	130569534940	0,17
Bengkulu Tengah	2021	3,05	1290,21	30606043838	400325463000	118761788637	0,16
Bengkulu Tengah	2022	2,89	1334,08	66242053824	400452040000	174083269527	0,16
Lampung Barat	2018	4,49	2477,33	12922139039	521743958000	307395275747	0,18
Lampung Barat	2019	5,82	2503,06	11499169094	543777950000	236540622886	0,19
Lampung Barat	2020	6,06	2497,09	8013286100	497587974000	193523163066	0,17
Lampung Barat	2021	7,10	2496,85	7999535995	491712483000	175552404321	0,17
Lampung Barat	2022	6,86	2518,43	17581539774	492394862000	226828356880	0,17
Lampung Timur	2018	6,10	17502,08	44454946251	1069168109000	355380212579	0,14
Lampung Timur	2019	6,92	17670,70	25165342140	1106577701000	329892986445	0,15
Lampung Timur	2020	7,62	17129,84	16247432037	1007072973000	320004675425	0,15
Lampung Timur	2021	7,55	16640,47	20661832550	996513649000	370744261521	0,15
Lampung Timur	2022	9,41	16215,99	50558508982	996893721000	431300712205	0,15
Tulang Bawang	2018	5,46	5933,30	12984905132	612112587000	256723192931	0,09
Tulang Bawang	2019	6,93	6003,91	5119623481	639431562000	161047325767	0,11
Tulang Bawang	2020	7,82	6041,81	7818456910	577189919000	182480900834	0,11
Tulang Bawang	2021	9,03	6042,35	7504693150	570870961000	172761333345	0,12
Tulang Bawang	2022	10,67	6076,39	17318125995	571687479000	250341871999	0,14
Waykanan	2018	4,10	3618,27	13724222749	655518878000	337441152282	0,14
Waykanan	2019	4,46	3679,15	5462020707	681902953000	290795273015	0,14

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Waykanan	2020	5,01	3705,26	8072882312	621970133000	244431794888	0,12
Waykanan	2021	5,40	3711,12	10266303022	615994048000	250259668902	0,13
Waykanan	2022	5,87	3831,98	19076325219	616918686000	312949934815	0,12
Pesawaran	2018	4,53	4790,08	13389806645	669276831000	250821838688	0,16
Pesawaran	2019	5,13	4848,44	5534852410	684210957000	197762502662	0,18
Pesawaran	2020	5,66	4851,72	7951816894	619834916000	219919178843	0,18
Pesawaran	2021	6,61	4788,85	8220958464	611838446000	222799293765	0,17
Pesawaran	2022	6,70	4867,25	17839987196	611838446000	254799700579	0,20
Mesuji	2018	3,93	2925,01	13195118519	446272067000	138886646742	0,09
Mesuji	2019	5,10	2956,59	6304256571	455225458000	161963038421	0,11
Mesuji	2020	6,18	2975,43	8270644036	407710506000	131884635306	0,19
Mesuji	2021	6,72	2981,48	8756414358	403336470000	162400273542	0,20
Mesuji	2022	8,04	2996,80	17725535642	403974381000	182693762919	0,20
Pesisir Barat	2018	3,03	1647,59	12866687501	417316170000	133816358062	0,15
Pesisir Barat	2019	3,53	1668,43	4858957779	435029435000	140222570863	0,15
Pesisir Barat	2020	3,45	1668,79	7865096791	404769066000	142967686310	0,15
Pesisir Barat	2021	3,58	1657,22	7419669425	401447632000	140467101497	0,19
Pesisir Barat	2022	2,18	1614,06	17150394563	402002138000	130415469171	0,19
Blora	2018	9,58	8377,74	17015980402	926682649031	333004046384	0,22
Blora	2019	11,02	8329,04	31860675727	966559787000	357642115499	0,24
Blora	2020	14,08	7790,54	19938687969	871294279000	286602728815	0,23
Blora	2021	14,67	8093,36	10201703128	863598364000	391222788754	0,20
Blora	2022	14,97	7851,16	23032921356	863598364000	405535482662	0,21
Bangkalan	2018	9,80	9352,92	74403438039	968770449680	260696538242	0,21
Bangkalan	2019	11,25	8933,99	78480610465	1024441794080	340845604225	0,21
Bangkalan	2020	10,89	8301,60	66384258891	933519578000	273856915894	0,20
Bangkalan	2021	11,94	7559,02	65622501432	933349617000	317849699619	0,20
Bangkalan	2022	12,70	6794,80	89060295798	933349619000	466366405582	0,21
Sampang	2018	7,97	6965,90	67465013364	825443163000	279475126533	0,12
Sampang	2019	9,10	6653,81	61747948962	865298361000	305329741173	0,12
Sampang	2020	9,99	6737,47	45728684159	784115868000	249579934277	0,14
Sampang	2021	7,40	6553,41	64065223483	781832940000	285637788205	0,15
Sampang	2022	9,79	6498,39	88215851851	782215299000	374827537427	0,16
Sumenep	2018	8,28	13696,05	70116679712	1144489870000	318164202097	0,10
Sumenep	2019	9,79	12942,04	77329053125	1183078444000	332905805753	0,10
Sumenep	2020	11,23	12971,71	35635606715	1090899516000	301365996620	0,10

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Sumenep	2021	10,50	13033,36	65692492642	1081877188000	352140087153	0,11
Sumenep	2022	10,27	13109,51	104388218491	1082451781000	422208576283	0,12
Ketapang	2018	8,78	7619,06	41835407183	1122269534000	335157692404	0,40
Ketapang	2019	8,22	8246,63	40871966840	1149675156000	495441516752	0,37
Ketapang	2020	10,23	8737,97	73809587022	1040646678000	380331046304	0,46
Ketapang	2021	11,12	9287,48	206104697642	1032254019000	425580889768	0,52
Ketapang	2022	9,64	9557,20	259219056368	1034131410000	403853840205	0,34
Sanggau	2018	7,48	5301,55	30894092479	824217941000	280489089182	0,28
Sanggau	2019	7,11	5587,28	47671401845	841905919000	327846526304	0,20
Sanggau	2020	7,75	6034,74	45118445900	747178578000	221657560858	0,19
Sanggau	2021	7,81	6288,01	153493737979	740408943000	230016574173	0,20
Sanggau	2022	9,27	6517,47	224875963698	741779049000	247627728245	0,27
Sekadau	2018	6,67	1674,01	5204342771	504548895000	150505334115	0,45
Sekadau	2019	5,17	1763,14	6292631817	515570134000	121258489226	0,18
Sekadau	2020	5,28	1824,33	7124118038	467314451000	107593545846	0,19
Sekadau	2021	5,18	1921,43	26930849681	463850905000	111877316873	0,19
Sekadau	2022	5,86	2014,00	29296892554	464250612000	147093798718	0,19
Barito Utara	2018	6,35	4063,84	121298995124	559665616000	162376186859	0,13
Barito Utara	2019	5,93	4245,93	186391352662	573285753000	203840576160	0,15
Barito Utara	2020	6,65	3982,68	138330393486	510002173000	169218213689	0,18
Barito Utara	2021	8,43	4081,62	176820351019	501059339000	179782658871	0,16
Barito Utara	2022	8,00	4379,51	490659357591	501624803000	219659869024	0,14
Lamandau	2018	10,66	1590,51	41513381213	462248605000	95832653032	1,22
Lamandau	2019	8,31	1701,09	56674100415	472674527000	95468015700	0,30
Lamandau	2020	6,36	1701,86	54181217585	425762854000	109885087448	0,25
Lamandau	2021	10,49	1765,89	63468448657	419461340000	101661234356	0,73
Lamandau	2022	9,72	1832,01	144864974773	420223849000	126728679495	0,34
Gunung Mas	2018	4,22	1443,79	40220167102	559898689000	180921429482	0,28
Gunung Mas	2019	7,29	1550,45	54738814481	575943522000	152055556996	0,82
Gunung Mas	2020	6,67	1611,67	51587932581	518013421000	145606550883	0,50
Gunung Mas	2021	7,89	1650,60	64923294353	511024197000	185068727649	0,65
Gunung Mas	2022	7,21	1741,41	139492795080	511464950000	199782397469	0,38
Murung Raya	2018	4,87	3756,14	121741543643	667654598000	185940755229	0,14
Murung Raya	2019	6,66	3951,56	131510313523	684505504000	134718512793	0,26
Murung Raya	2020	6,48	3682,88	154135864949	621599287000	130212328117	0,18
Murung Raya	2021	8,51	3864,16	192657020107	615246747000	154076142667	0,23

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Murung Raya	2022	5,10	4188,20	537270103091	616067644000	180863392676	0,16
Barito Timur	2018	5,51	3104,18	52966127133	478975191000	117705864742	0,16
Barito Timur	2019	6,33	3252,52	71338193005	491080267000	142758313147	0,20
Barito Timur	2020	7,05	3051,59	66326559926	443711145000	120340229181	0,27
Barito Timur	2021	10,23	3127,88	63838620385	437087627000	156726238644	0,14
Barito Timur	2022	8,22	3347,75	170396082227	437443208000	128814871018	0,11
Kotabaru	2018	9,17	7162,76	174922522213	612929409000	167498841495	0,28
Kotabaru	2019	8,19	7406,40	289015724297	637069672000	211423518664	0,26
Kotabaru	2020	9,55	7314,01	202337413487	590032258000	170710181092	0,25
Kotabaru	2021	12,60	7524,72	164441821662	582990513000	279646903012	0,23
Kotabaru	2022	11,48	7841,24	678960616677	584509383000	215041988085	0,37
Tabalong	2018	11,64	8898,51	276099824362	494109854000	152343418702	0,38
Tabalong	2019	11,19	9001,65	434981977779	517978293000	203887185523	0,41
Tabalong	2020	11,49	8662,17	363882079966	457489788000	156802040347	0,38
Tabalong	2021	13,29	8801,28	228405254057	451421653000	172358639684	0,35
Tabalong	2022	11,99	9250,31	903346964193	451421653000	168911088949	0,26
Tapin	2018	7,69	3369,02	262830476936	448697311000	134346921703	0,26
Tapin	2019	7,13	3498,42	452697704438	477467034000	149160928041	0,50
Tapin	2020	8,33	3397,91	231458925896	421844570000	144621778332	0,20
Tapin	2021	10,10	3506,07	179271637064	416699835000	159443759714	0,31
Tapin	2022	5,41	3683,17	823751332979	416699835000	161827625090	0,21
Tanah Bumbu	2018	11,69	8833,54	441004916411	457578219000	170017213906	0,37
Tanah Bumbu	2019	7,78	8982,05	778972227213	484587750000	238510901430	0,32
Tanah Bumbu	2020	10,42	8833,39	442874822012	435828658000	208789757537	0,29
Tanah Bumbu	2021	9,51	9014,45	377016628504	428237770000	245140112458	0,22
Tanah Bumbu	2022	7,88	9478,51	1437446531404	428237770000	233768378599	0,22
Berau	2018	9,07	21428,94	848392350462	561401129000	185757595993	0,17
Berau	2019	7,81	20398,27	1258460957445	596930629000	200565708316	0,19
Berau	2020	9,90	19509,71	890043185568	556588497000	138112664178	0,17
Berau	2021	11,99	20752,06	621150127686	546329788000	179289092596	0,16
Berau	2022	9,31	21428,94	2447631290308	547451781000	155714337238	0,17
Kutai Barat	2018	4,80	13602,86	720953272569	600687747000	119348431316	0,08
Kutai Barat	2019	6,60	14353,65	1099066598768	618522771000	145648920489	0,15
Kutai Barat	2020	6,64	13879,60	853956738215	555082677000	136020019397	0,19
Kutai Barat	2021	7,22	14503,32	600566805542	544622975000	104813870622	0,11
Kutai Barat	2022	3,83	15044,52	2218568173945	544622975000	102321983099	0,05

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Kutai Timur	2018	4,58	79167,61	1369165385570	552776510000	158879642260	0,05
Kutai Timur	2019	5,24	85978,31	2079293376189	584855941000	196843517793	0,08
Kutai Timur	2020	6,13	83014,30	1551794400347	570247961000	241799913212	0,10
Kutai Timur	2021	8,12	81993,69	1103487967593	558995500000	193855892862	0,07
Kutai Timur	2022	5,32	86250,94	4368414819491	560135883000	305841573358	0,05
Paser	2018	7,26	28969,76	761308544258	386808566963	151266217629	0,07
Paser	2019	6,27	30005,64	1020158902615	410681304000	182884622708	0,10
Paser	2020	7,21	28995,66	924485152655	382202549000	166236996822	0,08
Paser	2021	12,12	30842,74	532641081694	376294804000	219229640674	0,09
Paser	2022	5,91	30936,68	2132908191900	376914440000	222831328683	0,05
Penajam Paser Utara	2018	5,71	3489,44	496807515659	259192257000	118631268563	0,22
Penajam Paser Utara	2019	5,82	3532,16	797835562975	278328579000	107374142956	0,25
Penajam Paser Utara	2020	6,63	3386,57	489452697046	275868751000	106308830211	0,25
Penajam Paser Utara	2021	7,19	3082,25	341384106494	271407999000	133784249165	0,25
Penajam Paser Utara	2022	7,13	3137,97	1349634178257	272437796000	115873343754	0,35
Mahakam Ulu	2018	1,40	1409,51	478569984865	470722849000	76368544292	0,03
Mahakam Ulu	2019	1,23	1476,06	687192841979	497410048000	95059252321	0,11
Mahakam Ulu	2020	1,69	1473,63	543118673033	451971660000	60282914194	0,20
Mahakam Ulu	2021	2,85	120,48	339355445551	443010427000	97409457024	0,41
Mahakam Ulu	2022	0,95	1468,01	1247729294038	443038268000	51798133950	0,07
Bolaang Mongondow	2018	4,24	2599,65	7196856899	556612417000	206410223418	0,23
Bolaang Mongondow	2019	6,00	2692,26	13042986595	571375460000	179641464851	0,45
Bolaang Mongondow	2020	6,62	2748,00	15685224364	518152776000	149169610743	0,47
Bolaang Mongondow	2021	5,93	2816,48	52543855850	511050953000	126415532296	0,42
Bolaang Mongondow	2022	5,58	2963,82	67260004075	511266733000	200115712451	0,40
Kep Talaud	2018	2,89	666,71	6720665755	488339366000	139669923500	0,30
Kep Talaud	2019	3,52	688,59	6476517312	508329424000	163999763254	0,33

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Kep Talaud	2020	4,60	701,18	5349886804	465379648000	126707982570	0,27
Kep Talaud	2021	4,23	726,66	16400476701	458054356000	194420424997	0,28
Kep Talaud	2022	3,85	777,97	23243406040	458306668000	242370631561	0,28
Minahasa Utara	2018	10,92	3279,06	13550443091	496136006000	131495165367	0,39
Minahasa Utara	2019	10,31	3533,11	17207900868	519367219000	188115520314	0,46
Minahasa Utara	2020	8,03	3594,46	13228582137	472542815000	146140163179	0,32
Minahasa Utara	2021	10,29	3790,71	52571765588	468182610000	133876548774	0,34
Minahasa Utara	2022	9,87	3947,74	78921898958	468182610000	225790169357	0,39
Bolaang Mongondow Utara	2018	2,37	872,26	6923528830	384772383000	140988642599	0,20
Bolaang Mongondow Utara	2019	3,60	924,36	7164552783	392676997000	130313084941	0,21
Bolaang Mongondow Utara	2020	4,07	946,71	5086236779	353070985000	125444416340	0,16
Bolaang Mongondow Utara	2021	2,96	966,54	16859877635	348446042000	152552832637	0,18
Bolaang Mongondowtara	2022	1,85	1022,31	23569690224	348896970000	181255992380	0,20
Bolaang Mongondow Timur	2018	2,48	1165,43	10663377164	341807077000	129408162373	0,20
Bolaang Mongondow Timur	2019	3,24	1187,70	6439427421	357676719000	93837039789	0,20
Bolaang Mongondow Timur	2020	2,29	1176,12	6758922141	328466686000	130803488848	0,16
Bolaang Mongondow Timur	2021	2,40	1207,98	18050329674	324042794000	75590294650	0,18
Bolaang Mongondow Timur	2022	2,42	1270,34	27457081774	324405495000	75989336691	0,22
Bolaang Mongondow Selatan	2018	3,02	553,31	16806459711	349643086000	106573164734	0,24
Bolaang Mongondow Selatan	2019	3,06	593,95	18736268310	364595503000	89048572390	0,27

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Bolaang Mongondow Selatan	2020	2,52	605,22	9605734752	332263730000	122401026501	0,21
Bolaang Mongondow Selatan	2021	2,09	619,65	36378807939	328079469000	115539054584	0,18
Bolaang Mongondow Selatan	2022	3,36	654,63	42342290243	328616753000	75918486047	0,25
Banggai	2018	7,31	8646,96	217006961648	869604156000	249050528494	0,16
Banggai	2019	8,74	9281,08	136632455828	901030313000	269797765532	0,19
Banggai	2020	8,06	9244,25	295976489851	818466344000	246379714319	0,19
Banggai	2021	9,00	9362,35	300162450672	805938719000	250349401163	0,21
Banggai	2022	9,02	9952,02	446014699896	805938719000	273508534971	0,15
Banggai Kep	2018	2,92	1281,90	20904492042	465346799000	164512996173	0,16
Banggai Kep	2019	3,76	1325,44	15251958244	490735851000	204085892460	0,18
Banggai Kep	2020	4,38	1288,75	31684894751	444960480000	144936735341	0,13
Banggai Kep	2021	3,92	1342,31	46385537027	440660646000	175078703445	0,14
Banggai Kep	2022	4,09	1403,70	70925842825	441263415000	125496128835	0,14
Buol	2018	7,24	1997,13	22361710956	528033354000	192891578885	0,13
Buol	2019	6,21	2011,88	16911294305	545085183000	192625926923	0,14
Buol	2020	7,02	1980,60	30792577592	483685300000	178213696616	0,11
Buol	2021	6,10	2104,01	46930950629	477402532000	172900882170	0,10
Buol	2022	6,39	2181,30	77266220722	477755362000	138034901545	0,10
Donggala	2018	5,16	4421,38	21157544463	659731826000	207662219147	0,25
Donggala	2019	4,39	4624,27	17198126743	699139595000	341543376918	0,31
Donggala	2020	8,37	4384,47	30901184006	624939920000	272032285775	0,28
Donggala	2021	5,04	4606,06	46612991743	618899454000	309246635062	0,20
Donggala	2022	5,52	4823,37	70871040070	619609701000	278394051632	0,24
Parigi Moutong	2018	10,98	5697,63	22396264025	749704872000	290626082739	0,09
Parigi Moutong	2019	10,60	5897,94	18942884451	786953211000	390256621976	0,09
Parigi Moutong	2020	8,09	5563,05	31275628141	727263874000	347085243448	0,10
Parigi Moutong	2021	7,93	5770,43	47037163623	718721702000	310843020857	0,09
Parigi Moutong	2022	7,53	5901,09	71828203194	720186220000	382554566213	0,11
Sigi	2018	4,45	3059,07	21017336647	634133821000	244935609690	0,12
Sigi	2019	3,39	3103,94	15506752816	649629922000	240155352180	0,11
Sigi	2020	5,78	3062,72	31815741713	587639413000	202126998382	0,14
Sigi	2021	6,49	3181,54	46382798279	578721561000	255512888637	0,16

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Sigi	2022	6,42	3268,50	76351553984	579175622000	264135821786	0,23
Banggai Laut	2018	3,58	965,25	20990401093	397037063000	88799346787	0,24
Banggai Laut	2019	4,00	994,20	15298992573	414882484000	83952941948	0,24
Banggai Laut	2020	4,10	937,02	31688460554	389292460000	88886565498	0,25
Banggai Laut	2021	3,57	964,91	46398527996	385546396000	62514149806	0,20
Banggai Laut	2022	3,90	999,41	70606351788	386229968000	80083531822	0,21
Morowali Utara	2018	5,67	5422,88	26553155780	558773483000	206738086961	0,15
Morowali Utara	2019	4,01	5723,70	36771835472	583567690000	232057027082	0,07
Morowali Utara	2020	5,06	5750,91	34912583959	539257727000	234186253050	0,09
Morowali Utara	2021	9,57	6196,17	79422413756	532725535000	169258790411	0,09
Morowali Utara	2022	7,00	8350,98	152672015482	533286782000	197080707339	0,08
Bone	2018	9,52	10597,77	4899170095	1070426493000	454581140617	0,15
Bone	2019	9,43	10987,97	6525980305	1116830949000	474305128600	0,15
Bone	2020	11,47	10902,42	5766343197	1000527318000	430225154356	0,15
Bone	2021	7,70	11668,90	8514850856	995519760000	459241546381	0,15
Bone	2022	9,47	12244,60	15190350371	996360633000	487825919796	0,16
Enrekang	2018	6,51	1794,28	4428446951	534335959000	228774951421	0,16
Enrekang	2019	6,88	1878,43	5599653991	565009533000	204452883974	0,14
Enrekang	2020	7,11	1884,00	5068006086	505093860000	204607421036	0,17
Enrekang	2021	7,17	2063,92	7715982946	496423534000	238284297830	0,16
Enrekang	2022	9,18	2085,05	13482086669	496696804000	210176746241	0,18
Jeneponto	2018	7,59	2964,82	4342990765	627644516000	296771322098	0,15
Jeneponto	2019	7,46	3004,49	5477442385	674702522000	336370331084	0,17
Jeneponto	2020	8,69	2978,55	5045179470	613992950000	248740858802	0,16
Jeneponto	2021	8,11	3079,40	7698575859	604718144000	263702078559	0,17
Jeneponto	2022	8,67	2984,36	13437394801	604867921000	268186188024	0,18
Luwu	2018	8,08	4778,31	5364733091	680212384000	226035056309	0,16
Luwu	2019	7,72	4974,56	7182241950	718676594000	314551569660	0,16
Luwu	2020	8,48	4994,05	4472648300	652082657000	279388309186	0,15
Luwu	2021	9,43	5254,77	8729055623	647227070000	275484792523	0,15
Luwu	2022	9,78	5516,60	15138524508	647617174000	336874095625	0,16
Luwu Utara	2018	8,83	3857,81	4915566810	655693773000	255514760202	0,16
Luwu Utara	2019	9,29	3955,32	6468846962	685900676000	224123128333	0,18
Luwu Utara	2020	7,94	3875,52	7128180538	619965494000	219452800401	0,17
Luwu Utara	2021	9,31	4083,61	8766967104	616768825000	231025131633	0,17
Luwu Utara	2022	7,44	4216,90	15682209692	617420659000	264290521561	0,17

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Pinrang	2018	10,19	5785,97	4346022479	693794315000	250453739206	0,14
Pinrang	2019	10,25	5997,23	5480327482	744790264000	217211012181	0,15
Pinrang	2020	9,99	6019,68	5045039651	673175379000	240622430395	0,16
Pinrang	2021	10,54	6330,81	7699189485	661435610000	227911045465	0,16
Pinrang	2022	11,71	6424,01	13445001926	661435610000	347671378006	0,18
Sinjai	2018	8,38	3026,22	4349076173	585911082000	262570872744	0,16
Sinjai	2019	9,00	3162,85	6382040002	611802671000	244163438379	0,15
Sinjai	2020	8,80	3139,22	4197562690	551234025000	253327899175	0,13
Sinjai	2021	7,98	3342,01	7706735112	541941442000	350733376194	0,13
Sinjai	2022	8,79	3518,92	13450200435	542287308000	299169389453	0,12
Kep Selayar	2018	6,12	1529,87	5388498847	580780803000	232128162002	0,16
Kep Selayar	2019	7,31	1645,76	5544033606	600422533000	176621198607	0,14
Kep Selayar	2020	6,74	1531,02	5057137927	565134101000	172722177817	0,12
Kep Selayar	2021	5,36	1582,18	7701869671	560147323000	198113992988	0,14
Kep Selayar	2022	5,33	1625,15	13442175890	560595329000	252536518735	0,16
Takalar	2018	10,85	3053,82	4342679247	595466518000	256130933270	0,39
Takalar	2019	9,22	3224,95	5476966891	627235384000	210015184395	0,18
Takalar	2020	11,96	3179,31	5044675417	574658219000	172153517733	0,34
Takalar	2021	11,06	3407,36	7700344503	564934568000	200186097056	0,22
Takalar	2022	8,82	3526,27	13494051467	564934568000	268927735209	0,19
Wajo	2018	9,52	5970,50	23349400970	714224148000	280429998297	0,19
Wajo	2019	9,02	6070,63	38637760806	753977048000	266849220454	0,19
Wajo	2020	9,99	5929,80	11435316560	676935175000	279228078567	0,19
Wajo	2021	10,21	6396,93	34009542642	668045435000	335960065172	0,18
Wajo	2022	9,66	6460,69	31234586641	668126385000	359560603630	0,20
Buton	2018	3,50	1578,23	10300657042	424357645000	182974007913	0,11
Buton	2019	3,84	1647,32	20260418552	440488714000	145587436917	0,10
Buton	2020	4,10	1640,38	19024526991	400048470000	138828487869	0,08
Buton	2021	4,45	1658,10	47086510383	394867827000	201931713300	0,09
Buton	2022	4,64	1777,17	94493069276	395460748000	151927462731	0,09
Kolaka	2018	8,76	11160,68	85045559859	582742370000	167763941686	0,11
Kolaka	2019	8,73	11962,79	154544637153	611181698000	220977833697	0,14
Kolaka	2020	9,64	11335,87	105747240119	550288497000	207281202630	0,14
Kolaka	2021	9,35	11557,88	157913450286	542631257000	244602888406	0,14
Kolaka	2022	12,18	11765,00	412494926077	542631257000	191939457471	0,20
Konawe Selatan	2018	4,60	3974,48	29723216498	666731360000	248877062901	0,16

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Konawe Selatan	2019	4,67	4283,86	56956564687	694858872000	261966199559	0,17
Konawe Selatan	2020	4,74	4206,46	50482201655	673726247000	241474137788	0,16
Konawe Selatan	2021	5,53	4377,81	105325503420	661510848000	293287874882	0,19
Konawe Selatan	2022	5,61	4478,15	243075595649	661712484000	239589384443	0,29
Bombana	2018	7,81	2587,25	23195023877	482294441000	132453388634	0,11
Bombana	2019	5,06	2752,25	50633485122	504111937000	206427390010	0,16
Bombana	2020	5,85	2749,70	67806461988	455101409000	216017647821	0,16
Bombana	2021	5,33	2794,94	170819685304	449216017000	196881069313	0,19
Bombana	2022	6,64	2934,41	290119634557	449798400000	176733321195	0,19
Wakatobi	2018	4,10	1204,71	9279754219	463652327000	204709145524	0,20
Wakatobi	2019	3,96	1281,38	12569704735	480585457000	245187686783	0,17
Wakatobi	2020	4,23	1304,59	24327436716	446456905000	197577330375	0,14
Wakatobi	2021	4,62	1349,92	44862295509	439035399000	214066018019	0,13
Wakatobi	2022	4,20	1429,97	90627837469	439094930000	214086763039	0,15
Kolaka Utara	2018	5,59	3578,88	10751388118	475754194000	120905705029	0,08
Kolaka Utara	2019	5,51	3779,34	23112839894	505030640000	126493679261	0,07
Kolaka Utara	2020	6,02	3764,99	21670309334	460597099000	136242811049	0,07
Kolaka Utara	2021	6,73	3761,56	71902605618	454486050000	169645240106	0,08
Kolaka Utara	2022	5,95	3929,75	153384394601	455008254000	144205707894	0,08
Konawe Utara	2018	2,01	1651,42	37181166995	454226840000	124059735478	0,07
Konawe Utara	2019	2,02	1761,82	86577671422	471019248000	160032398858	0,08
Konawe Utara	2020	3,39	1731,85	104875117002	428934559000	111468466648	0,30
Konawe Utara	2021	3,01	1787,57	364680518036	421367680000	132735471429	0,13
Konawe Utara	2022	2,82	1881,89	543591417659	421367680000	128638057283	0,17
Buton Utara	2018	2,40	938,99	9274130258	410109235000	111341616173	0,10
Buton Utara	2019	3,58	988,77	19013743500	428779562000	101389291573	0,18
Buton Utara	2020	3,24	1010,78	18091553227	391697518000	95054193322	0,10
Buton Utara	2021	3,29	1027,48	44982133408	384899292000	130406436708	0,09
Buton Utara	2022	2,84	1077,39	90686902129	385010964000	126514578106	0,10
Konawe Kep	2018	2,93	654,55	9365725211	315499213000	91377903711	0,09
Konawe Kep	2019	1,89	708,00	19550233341	333934943000	109426430933	0,15
Konawe Kep	2020	1,97	700,75	17168188881	304961922000	75847689878	0,08
Konawe Kep	2021	2,00	702,12	46149681279	300021707000	125234466616	0,09
Konawe Kep	2022	1,85	726,28	91350585303	300065908000	91087334072	0,13
Kolaka Timur	2018	5,96	1591,48	9240778301	402711812000	96732158509	0,15
Kolaka Timur	2019	3,48	1691,12	12703194573	418519936000	129890679539	0,12

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Kolaka Timur	2020	3,49	1667,12	27019568164	383189558000	122816955020	0,12
Kolaka Timur	2021	3,46	1704,53	55248191024	378525998000	117704219240	0,12
Kolaka Timur	2022	2,77	1802,87	84497042500	379028144000	119816859896	0,09
Muna Barat	2018	5,48	828,84	9234892601	356862831000	119238946228	0,14
Muna Barat	2019	4,89	877,73	12570000830	373220267000	144773747990	0,16
Muna Barat	2020	2,85	887,80	24111021858	338976556000	126374842513	0,14
Muna Barat	2021	2,52	927,32	45130911109	336737689000	150678824169	0,14
Muna Barat	2022	2,79	974,87	90627837469	336932590000	138134347894	0,13
Buton Tengah	2018	5,00	704,04	9246613474	358696369000	156709766310	0,15
Buton Tengah	2019	2,89	725,94	12617735421	374679501000	95027618343	0,15
Buton Tengah	2020	3,11	779,95	24203276820	342875036000	100733901019	0,14
Buton Tengah	2021	2,72	795,39	66042878570	339470931000	120337637906	0,16
Buton Tengah	2022	2,77	837,82	113976627069	340057923000	143613571618	0,18
Buton Selatan	2018	4,49	1172,36	9312182194	343792777000	125031358075	0,06
Buton Selatan	2019	2,43	1209,78	18970994419	368867801000	101371972231	0,05
Buton Selatan	2020	3,22	1181,95	17929997944	336333934000	113396265417	0,07
Buton Selatan	2021	3,36	1181,37	45591421132	334882640000	104722962879	0,08
Buton Selatan	2022	3,63	1234,60	90587587172	335320148000	102140570125	0,09
Bima	2018	6,90	3839,63	19377944945	876388641503	416530293427	0,14
Bima	2019	7,50	3954,71	20595041147	909112358000	411059584158	0,14
Bima	2020	7,54	3915,24	13718791876	832124683000	387429358668	0,12
Bima	2021	7,98	3959,38	22235264841	832682655000	395518101761	0,12
Bima	2022	6,82	4019,51	56535507799	833301560000	454284842181	0,13
Sumbawa Barat	2018	6,16	10876,35	227090931180	400229072000	169726258778	0,14
Sumbawa Barat	2019	7,14	10610,50	120810969226	417480922000	181519380126	0,15
Sumbawa Barat	2020	12,66	14387,95	114639148743	373292334000	98753861965	0,24
Sumbawa Barat	2021	13,40	14264,60	180612120995	370668794000	161738798228	0,37
Sumbawa Barat	2022	8,24	18127,73	460793345145	371041136000	176294444335	0,23
Timteng Selatan	2018	4,91	2063,22	1323446242	747723272000	301043603693	0,16
Timteng Selatan	2019	5,16	2136,93	2584594116	771270719000	266360091907	0,15
Timteng Selatan	2020	4,48	2121,67	2011548618	704510671000	267320330267	0,16
Timteng Selatan	2021	4,79	2209,05	2666914981	705697225000	222753563023	0,17
Timteng Selatan	2022	2,60	2310,02	3596140194	706597159000	367770345883	0,16
Nagekeo	2018	4,43	698,54	771495651	432406320000	119884445535	0,19
Nagekeo	2019	3,92	715,12	807126466	454351825000	182975127530	0,18
Nagekeo	2020	4,23	716,96	934237265	412477821000	152262450165	0,18

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Nagekeo	2021	4,75	735,84	1920763620	407222571000	127384283380	0,21
Nagekeo	2022	4,65	767,13	2400005514	407517873000	147823133047	0,22
Seram Timur	2018	2,64	1093,42	1502753823	530650657000	168884101312	0,20
Seram Timur	2019	2,64	1074,41	2684567315	546132364325	212871735834	0,26
Seram Timur	2020	2,70	1080,67	10792726086	504379471000	139109637964	0,21
Seram Timur	2021	3,51	1068,98	10548801631	500895943000	199726927924	0,19
Seram Timur	2022	1,64	1092,25	16744431185	502009628000	218134543399	0,18
Kep Aru	2018	5,93	1235,67	1291331594	580686128000	245644477961	0,13
Kep Aru	2019	6,44	1306,30	2162511988	599932666000	163463954264	0,13
Kep Aru	2020	6,54	1331,53	3906913330	557767648000	88882778543	0,13
Kep Aru	2021	4,79	1380,40	4210130054	554228862000	137818677054	0,14
Kep Aru	2022	3,63	1467,49	5934357029	555383670000	194002708974	0,13
Paniai	2018	1,93	1488,03	48300796583	586036724000	187487053110	0,00
Paniai	2019	2,06	1514,05	41011965046	602676189000	145631186646	0,01
Paniai	2020	2,15	1534,53	27375716746	541513699000	211677817256	0,02
Paniai	2021	1,62	1559,52	28310135283	538889485000	204800190599	0,04
Paniai	2022	1,53	1606,41	100345398503	538889485000	190131701799	0,02
Halmahera Timur	2018	8,24	1061,06	36205099141	476196126000	98759437040	0,36
Halmahera Timur	2019	6,14	1127,34	51477046101	486927206000	180000899133	0,38
Halmahera Timur	2020	6,15	1135,28	50156846064	448081887000	156402913829	0,28
Halmahera Timur	2021	6,31	1324,95	103532031221	443074788000	177115989203	0,20
Halmahera Timur	2022	5,13	1318,59	325328957875	443769351000	220379777101	0,20
Pulau Morotai	2018	4,81	456,01	12920942521	391524047000	142851217542	0,34
Pulau Morotai	2019	4,26	462,20	19758219591	404673835000	232904396935	0,20
Pulau Morotai	2020	3,39	475,20	20246620154	364322788000	197602607108	0,40
Pulau Morotai	2021	4,28	491,09	42026798475	360501070000	215407304094	0,34
Pulau Morotai	2022	2,67	503,81	85268662398	360907950000	294212470991	0,25
Pulau Taliabu	2018	1,59	581,68	17335276062	341053281000	102976849067	0,18
Pulau Taliabu	2019	1,08	640,05	41618605604	356662296000	127792846902	0,13
Pulau Taliabu	2020	4,01	648,03	39968771277	331028307000	118971178027	0,31
Pulau Taliabu	2021	2,65	768,98	67898633034	328264221000	115445631029	0,11
Pulau Taliabu	2022	1,71	800,83	150432285895	329026044000	117209855346	0,17
Bangka Selatan	2018	5,71	3724,59	70381556654	466182109000	148733631210	0,28

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Bangka Selatan	2019	6,69	3790,64	111883671853	485200992000	152445613102	0,29
Bangka Selatan	2020	6,75	3722,87	42876894940	441031778000	133160794214	0,22
Bangka Selatan	2021	7,21	3827,06	53948943470	434540915000	175740822171	0,29
Bangka Selatan	2022	5,94	3888,82	199131662173	435231369000	190629397014	0,36
Belitung Timur	2018	13,28	2264,25	61458371265	440170882447	100079772515	1,00
Belitung Timur	2019	12,55	2300,62	100574281967	463005627000	104969190630	0,85
Belitung Timur	2020	13,16	2367,21	34378730175	421531947000	97386111542	0,75
Belitung Timur	2021	13,72	2422,87	62977396238	415532093000	90196155840	0,79
Belitung Timur	2022	12,96	2442,76	188997911795	416123631000	110842787935	0,59
Boalemo	2018	6,66	1757,70	758559471	452535801000	209589456124	0,17
Boalemo	2019	8,13	1896,81	816872645	468935433000	186676184213	0,37
Boalemo	2020	6,08	1870,82	848532913	427405431000	153898341795	0,11
Boalemo	2021	6,81	1901,00	1890599374	421838769000	173716173074	0,10
Boalemo	2022	5,55	1934,86	2230118515	422520030000	176448529860	0,11
Pohuwato	2018	5,76	2556,79	1715590579	513389155000	178359374852	0,15
Pohuwato	2019	6,42	2709,69	1648265147	529422948000	207486656118	0,15
Pohuwato	2020	5,33	2672,32	1191250342	487482122000	227785095388	0,12
Pohuwato	2021	8,01	2723,64	2313987047	480943263000	155950052114	0,16
Pohuwato	2022	7,21	2765,06	3326144492	481613630000	182074054834	0,18
Gorontalo Utara	2018	3,87	1132,01	1030277275	402570414000	144151240328	0,25
Gorontalo Utara	2019	4,14	1210,47	808017814	416503866000	158375015136	0,29
Gorontalo Utara	2020	3,51	1208,35	1038862179	380457441000	158575377099	0,17
Gorontalo Utara	2021	3,81	1235,35	2192118423	376906992000	140592285858	0,18
Gorontalo Utara	2022	2,92	1260,14	2429067838	377664009000	207935290450	0,19
Natuna	2018	4,95	12636,70	269738664979	368413963000	100102868329	0,06
Natuna	2019	4,18	12744,59	522533010165	391521681000	166097040783	0,07
Natuna	2020	5,56	12172,71	142606568196	396383552000	86176582546	0,06
Natuna	2021	4,40	12198,39	104492090812	390697487000	117860744528	0,06
Natuna	2022	6,14	12153,85	251523137344	392551408000	116901648421	0,05
Kep Anambas	2018	4,20	10735,70	198656287409	364320074000	102809320682	0,11
Kep Anambas	2019	3,26	10624,70	372249648201	388403719000	183542757358	0,10
Kep Anambas	2020	3,87	9736,69	113666205099	375518805000	74058223149	0,10
Kep Anambas	2021	3,94	9690,99	88383046368	368303160000	88762489609	0,08
Kep Anambas	2022	3,30	9636,90	204305987331	368970082000	80402187642	0,08
Raja Ampat	2018	1,75	1418,62	48979840935	666645462000	164950039083	0,21
Raja Ampat	2019	1,98	1474,00	92311582906	681500674000	233355997289	0,28

WILAYAH	TAHUN	KKD	OP	DBHSDA	DAU	DAK	TR
		(%)	(Miliar Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
Raja Ampat	2020	1,44	1480,12	53491652311	645899909000	165796591845	0,13
Raja Ampat	2021	1,61	1733,71	52046996600	642356495000	142249593570	0,08
Raja Ampat	2022	1,47	2023,90	136198699954	644234374000	238700934681	0,13
Manokwari Selatan	2018	0,94	352,98	44621427663	347705874000	113928830106	0,02
Manokwari Selatan	2019	2,06	360,96	48255812552	354681768000	91070748327	0,08
Manokwari Selatan	2020	0,90	347,18	73208737174	321872833000	53328046296	0,09
Manokwari Selatan	2021	1,86	356,79	24386732142	316998031000	59117435184	0,11
Manokwari Selatan	2022	1,06	364,16	70285130250	317050694000	72124670895	0,19
Pasangkayu	2018	3,97	3045,53	946357391	483136786000	148341483525	0,09
Pasangkayu	2019	5,06	3161,96	761583398	500272722000	166696572180	0,08
Pasangkayu	2020	4,59	3091,40	799877148	459368611000	174634728453	0,09
Pasangkayu	2021	5,07	3159,59	1790094162	453516929000	186396490649	0,09
Pasangkayu	2022	4,99	3194,31	2290557417	453872270000	231866284988	0,09
Mamuju Tengah	2018	7,03	1406,79	738927586	347815396000	136069833276	0,28
Mamuju Tengah	2019	4,55	1493,18	762722222	364029720000	188477960397	0,26
Mamuju Tengah	2020	4,29	1562,80	815379103	335931663000	150400853021	0,26
Mamuju Tengah	2021	5,34	1566,74	1817726028	333663316000	158861148916	0,26
Mamuju Tengah	2022	5,02	1622,25	2225851555	334410183000	159851523238	0,26
Malinau	2018	4,05	4754,72	139126380435	797274656000	123374212863	0,09
Malinau	2019	4,78	5023,59	210266710890	814152557000	153119532547	0,13
Malinau	2020	4,47	4913,64	190589314055	784353307000	145143087736	0,09
Malinau	2021	5,27	5206,39	143614872339	780635100000	113233756516	0,11
Malinau	2022	4,62	5495,48	444838320545	782097116000	99955405518	0,06
Tana Tidung	2018	3,00	2252,93	94618094982	394725005000	42974348710	0,05
Tana Tidung	2019	2,81	2345,17	144387051720	417103576000	54926643822	0,06
Tana Tidung	2020	1,64	2293,96	118222990764	412379208000	77862241125	0,06
Tana Tidung	2021	2,57	2403,58	125991298574	407450064000	48900719176	0,06
Tana Tidung	2022	2,36	2531,18	371346377850	407450064000	43717701140	0,05

Lampiran 2. Hasil Uji Pemilihan Model FD-GMM

a. Estimasi Model FD-GMM

49

```

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation      Number of obs   =      420
Group variable: Wilayah                        Number of groups =      140
Time variable: tahun

Obs per group:
    min =      3
    avg =      3
    max =      3

Number of instruments =      12                Wald chi2(6)    =      82.38
                                                Prob > chi2     =      0.0000

Two-step results

```

	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
KKD						
L1.	.1551797	.1857116	0.84	0.403	-.2088085	.5191678
lnOP	.2730803	.3306552	0.83	0.409	-.3749919	.9211525
lnDBHSDA	-.4186265	.152264	-2.75	0.006	-.7170584	-.1201946
lnDAU	-5.135461	.9928588	-5.17	0.000	-7.081428	-3.189494
lnDAK	-.6299057	.4456856	-1.41	0.158	-1.503433	.243622
TR	7.175357	1.304252	5.50	0.000	4.61907	9.731644
_cons	81.63787	12.46853	6.55	0.000	57.20001	106.0757

b. Uji Sargan

```

Sargan test of overidentifying restrictions
H0: overidentifying restrictions are valid

chi2(5) = 4.874225
Prob > chi2 = 0.4314

```

c. Uji Arellano-Bond

```

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

```

Order	z	Prob > z
1	-2.3362	0.0195
2	-.72071	0.4711

H0: no autocorrelation

Lampiran 3. Hasil Uji Pemilihan Model SYS-GMM

a. Estimasi Model SYS-GMM

52

```

System dynamic panel-data estimation      Number of obs   =       560
Group variable: Wilayah                  Number of groups =       140
Time variable: tahun

Obs per group:
      min =         4
      avg =         4
      max =         4

Number of instruments =      15          Wald chi2(6)    =      130.31
                                          Prob > chi2     =      0.0000

Two-step results

```

	KKD	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
	KKD					
	LL	.5340715	.1272203	4.20	0.000	.2847242 .7834187
	lnOP	1.347092	.6000129	2.25	0.025	.1710881 2.523096
	lnDBHSDA	-.5988536	.1615019	-3.71	0.000	-.9153916 -.2823157
	lnDAU	-4.939938	1.104383	-4.47	0.000	-7.104488 -2.775388
	lnDAK	-.9483406	.4848271	-1.96	0.050	-1.898584 .0019031
	TR	9.061156	1.074011	8.44	0.000	6.956133 11.16618
	_cons	73.17186	14.45784	5.06	0.000	44.83502 101.5087

b. Uji Sargan

57

```

Sargan test of overidentifying restrictions
H0: overidentifying restrictions are valid

chi2(8) = 13.70987
Prob > chi2 = 0.0896

```

c. Uji Arellano-Bond

```

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

```

Order	z	Prob > z
1	-4.4547	0.0000
2	.05162	0.9588

H0: no autocorrelation

Lampiran 4. Hasil Ketidakbiasan Model

Variable	FEM	FDGMM	SYSGMM	PLS
KKD				
L1.	.17325869***	.15517965	.53407148***	.69513482***
lnOP	.40135234	.27308032	1.3470919*	.75382639***
lnDBHSDA	-.40352388***	-.41862646**	-.59885365***	-.16793635***
lnDAU	-5.9656459***	-5.1354611***	-4.9399378***	.48858092
lnDAK	-.37082055	-.62990569	-.94834056	-.24044572
TR	7.482826***	7.175357***	9.0611559***	4.8713616***
_cons	88.097368***	81.637869***	73.17186***	-6.8512607*
N	560	420	560	560
r2	.20819408			.80318782
r2_a	-.06912925			.80105242
legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001				

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anggaran.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
6	eprints.polsri.ac.id Internet Source	<1%
7	eprints.untirta.ac.id Internet Source	<1%
8	www.jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1%
9	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%

10	docplayer.info Internet Source	<1 %
11	123dok.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
14	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
19	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
20	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com	

Internet Source

<1 %

22

jmp.kemenkeu.go.id

Internet Source

<1 %

23

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

24

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

25

www.statistikian.com

Internet Source

<1 %

26

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

27

jurnal.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

28

ejournal.unp.ac.id

Internet Source

<1 %

29

eprints.kwikkiangie.ac.id

Internet Source

<1 %

30

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

31

ojs.palcomtech.ac.id

Internet Source

<1 %

32

repositori.unsil.ac.id

Internet Source

<1 %

33	dokumen.tips Internet Source	<1 %
34	journal.stieputrabangsa.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
36	es.scribd.com Internet Source	<1 %
37	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
39	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
40	Submitted to Yonkers High School Student Paper	<1 %
41	Yosua Hamonangan Sihombing. "Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2017 Publication	<1 %
42	www.bpk.go.id Internet Source	<1 %

43	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
44	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
45	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
46	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
47	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
48	scholarworks.uno.edu Internet Source	<1 %
49	Submitted to University of the Andes Student Paper	<1 %
50	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
51	Submitted to Politeknik Negeri Sriwijaya Student Paper	<1 %
52	Submitted to Indian Institute of Management, Indore Student Paper	<1 %
53	adoc.pub Internet Source	<1 %

54	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
55	Rapma Wati Siringo. "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera utara", Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2022 Publication	<1 %
56	www.scribd.com Internet Source	<1 %
57	Submitted to Bocconi University Student Paper	<1 %
58	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
59	Submitted to Heriot-Watt University Student Paper	<1 %
60	eprints.ukmc.ac.id Internet Source	<1 %
61	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
62	moam.info Internet Source	<1 %
63	repositori.usu.ac.id:8080 Internet Source	<1 %

64	www.djpk.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
65	ejournal.45mataram.ac.id Internet Source	<1 %
66	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1 %
67	Submitted to University of Nottingham Student Paper	<1 %
68	bappeda.cirebonkab.go.id Internet Source	<1 %
69	jurnal.uts.ac.id Internet Source	<1 %
70	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
71	Albertus Girik Allo. "Pola Aktivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dengan Pendekatan Static Location Quotient (SLQ)", Lensa Ekonomi, 2021 Publication	<1 %
72	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
73	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
74	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %

75	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
76	repository.urecol.org Internet Source	<1 %
77	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
78	www.kkji.kp3k.kkp.go.id Internet Source	<1 %
79	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
80	Syamsul Syamsul, Nasir Hamzah, Aryati Arfah. "Analisis Keunggulan Komparatif dan Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Sinjai", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021 Publication	<1 %
81	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
82	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
83	Pika Pika, Saiful Saiful, Nila Aprila. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, PINJAMAN DAERAH TERHADAP REALISASI	<1 %

BELANJA MODAL SUMATERA SELATAN",
JURNAL FAIRNESS, 2021

Publication

84

Jesiska C Karwur, Ventje Ilat, Jessy D.L Warongan. "FLYPAPER EFFECT ATAS DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018

Publication

<1 %

85

Submitted to Ajou University Graduate School

Student Paper

<1 %

86

Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

<1 %

87

dispusip.bantulkab.go.id

Internet Source

<1 %

88

Submitted to The University of Manchester

Student Paper

<1 %

89

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

<1 %

90

jdi.h.brebeskab.go.id

Internet Source

<1 %

91

jurnal.pancabudi.ac.id

Internet Source

<1 %

92	Internet Source	<1 %
93	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
94	conference.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
95	repository.usm.ac.id Internet Source	<1 %
96	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	<1 %
97	ejournal-ibik57.ac.id Internet Source	<1 %
98	jamal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
99	kumoro.staff.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
100	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
101	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
102	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
103	id.scribd.com Internet Source	<1 %

<1 %

104

ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

105

jurnal.upg.ac.id

Internet Source

<1 %

106

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

107

Misni Erwati, Muhammad Rizki Fajri.
"ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BUNGO", Jurnal
Manajemen Terapan dan Keuangan, 2017

Publication

<1 %

108

Refnini Refnini, Rini Indriani, Nila Aprila.
"PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS
PELAYANAN FISKUS, KESADARAN
PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN", JURNAL FAIRNESS, 2021

Publication

<1 %

109

eprints.ipdn.ac.id

Internet Source

<1 %

110

repository-feb.unpak.ac.id

Internet Source

<1 %

111

Birgitta Sekar Winda, Telisa Aulia Falianty.
"Pengaruh Foreign Direct Investment
Terhadap Emisi Gas CO2 di Negara G20", Al

<1 %

Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023

Publication

112	ejurnal.dpr.go.id Internet Source	<1 %
113	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
114	jurnal.murnisadar.ac.id Internet Source	<1 %
115	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
116	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
117	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
118	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
119	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
120	Submitted to University of Northumbria at Newcastle Student Paper	<1 %
121	kemenperin.go.id Internet Source	<1 %

repository.untag-sby.ac.id

122	Internet Source	<1 %
123	uia.e-journal.id Internet Source	<1 %
124	yripku.com Internet Source	<1 %
125	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
126	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
127	palangkaraya.go.id Internet Source	<1 %
128	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
129	Karmen Marpaung, Dedi Takari, Cici D Ompusunggu. "The Effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Original Income, Capital Expenditures on Economic Growth", Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya : GROWTH, 2023 Publication	<1 %
130	Vania Annissa Holle, Agustinus Salle, Mariolin Sanggenafa. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN	<1 %

INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

Publication

131 download.garuda.kemdikbud.go.id <1 %
Internet Source

132 stiemuttaqien.ac.id <1 %
Internet Source

133 Agung Dinarjito, Almizar Dharmazi. "PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020 <1 %
Publication

134 Submitted to Binus University International <1 %
Student Paper

135 Edison Vain S, Afrizal Afrizal, Yudi Yudi. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Institusional dan Asimetri Informasi Terhadap Cost of Equity Capital Dengan Nilai Buku Ekuitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Non Lembaga Keuangan Dalam Indeks Lq-45 <1 %

Tahun 2015 - 201", Jurnal Akuntansi &
Keuangan Unja, 2020

Publication

-
- 136 Jemy Ricardo Parera. "ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI KOTA JAYAPURA", Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies, 2023
Publication <1 %
-
- 137 Pebri Harto, Intiyas Utami, Rulyanti Susi Wardhani. "Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat", Owner, 2022
Publication <1 %
-
- 138 Submitted to Syiah Kuala University
Student Paper <1 %
-
- 139 Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper <1 %
-
- 140 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman
Student Paper <1 %
-
- 141 adoc.tips
Internet Source <1 %
-
- 142 journal.unnes.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 143 Usrotun Najah. "ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMDA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KUALITAS

HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LKPD", KEUDA (Jurnal Kajian
Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2019

Publication

-
- | | | |
|-----|--|------|
| 144 | Zaki Fakhroni, Irwansyah Irwansyah. "The effect of local own-source revenue and balancing funds on regional expenditures: A study of East Kalimantan regional expansion", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2019
Publication | <1 % |
| 145 | epub.imandiri.id
Internet Source | <1 % |
| 146 | etheses.uingusdur.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 147 | journal.binadarma.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 148 | www.frenchsif.org
Internet Source | <1 % |
| 149 | www.yumpu.com
Internet Source | <1 % |
| 150 | Goodwill Jurnal. "Goodwill Vol. 6 No. 1 Juni 2015", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2015
Publication | <1 % |
-

151	Kurniawan Azra'. "Analisis sektor unggulan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018-2022", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2024 Publication	<1 %
152	Yonas Muzani, Benardin Benardin. "KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU", Convergence: The Journal of Economic Development, 2020 Publication	<1 %
153	de.scribd.com Internet Source	<1 %
154	docslib.org Internet Source	<1 %
155	jurnal.utu.ac.id Internet Source	<1 %
156	jurnalfebi.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
157	ojs.ekuitas.ac.id Internet Source	<1 %
158	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
159	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
160	stp-mataram.e-journal.id Internet Source	

<1 %

161

Ari Mulianta Ginting, Muhammad Zilal Hamzah, Eleonora Sofilda. "Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2019

Publication

<1 %

162

Bayu Kharisma, Hani Hanifah. "Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2020

Publication

<1 %

163

Hastuti Olivia, Nurluthfiyyah Syarifah Hanun Siregar, Muhammad Razaq Araf, Zaskia Akhira et al. "Analisis Penerapan GCG menggunakan Data Time Series BCA dengan Otomasi NVIVO 12", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2023

Publication

<1 %

164

Mochamad Onky Prahasetia Tandjung, Unggul Heriqbaldi. "INTEGRASI EKONOMI DAN SINKRONISASI SIKLUS BISNIS DI ASEAN 5+3", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen

<1 %

- 165 Moreyne Inocencia Moningka, David Saerang, Debby Christina Rotinsulu. "ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI KOTA MANADO", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019 $<1\%$
- Publication
-

- 166 Muhammad Abduh. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2020 $<1\%$
- Publication
-

- 167 Nina Andriana. "PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020 $<1\%$
- Publication
-

- 168 Nuri Andriyani, Mukhzarudfa Mukhzarudfa, Enggar Diah PA. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2020 $<1\%$
- Publication
-

169	Tamara Teplova, Tatiana V. Sokolova, Qaiser Munir. "Emerging Bond Markets - Shedding Light on Trends and Patterns", Routledge, 2020 Publication	<1 %
170	bpkad.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
171	ejurnalunsam.id Internet Source	<1 %
172	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
173	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
174	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
175	jurnal.unimor.ac.id Internet Source	<1 %
176	koirumanaub.blogspot.com Internet Source	<1 %
177	m.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
178	mainsaham.id Internet Source	<1 %
179	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %

180	parkgyeoulimajination.wordpress.com Internet Source	<1 %
181	plhips11.blogspot.com Internet Source	<1 %
182	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
183	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
184	www.fkdpm.org Internet Source	<1 %
185	www.idxchannel.com Internet Source	<1 %
186	www.jurnal.umitra.ac.id Internet Source	<1 %
187	www.tokobarangbayi.com Internet Source	<1 %
188	Akbar Yusuf. "PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL (CURRENT RATIO, RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, TOTAL ASSET TURN OVER, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN ASSET GROWTH) TERHADAP BETA SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA", INA-Rxiv, 2019 Publication	<1 %

- 189 Albert Honggara, Jamaluddin Jamaluddin. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021", *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2024
Publication <1 %
-
- 190 Helena Louise Panggabean, Danarti Hariani, A. Yanuar B. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019", *Owner*, 2022
Publication <1 %
-
- 191 Submitted to Krida Wacana Christian University
Student Paper <1 %
-
- 192 Rahmat Maulana, Pandri Ferdias, Agus Lukman Hakim, Zaenal Abidin, Ali Salmande, Miftah Faiz Ali Ramdhani, M Robbi Qawi. "Analisis Proyeksi Target Capaian Pajak Daerah Berbasis Potensi Wilayah", *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 2023
Publication <1 %
-
- 193 Rani Velia Salsabilla, Iskandar Ali Alam. "Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan <1 %

Pemerintah Kota Bandar Lampung", Jurnal EMT KITA, 2023

Publication

194	adhykaleka.blogspot.com Internet Source	<1 %
195	docobook.com Internet Source	<1 %
196	ejournal.polinpdg.ac.id Internet Source	<1 %
197	ejurnal.stie-trianandra.ac.id Internet Source	<1 %
198	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
199	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
200	jurnal.umk.ac.id Internet Source	<1 %
201	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
202	kumpulantulisanpendidikan.blogspot.com Internet Source	<1 %
203	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
204	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %

205	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
206	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
207	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
208	situmorangyessica.blogspot.com Internet Source	<1 %
209	www.bandung.go.id Internet Source	<1 %
210	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
211	www.jove.com Internet Source	<1 %
212	www.sipri.org Internet Source	<1 %
213	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
214	Bonnie Permana Negara, Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021	<1 %

215 Iman Akhadi. "Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022
Publication

<1 %

216 Merry Inriama, Milla Sepliana Setyowati. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN", Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2020
Publication

<1 %

217 eskripsi.usm.ac.id
Internet Source

<1 %

218 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

<1 %

219 repository.usu.ac.id
Internet Source

<1 %

220 www.bangkalankab.go.id
Internet Source

<1 %

221 Dwi Fitriani, Yundy Hafizrianda, Ida Ayu Purba Riani. "ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN JAYAPURA", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2019

<1 %

222 Heppy Purbasari, Andy Dwi Bayu Bawono, Luki Eko Wahyudi. "Important factors to influence the coverage of drinking water", *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2023
Publication <1 %

223 Novita Wulandari, Rahmad Wahyu Hidayat, Moh. Khoirul Fuddin. "Pengaruh DBH, DAU, DAK Terhadap Bd Di Kota, Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2021", *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 2023
Publication <1 %

224 Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"*, 2013
Publication <1 %

225 desadankawasan.blogspot.com
Internet Source <1 %

226 journal.feb.unmul.ac.id
Internet Source <1 %

227 readyygo.blogspot.com
Internet Source <1 %

Exclude bibliography On